

ISSN 1829-569X

JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN



JIK

VOL. 13

No.1

Hal.1-171

Makassar
27 Juli 2020

ISSN
1829-569X

ISSN 1829-569X

JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN Volume 13, Nomor 1, 27 Juli 2020

Halaman 1-171

Penasihat:

Kepala LPMP Sulawesi Selatan
Dr. H. Abdul Halim Muhammam, M.Pd.

Penanggung Jawab:

Kabag Umum
Drs. Suardi B., M.Pd

Pimpinan Redaksi

Dr. Muhammad Anis, S.Si., M.Si

Dewan Redaksi

Ketua : Dr. Syamsul Alam, M.Pd
Sekretaris : Drs. Darwis Sasmedi, M.Pd.
Anggota : Drs. Mansur HR., M.Pd.
Fahrawaty, S.S., M.Ed.
Rahmania, S.Pd., M.Pd.
Rahmatiah, S.Si., M.Si

Setting dan layout:

Syamsul Qamar, S. H.
Andi Amrullah Habibi, ST
Miftah Ashari Kurniawan, S.Kom

Sekretariat:

Media LPMP Sulawesi Selatan
Surel: medialpmpsulsel@gmail.com

Pengantar Redaksi

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyajikan artikel dalam Jurnal Ilmu Kependidikan yang diterbitkan oleh LPMP Sulawesi Selatan.

Jurnal Ilmu Kependidikan Volume 13 No. 1 Edisi Juli 2020 merupakan media bagi Guru, Pengawas, Kepala Sekolah, Widyausaha, Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Fungsional Ahli lainnya untuk mengembangkan ide kreatif berupa karya ilmiah baik hasil penelitian maupun karya ilmiah hasil pemikiran/kajian ilmiah.

Karya tulis ilmiah yang dimuat pada edisi ini, merupakan hasil pemikiran tentang berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artikel ilmiah yang dimuat pada edisi ini diantaranya adalah (1) Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota Gorontalo, (2) Capaian Mutu Standar Nasional Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Bulukumba, (3) Peranan Pendampingan Widyausaha dan Pengawas Pembina dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Gorontalo, (4) Penyuntingan Naskah Artikel sebelum Dipublikasikan, (5) Pemanfaatan Game Edukasi dalam Mengajarkan Tata Cara Berwudhu, (6) Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Inggris melalui Penilaian Autentik pada Siswa Kelas VII SMPN 6 Makassar, (7) Implementasi Penilaian High Order Thinking Skill (HOTS) pada Mata Pelajaran Ekonomi SMA, (8) Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Menyusun Kelengkapan Mengajar Melalui Metode In House Training di SMKN 2 Barru, (9) Pelaksanaan Supervisi Mutu Pendidikan oleh Pengawas Sekolah dan Dampaknya terhadap Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Provinsi Sulawesi Selatan, (10) Efektivitas Pembelajaran Daring pada Kegiatan Belajar dari Rumah selama Masa Pendemi Covid-19, (11) Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan di Kota Palopo pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 dan (12) Pengembangan Perangkat Pembelajaran RPP dan Bahan Ajar (LKS) yang Berbasis Masalah Guru Matematika SMA Negeri 3 Barru.

Diharapkan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh LPMP Sulawesi Selatan dapat menunjang pengembangan karir dan keprofesionalan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di lingkungan Kemendikbud. Pembaca dapat mengunduh Jurnal Ilmu Kependidikan melalui laman <https://lpmpulse.kemdikbud.go.id/>

Semoga artikel yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Kependidikan ini memberikan manfaat kepada para pembaca, sehingga dapat memberi kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di tanah air

Makassar, 27 Juli 2020
Pemimpin Redaksi

ISSN 1829-569X

JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN

Volume 13, Nomor 1, 27 Juli 2020

Halaman 1-171

DAFTAR ISI

Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SMA di Kota Gorontalo (<i>Ahmad Polapa</i>)	1
Capaian Mutu Standar Nasional Pendidikan Jenjang SD di Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan (<i>Ainun Farida</i>)	19
Peranan Kegiatan Pendampingan Widyaishwara dan Pengawas Pembina dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Jenjang SD dan SMP di Provinsi Gorontalo (<i>Suleman Haridji</i>)	35
Penyuntingan Naskah Artikel sebelum Dipublikasikan (<i>Syamsul Alam</i>).....	50
Pemanfaatan Game Edukasi dalam Mengajarkan Tata Cara Berwudhu kepada Anak Usia Dini (<i>Sitti Hajrah</i>)	61
Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Inggris Melalui Penilaian Autentik pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 6 Makassar (<i>Rosmawati Muhmar</i>)	73
Implementasi Penilaian Berorientasi <i>HOTS</i> pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA (<i>Mansur HR</i>)	83
Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Menyusun Kelengkapan Mengajar Melalui Metode In House Training (IHT) di SMKN 2 Barru (<i>Sabirin SJ</i>).....	101
Pelaksanaan Supervisi Mutu Pendidikan oleh Pengawas Sekolah dan Dampaknya Terhadap Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Provinsi Sulawesi Selatan (<i>Rahmaniar</i>)....	114
Efektivitas Pembelajaran Daring pada Kegiatan Belajar dari Rumah Selama Masa Pandemi COVID-19 (<i>Rahmatiah</i>)	132
Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Kota Palopo pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2018 (<i>Fahrawaty</i>).....	145
Pengembangan Perangkat Pembelajaran RPP dan Bahan Ajar (LKS) Yang Berbasis Masalah Guru Matematika SMA Negeri 3 Barru (<i>Abd. Gani</i>).....	158

EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 TINGKAT SMA DI KOTA GORONTALO

Ahmad Polapa
LPMP Gorontalo

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi efektifitas implementasi kurikulum 2013 dan hambatan yang dihadapi selama implementasi. Model evaluasi yang digunakan adalah model diskrepansi dari Provus. Sampel penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah SMA di Kota Gorontalo. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian implementasi kurikulum 2013 menunjukkan bahwa aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan aspek pengawasan pembelajaran memiliki nilai kesenjangan/diskrepansi rata-rata sebesar 19,72 dengan kategori sempit sedangkan aspek penilaian hasil belajar memiliki nilai kesenjangan sebesar 25,70 dengan kategori cukup lebar.

Kata kunci: evaluasi, implementasi, kurukulum 2013

Kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini adalah kurikulum nasional yang dikenal dengan sebutan Kurikulum 2013. Sejak diimplementasi pertama kali pada tahun 2013, sudah mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan. Perubahan yang berkelanjutan ini dimaksudkan untuk merespon perubahan dan dinamika global berupa kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, populasi dan lingkungan hidup. (Cogan & Derricott, 1998; dalam Manik Nur Haq dan Mukhamad Murdiono).

Penerapan Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif inovatif dan afektif, melalui penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan (Puskurbuk, 2012). Untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum 2013 menekankan pada proses pembelajaran saintifik yang menganut paradigma konstruktivisme. Dengan demikian maka siswa diharapkan dapat memahami konsep sehingga hasil proses pembelajaran dapat masuk dalam *longterm memory* dan siswa dapat memahami esensi belajar.

Hal yang memberikan perbedaan mencolok antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah penekanan ranah pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pada proses pendidikan yang holistik sehingga menyentuh pada cakupan yang lebih luas yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor sebagai satu kesatuan yang

utuh sebagai hasil belajar anak didik. Hasil belajar tersebut diorganisasikan dalam empat kompetensi inti yaitu kompetensi sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, maka potensi siswa selain dari domain kognitif juga dapat terpantau dan dikembangkan.

Pemahaman guru mengenai esensi kurikulum sangatlah penting karena menentukan perubahan yang dilakukan untuk merespons perubahan kurikulum secara proporsional dan profesional (Muth'im 2014). Transformasi ilmu dan nilai-nilai dari guru kepada siswa sangat tergantung pada metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Untuk itu seorang guru dituntut untuk keratifitas dan inovasi dalam menggunakan meode dan pendekatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa tercapai.

Walaupun kurikulum 2013 sudah dilaksanakan sejak tahun pelajaran 2013/2014, fenomena di lapangan mengindikasikan belum seluruh guru memiliki kemampuan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan benar. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik menuntut kesiapan seluruh guru mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses

pembelajaran, dan penilaian hasil belajar yang sesuai amanah kurikulum. Di samping itu pula peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dituntut untuk mengawal dan mendampingi guru melalui supervisi yang terprogram dengan baik untuk memastikan pelaksanaan tugas mengajar guru berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk mengetahui efektifitas implementasi kurikulum 2013 perlu dilakukan penelitian evaluasi. Menurut Noris (1998) yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang suatu kurikulum yang tujuan untuk memberi pertimbangan bagi penyempurnaan dan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Hasan (2014), evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai nilai dan arti kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Sedangkan Rutman and Mowbray (1983) mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan *outcomes* suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Chelimsky (1989) mendefinisikan evaluasi adalah suatu

metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program.

Uraian di atas menunjukkan perlu adanya evaluasi mengenai implementasi kurikulum 2013 terutama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Gorontalo. Tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang efektifitas pelaksanaan kurikulum yang meliputi aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar serta pengawasan pembelajaran. Efektifitas dimaksud adalah kesesuaian implementasi kurikulum 2013 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi kesenjangan (*discrepancy evaluation model*) yang diperkenalkan oleh Malcolm Provus yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu program. Model evaluasi diskrepansi.

Adalah sebuah proses pengelolaan informasi yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program secara berlanjut.

Populasi penelitian ini adalah guru-guru dari SMA Negeri dan swasta yang terdapat di Kota Gorontalo yang terdiri atas 6 SMA. Jumlah populasi dan sampel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Populasi Penelitian

No	Nama Sekolah	Kepala Sekolah	Guru
1	SMA Negeri Gorontalo	2	62
2	SMA Negeri Gorontalo	3	81
3	SMA Negeri Gorontalo	4	52
4	SMA Negeri Gorontalo	5	31
5	SMA Muhammadiyah Gorontalo	1	20
Jumlah		5	246

Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang. Berdasarkan jumlah populasi di atas, ditentukan ukuran sampel sebesar 10 % untuk guru yakni sebanyak 24 orang guru. Sedangkan untuk kepala sekolah karena jumlahnya hanya 5 orang maka jumlahnya sampelnya sebanyak populasi yakni tetap 5 orang kepala sekolah.

Variabel

Variable yang terlibat dalam penelitian evaluasi program ini adalah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum 2013.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah (1) metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data terkait perencanaan pembelajaran, (2) metode observasi digunakan untuk mengambil data terkait pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian (3) metode wawancara digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya diskrepansi tentang implementasi pendekatan saintifik serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembelajaran.

Instrumen yang digunakan untuk mengambil data adalah instrumen penilaian proses pembelajaran kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud RI. Instrumen ini kemudian disesuaikan dengan kriteria implementasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Sebelum instrumen digunakan dilakukan validasi instrumen. Dalam penelitian ini jenis validitas yang digunakan adalah uji validitas isi (*content validity*) dengan

menggunakan rumus Gregory (uji dua pakar).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik persentase. Adapun kriteria evaluasi keefektifan pelaksanaan standar isi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Permendikbud Nomor 22 tahun 2016. Standar kriteria yang dimaksud meliputi: (1) Perencanaan proses pembelajaran: (a) Silabus; (b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) Pelaksanaan Pembelajaran; (3) Penilaian, dan (4) Pengawasan Pembelajaran.

Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya kualitas dari kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan kesenjangan yang terjadi terkait standar prosessesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kualitas dari kemampuan guru dalam mengimplementasikan standar proses yaitu dengan memberi skor dari 1 sampai 5 pada lembar observasi sesuai kinerja yang ditunjukkan oleh guru terkait implementasi pendekatan saintifik.

Setelah mendapatkan skor kinerja guru, kemudian dikonversi ke dalam data persentil. Dilanjutkan dengan menghitung nilai rata-rata dan terakhir dikonversikan kedalam tabel Penilaian Acuan Kriteria (PAK) sebagai berikut :

Tabel 1: Klasifikasi Kemampuan Guru

No	Kriteria Penguasaan (%)	Keterangan
1	90 - 100	Sangat Baik
2	80 - 89	Baik
3	65 - 79	Cukup Baik
4	40 - 64	Kurang Baik
5	0 - 39	Sangat Kurang Baik

(Sumber: Dantes, 2014:215 dalam Putu Eka Andriani dkk: 2017)

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara kemampuan guru yang terobservasi dengan standar proses pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016, yaitu dengan cara mengurangi skor maksimum ideal (dalam persentil) dengan skor observasi (dalam persentil). Dengan demikian, didapatkan skor kesenjangan (dalam persentil) untuk selanjutnya dikonversikan kedalam tabel Diskrepansi Penilaian Acuan Kriteria (D-PAK) yang merupakan adaptasi dari Penilaian Acuan Kriteria (PAK) pada tabel 2 berikut :

Tabel 2: Acuan Kriteria Kesenjangan (Diskrepansi).

No	Kriteria Diskrepansi	Keterangan
1	0 - 10	Sangat Sempit
2	11 - 20	Sempit
3	21 - 35	Cukup Lebar
4	36 - 60	Lebar
5	61 - 100	Sangat Lebar

(Sumber: Dantes, 2014:215 dalam Putu Eka Andriani dkk: 2017).

Berdasarkan nilai kesenjangan (diskrepansi) yang didapat kemudian dibandingkan dengan dengan kriteria seperti pada tabel 3 berikut.

Tabel 3: Kriteria Evaluasi.

Nilai	Interval Skor (diskrepansi)	Kriteria
A	0 - 10	Sangat Efektif
B	11 - 20	Efektif
C	21 - 35	Cukup Efektif
D	36 - 60	Tidak Efektif
E	61 - 100	Sangat Tidak Efektif

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini ditetapkan pada rentang “sangat efektif” dan “efektif”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data terhadap aspek perencanaan pembelajaran yang terdiri atas silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), rata-rata kemampuan guru dalam penyusunan rencana pembelajaran sebesar 84,60% dengan “kategori baik”, dan besarnya kesenjangan 15,40 dengan “kategori sempit”. Hasil evaluasi dalam perencanaan proses pembelajaran disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4: Hasil Evaluasi Perencanaan Pembelajaran.

No	Komponen Perencanaan Pembelajaran	Standar	Capaian	Kesenjangan	Kategori Kesenjangan
1	Silabus	100	86,36	13,64	Sempit
2	RPP				
a.	Perumusan Tujuan	100	85,11	14,89	Sempit
b.	Perumusan Indikator	100	78,34	21,66	Cukup Lebar
c.	Metode Pembelajaran	100	85,24	14,76	Sempit
d.	Media dan Sumber Belajar	100	87,17	12,83	Sempit
e.	Langkah-Langkah Pembelajaran	100	79,34	20,66	Cukup Lebar
f.	Penilaian Hasil Belajar	100	78,35	21,65	Cukup Lebar
Rata-rata			82,84	17,16	Sempit

Berdasarkan data hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa rata-rata kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam aspek perencanaan pembelajaran sudah mencapai kriteria “efektif”. Hal ini bermakna bahwa perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru sudah sesuai dengan standar pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 baik dari segi komponen maupun mekanisme pengembangannya. Namun demikian terdapat tiga komponen dalam perencanaan pembelajaran yang menunjukkan kesenjangan dengan kategori cukup lebar atau kriteria evaluasi cukup efektif. Komponen dimaksud adalah perumusan indikator pencapaian kompetensi (IPK), perancangan langkah-langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Rendahnya pencapaian IPK dari deskripsi data ditemukan beberapa guru yang masih kesulitan.

Penjabaran Kompetensi dasar (KD) kedalam rumusan IPK yang sesuai dengan dimensi proses kognisi (C1, C2, C3, C4, C5, dan C6) maupun dimensi pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi). Kata-kata kerja operasional pada IPK yang dikembangkan guru lebih didominasi oleh kata kerja operasional (KKO) pada level C1, C2, dan C3 dan jarang-jarang sampai pada level C4, C5 dan C6. Dmikian pula halnya dengan KD keterampilan, dimana sebagian kecil guru belum mengembangkan indikator untuk KD keterampilan baik keterampilan abstrak maupun keterampilan konkret.

Langkah-langkah pembelajaran yang disusun oleh guru sebagian belum mencerminkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*). Dominasi guru masih tampak hampir pada setiap langkah pembelajaran, hal ini terbukti dengan penggunaan model-model

pembelajaran atau metode yang masih *teacher oriented*. Kegiatan pembelajaran yang dirancang guru belum sepenuhnya menggambarkan pembelajaran aktif (*active learning*) dengan menggunakan berbagai model dan/atau metode pembelajaran dengan pendekatan ilmiah maupun pendekatan lain yang relevan. Pada telaah RPP yang dilakukan, ditemukan beberapa guru yang belum mahir merancang kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada ketrampilan berpikir tingkat rendah (*lower order thinking skills/LOTS*) menuju pada ketrampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills/HOTS*). Hal ini penting karena tujuan pembelajaran yang berorientasi HOTS antara lain meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif

dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki

serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks (Saputra, 2016:91-92).

Komponen selanjutnya dalam aspek perencanaan (RPP) yang nilai efektifitasnya berkategori cukup adalah perencanaan penilaian hasil belajar. Hal menonjol yang ditemukan dalam hal ini adalah ketidaksesuaian antara soal yang disusun oleh dengan IPK. Juga terdapat beberapa soal yang level kognisinya tidak mencapai level kognisi yang dikehendaki oleh kompetensi dasar. Disamping itu terdapat beberapa guru yang menyusul soal tidak dilengkapi dengan kisi-kisi penyusunan soal.

Nilai capaian rata-rata kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran mencapai 81,93% dan kesenjangan sebesar 18,07. Hasil evaluasi kemampuan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5: Hasil Evaluasi Proses Pembelajaran

No	Komponen Pelaksanaan Pembelajaran	Standar	Capaian	Kesenjang an	Kategori Kesenjangan
1	Kegiatan Pendahuluan	100	78,21	21,79	Cukup Lebar
2	Kegiatan Inti				
a.	Penguasaan Materi Pembelajaran	100	87,11	12,89	Sempit
b.	Implementasi Pembelajaran (5 C)	100	70,34	29,66	Cukup Lebar
c.	Pemanfaatan Media dan Sumber Belajar	100	85,6	14,4	Sempit
d.	Interaksi dengan Peserta Didik	100	87,77	12,23	Sempit
e.	Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran	100	89,34	10,66	Sempit
3	Kegiatan Penutup	100	75,35	24,65	Cukup Lebar
Rata-rata		100	81,96	18,04	Sempit

Berdasarkan data hasil penelitian di atas kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan data hasil pengamatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan guru rata-rata sudah mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan yang ada pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Pelaksanaan pembelajaran yang baik ini didukung oleh penguasaan materi pembelajaran yang baik, pemanfaatan media dan sumber belajar tepat, serta interaksi guru dan siswa yang kondusif selama pembelajaran. Selama pembelajaran berlangsung rata-rata guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat sehingga pembelajaran berlangsung dengansangat komunikatif.

Komponen pembelajaran pada aspek pendahuluan yang memiliki kesenjangan yang cukup lebar adalah kegiatan pendahuluan, implementasi langkah-langkah pembelajaran sesuai pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan), dan aspek kegiatan penutup pembelajaran. Ketiga komponen ini menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar sehingga hasil evaluasinya masih berkategori cukup.

Pada kegiatan pendahuluan terdapat beberapa guru yang mengalami kesulitan dalam melakukan apersepsi dengan baik dan tepat. Pada langkah kegiatan ini beberapa guru menggunakan banyak waktu untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan materi dan atau pengetahuan siswa sebelumnya. Materi apersepsi kadang-kadang tidak begitu relevan dengan materi yang akan diajarkan. Kesulitan lain yang ditemukan adalah kemampuan guru dalam membangun motivasi siswa. Beberapa guru gagal membangun motivasi siswa diawal pembelajaran sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi siswa diawal pembelajaran.

Aspek berikutnya yang memiliki kesenjangan yang “cukup lebar” yakni kemampuan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik (5 M). Terdapat beberapa guru yang belum mampu melaksanakan enam pengalaman belajar pokok pada pendekatan saintifik terutama pada kegiatan “menanya” dan “mencipta” sehingga proses pembelajaran terkesan masih didominasi oleh guru. Kegiatan menanya cenderung dilakukan oleh guru tanpa mendorong siswa untuk mau bertanya. Guru kurang menuntut siswa

untuk membuat karya berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya karena keterbatasan waktu. Selain itu, guru masih kesulitan menggunakan model pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik sehingga aktifitas siswa di kelas cenderung didominasi oleh siswa-siswa tertentu saja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Andriani, dkk (2017: 72) yang melakukan penelitian terhadap kemampuan guru dalam mengimplementasi pendekatan saintifik di SD negeri Denpasar Barat yang menemukan bahwa kemampuan guru dalam mengimplementasikan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik masih belum efektif.

Kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam hal kegiatan penutup pembelajaran menunjukkan nilai kesenjangan yang cukup lebar sehingga efektifitasnya tergolong cukup. Hal ini disebabkan oleh beberapa guru yang kesulitan melakukan kegiatan penutup pembelajaran dengan baik. Salah satu kegiatan penutup pembelajaran yang penting adalah kegiatan menyimpulkan hasil pembelajaran. Beberapa guru cenderung menyimpulkan sendiri hasil pembelajaran tanpa melibatkan siswa.

Pelaksanaan pembelajaran yang efektif sangat tergantung pada perencanaan pembelajaran yang baik. Efektifitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari interaksi antara siswa dengan guru dalam suasana yang edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran, hal ini sesuai pendapat (Afifatu, 2015: 17). Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang efektif akan menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Pendapat lain yang berkaitan dengan efektifitas pembelajaran dikemukakan oleh Deassy dan Endang (2018) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif memungkinkan bagi siswa untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan dan sikap dengan mudah, menyenangkan, dan dapat terselesaikan tujuan pembelajaran sesuai harapan.

Nilai rata-rata aspek penilaian pembelajaran dalam penelitian ini adalah sebesar 74,30 % dengan kategori cukup lebar dan nilai kesenjangan sebesar 25,70. Hasil evaluasi kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013 dapat dilihat pada tabel tabel 6 berikut.

Tabel 6: Hasil Evaluasi Penilaian Hasil Belajar.

No	Komponen Penilaian Hasil Belajar	Standar	Capaian	Diskrepansi	Kategori Diskrepansi
1	Perencanaan Penilaian	100	81,22	18,78	Cukup Lebar
2	Pelaksanaan Penilaian	100	76,42	23,58	Sempit
3	Tindaklanjut Hasil Penilaian	100	67,13	32,87	Sempit
4	Pemanfaatan Hasil Penilaian	100	72,45	27,55	Cukup Lebar
Rata-rata		100	74,30	25,70	Cukup Lebar

Data hasil penelitian yang terkumpul menunjukkan rata-rata kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian kurikulum 2013 secara umum menunjukkan kesenjangan yang “cukup lebar”. Hal ini berarti hasil evaluasi aspek penilaian kurikulum 2013 efektifitasnya masih berada pada kategori cukup. Dari empat komponen dalam aspek penilaian terdapat dua yang sudah memenuhi kriteria efektif, yakni komponen pelaksanaan penilaian dan komponen tindaklanjut hasil penilaian.

Menurut hasil pengamatan, seluruh guru sudah melaksanakan penilaian pembelajaran dan menindak lanjuti hasil penilaian dalam bentuk remedial maupun pengayaan. Sementara itu terdapat dua komponen penilaian yang masih menunjukkan nilai evaluasi cukup efektif yakni komponen perencanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian. Keadaan ini diakibatkan oleh beberapa guru yang masih kesulitan dalam menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. Disamping itu

juga sebagian guru belum menggunakan hasil penilaian sebagai bahan perencanaan pembelajaran selanjutnya. Rendahnya aspek penilaian dalam penelitian ini juga berkaitan erat dengan banyaknya administrasi penilaian yang harus disiapkan oleh guru. Sementara itu hal yang ikut berkontribusi dalam masalah ini adalah regulasi tentang penilaian yang sering berubah-ubah yang menyebabkan kebingungan pada sebagian guru.

Nilai rata-rata aspek pengawasan dalam penelitian ini sebesar 80,52 % dengan kategori baik dan nilai kesenjangan sebesar 19,40 dengan kategori sempit. Capain aspek pengawasan ini diperoleh dari rerata nilai empat komponen pengawasan yakni; perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tindaklanjut hasil pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan. Hasil evaluasi pengawasan pembelajaran ini disajikan pada tabel tabel 7 berikut.

Tabel 7: Hasil Evaluasi Pengawasan Pembelajaran.

No	Komponen Pengawasan Pembelajaran	Standar	Capaian	Kesenjangan	Kategori Kesenjangan
1	Perencanaan Pengawasan	100	82,17	17,83	Sempit
2	Pelaksanaan Pengawasan Tindaklanjut	100	81,23	18,77	Sempit
3	Hasil Pengawasan	100	78,45	21,55	Cukup Lebar
4	Pelaporan Hasil Pengawasan	100	80,21	19,79	Sempit
	Rata-rata	100	80,52	19,48	Sempit

Data keterlaksanaan pengawasan pembelajaran menunjukkan capaian hasil evaluasi dengan kriteria “efektif”. Dari empat komponen aspek pengawasan yang dievaluasi, komponen perencanaan pengawasan, komponen pelaksanaan pengawasan, dan komponen pelaporan hasil pengawasan sudah mencapai kategori ‘efektif’. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya dokumen pengawasan atau supervisi disertai hasil pengawasan dan laporan pengawasan pada setiap kepala sekolah.

Satu-satunya komponen yang nilai evaluasinya yang berkategori cukup adalah komponen tindaklanjut hasil pengawasan. Hasil analisis data komponen menunjukkan nilai kesenjangan yang cukup lebar dari standar. Dengan demikian hasil evaluasi komponen ini masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kepala sekolah yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil kepengawasan. Pada umumnya bentuk tindaklanjut yang dilaksanakan oleh kepala sekolah hanya dalam bentuk pembinaan

secara umum. Jarang kepala sekolah memberikan pembinaan yang sifatnya spesifik sesuai dengan permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh guru.

Pengawasan atau supervisi pembelajaran adalah salah satu penentu terlaksananya kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Dalam melaksanakan pengawasan pembelajaran, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran tugasnya bukan sekedar menilai kinerja guru saja tetapi menilai keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Glickman (1981: 34) yang mengatakan supervisi akademik atau pengawasan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran. Dalam penelitian ini terungkap bahwa aspek pengawasan pembelajaran belum terlaksana secara efektif. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap kepala sekolah umumnya aspek pengawasan pembelajaran sudah berjalan

dengan baik pada komponen perencanaan dan pelaksanaan. Namun pada komponen tindaklanjut pengawasan belum berjalan dengan baik. Banyak kepala sekolah yang tidak menindak lanjuti hasil pengawasan pembelajaran. Sebagian kepala sekolah mengungkapkan alasan tidak melakukan tindaklanjut hasil pengawasan karena beban kerja dan administrasi yang cukup berat.

Berdasarkan uraian dan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum 2013 tingkat SMA di kota Gorontalo berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan data capaian seluruh aspek implementasi kurikulum 2013 rata-rata sebesar 80,28% dengan kategori “baik” dan nilai kesenjangan sebesar 19,72 dengan kategori “sempit”. Hasil analisis data evaluasi seperti yang disajikan pada tabel 8 berikut.

Tabel 8: Hasil Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013.

Data ini mengindikasikan bahwa implementasi kurikulum 2013 tingkat SMA di kota Gorontalo sudah sesuai dengan harapan pemerintah seperti yang tertuang pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Untuk menguatkan hasil analisis data di atas, dilakukan wawancara terhadap guru dan kepala sekolah serta pengawas pembina satuan pendidikan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi kurikulum 2013 tingkat SMA antara lain; sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Gorontalo, pendampingan yang intensif dari fasilitator kurikulum 2013 di setiap sekolah maupun di tingkat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Faktor pendukung lainnya adalah bimbingan dan pengawasan dari

No	Aspek Implementasi Kurikulum	Standar	Capaian (%)	Kesenjangan	Kategori Kesenjangan
1	Perencanaan Pembelajaran a. Silabus b. RPP	100	86,36 82,84	13,64 17,16	Sempit Sempit
2	Pelaksanaan Pembelajaran	100	81,96	18,04	Sempit
3	Penilaian Hasil Belajar	100	74,30	25,70	Cukup Lebar
4	Pengawasan Pembelajaran Rata-rata :	100	80,52 80,28	19,48 19,72	Sempit Sempit

kepala sekolah dan pengawas pembina di masing-masing satuan pendidikan serta motivasi guru yang tinggi.

Selain faktor pendukung tersebut di atas terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan selama pelaksanaan kurikulum 2013. Hambatan-hambatan itu dapat diuraikan sesuai dengan aspek pelaksanaan pelaksanaan kurikulum yakni hambatan pada perencanaan pembelajaran, hambatan pelaksanaan pembelajaran, hambatan penilaian, dan hambatan dalam pengawasan pembelajaran.

Hambatan yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran antara lain adalah kesulitan guru dalam menjabarkan kompetensi dasar (KD) ke dalam indikator yang tepat. Ada sebagian guru yang sulit menbedakan antara tujuan pembelajaran dengan indikator pembelajaran. Selain indikator pembelajaran kesulitan lain pada guru umumnya pada menentukan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Memang pada pelatihan kurikulum 2013 kepada guru sudah dilatihkan beberapa model pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik, tetapi implementasinya di lapangan masih mengalami hambatan.

Contoh-contoh RPP yang diberikan pada saat pelatihan dan pendampingan

kurikulum 2013 sepenuhnya ditiru oleh guru tanpa melakukan adaptasi dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Hal ini berakibat pada ketidaksesuaian antara model-model pembelajaran yang dituliskan guru pada RPP dengan karakteristik peserta didik maupun karakteristik mata pelajaran.

Pada sebagian mata pelajaran terdeteksi penggunaan satu model pembelajaran tertentu pada semua mata pelajaran. Hal ini tentulah tidak keliru tetapi alangkah baiknya guru tetap berinovasi dengan model-model pembelajaran yang lain agar pembelajaran menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh Chauchan (Iru dan Arihi, 2012: 9) yang menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran yang tepat akan membantu guru dalam memberi arah terhadap pembelajaran, sebagai pedoman dalam penjabaran langkah-langkah pembelajaran, sekaligus berfungsi sebagai alat bantu untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar.

Hambatan yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang ditemukan adalah kemampuan guru dalam mebuka pembelajaran pada kegiatan pendahuluan. Penjelasan yang menarik dan

sesuai dengan konteks peserta didik diharapkan dapat membantu mereka untuk dapat berpartisipasi dalam aspek menanya. Sayangnya penjelasan atau pendahuluan yang dilakukan oleh guru terkadang kurang menarik, tidak sesuai konteks, dan tidak mengulas pokok permasalahan sehingga tidak merangsang siswa untuk bertanya (Manik Nur Haq dan Mukhamad Murdiono 2019). Kegiatan pendahuluan ini kadang-kadang menyita banyak waktu disebabkan guru yang belum begitu mahir dalam melaksanakan apersepsi yang tepat, sehingga berakibat pada kurang fokusnya siswa dalam mengawali pembelajaran.

Penerapan langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik 5 M (mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengomunikasikan) belum optimal. Pada umumnya siswa menemui kesulitan pada langkah atau kegiatan “menanya”. Pada tahapan ini seharusnya siswa itu terbiasa menanya atau mempertanyakan sesuatu yang berhubungan dengan hasil kegiatan “mengamati” pada kegiatan sebelumnya. Namun kenyataannya banyak siswa yang tidak mampu untuk mengajukan pertanyaan, jika pun ada hanya didominasi oleh siswa-siswa tertentu. Siswa tidak terbiasa berdiskusi baik dengan guru maupun sesama siswa.

Perubahan pendekatan pembelajaran dari *teacher oriented* (berpusat pada guru) sebelumnya menjadi pembelajaran yang *student oriented* (berpusat pada siswa) pada kurikulum 2013 memerlukan guru yang kompeten. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Manik Nur Haq dan Mukhamad Murdiono (2019:198) yang menyatakan salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi pendekatan saintifik adalah kompetensi guru. Untuk itu perlu upaya yang optimal untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam pembelajaran.

Hambatan dalam implementasi kurikulum 2013 pada aspek penilaian adalah kesulitan beberapa guru berkaitan dengan penulisan deskripsi capaian aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Di samping itu sejumlah pendidik mengaku bahwa mereka belum percaya diri dalam mengembangkan butir-butir soal pengetahuan karena kurang memahami bagaimana untuk merumuskan indikator soal dan menyusun butir-butir soal untuk pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural yang dikombinasikan dengan keterampilan berpikir tingkat rendah (LOTS) hingga ketrampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Selain itu, banyak di antara

pendidik yang merasa kurang percaya diri dalam melaksanakan penilaian keterampilan karena belum sepenuhnya memahami bagaimana menyusun instrumen dan rubrik penilaian keterampilan (Kemendikbud, 2016).

Walaupun sebagian besar guru yang diteliti telah membuat format penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan namun saat dilakukan observasi di kelas ternyata seluruh guru belum melakukan penilaian autentik secara utuh terutama yang berupa penilaian sikap dan keterampilan. Selama proses pembelajaran berlangsung guru disibukkan dengan berbagai aktivitas belajar mengajar seperti menjawab pertanyaan siswa, mengarahkan jalannya diskusi, membantu siswa yang kesulitan saat menggunakan peralatan komputer, menjaga iklim kelas agar selalu kondusif, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Penilaian belum dilakukan secara utuh sesuai dengan prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, dan akuntabel.

Kendala pada aspek penilaian juga dialami oleh satuan pendidikan. Beberapa satuan kesulitan dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), merumuskan kriteria kenaikan kelas, dan

kriteria kelulusan peserta didik. Permasalahan lain yang sering muncul adalah penetapan KKM, penentuan predikat dan deskripsi pada setiap Kompetensi Dasar (KD) sebagai kompetensi minimal untuk selanjutnya menjadi KKM mata pelajaran atau KKM satuan pendidikan. Satuan pendidikan juga mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan nilai hasil remedial.

Solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kurikulum adalah dengan mengikuti sosialisasi terkait dengan penerapan kurikulum 2013. Selain itu guru juga menghadiri berbagai seminar, pelatihan, dan kegiatan MGMP yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru. Di negara maju peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan peningkatan standar pendidikan dan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah (Robinson, 2011 dalam Manik Nur & Mukhamad Murdiono: 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, implementasi kurikulum 2013 tingkat SMA di Kota

Gorontalo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) aspek perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) memiliki nilai kesenjangan/diskrepansi “sempit” dengan kriteria sudah “efektif”; (2) aspek pelaksanaan proses pembelajaran memiliki nilai kesenjangan/diskrepansi “sempit” dengan kriteria sudah ”efektif”; (3) aspek penilaian hasil belajar memiliki nilai kesenjangan/diskrepansi “cukup lebar” dengan kriteria “cukup efektif”; (4) aspek pengawasan pembelajaran memiliki nilai kesenjangan/diskrepansi “sempit” dengan kriteria sudah “efektif”.

Hambatan implementasi kurikulum 2013 pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yakni kesulitan guru dalam merancang pembelajaran dan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran yang berorientasi pendekatan saintifik. Pada aspek penilaian hambatan yang ditemui oleh sebagian besar guru yakni pada penyusunan instrumen penilaian berupa soal-soal untuk mengukur ketrampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dan pelaporan hasil penilaian serta pemanfaatan hasil penilaian dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya.

Berdasarkan hasil tersebut, maka disarankan hal-hal berikut : (1) perlunya dilakukan peningkatan kompetensi guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar melalui diklat, bimbingan teknis dan pendampingan yang intensif baik oleh guru senior, kepala sekolah maupun pengawas sekolah dengan memanfaatkan wadah Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) yang ada; (2) perlunya dilakukan pelatihan secara khusus dan intensif, terkait dengan dengan penyusunan instrumen penilaian dalam hal ini berupa soal-soal HOTS; (3) pengawasan pembelajaran oleh kepala sekolah dan pengawas pembina mata pelajaran dalam bentuk supervisi klinis perlu lebih diintensifkan guna memonitoring dan mengevaluasi praktik mengajar guru demi terselenggaranya pengembangan profesionalitas guru secara berkelanjutan serta pelaksanaan kurikulum secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Fathurrahman, Sumardi, Adi E. Yusuf, Sutji Harijanto, (2017) *Peningkatan Efektifitas Pembelajaran Melalui Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Teamwork*. Jurnal Manajemen Pendidikan Vol.7, No.2, Juli 2019

- Budiyanto, M.A.K; L. Waluyo & A. Moktar. 2016. "Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar di Malang". Proceeding Biology Education Conference. Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016.
- Dantes,N. 2007. *Tinjauan Teoretik dan Pengembangan Alat Penilaian Kemampuan Calon Guru (APKCG)*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pengembangan APKCG bagi Mahasiswa PPL-Real Undiksha Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja 24 Maret 2007.
- , 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.2012
- Dinni Husna Nur, (2018). *HOTS (High Order Thinking Skills) Dan Kaitannya Dengan Kemampuan Literasi Matematika*. Makalah Prosiding Seminar Nasional Matematika Tahun 2018.
- Iru, La dan Arihi, La Ode Safiun. 2012. *Pendekatan, Metode, Strategi, dan Model-Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Presindo.
- Kemendikbud. (2013). *Modul Pelatihan Kurikulum 2013*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Kemendikbud. (2016). *Panduan Penilaian Oleh Pendidikan Satuan Pendidikan Untuk Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Majid, A. (2008). *Perencanaan pembelajaran mengembangkan standar kompetensi guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muth'im, A. (2014). *Understanding and Responding to The Change of Curriculum in The Context of Indonesian Education*. American Journal of Educational Research, 2(11), 1094–1099. <https://doi.org/10.12691/education-2- 1-15>.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (2016).
- Norris, Nigel. 1998 *Curriculum Evaluation Revisited*. Cambridge Journal of Education, 28(2):207-183. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/101080/0305764980280206>
- Nur, Manik Hak, Murdiono Mukhamad. (2019). *Problematika Guru Dalam Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran PPKn*. Jurnal Civics: Media

- Kajian Kewarganegaraan Vol. 16 No. 2 Tahun 2019
- Provus, M. (1969). *The Discrepancy Evaluation ModelAn Approach to Local Program Improvement and Development.* Pennsylvania: Pittsburg Public School. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED030957.pdf>
- Putu Eka Andriyani, A.A.I.N Marhaeni, Ni Made Sri Mertasari (2017). *Analisis Diskrepansi Tentang Implementasi Pendekatan Saintifik Pada Kelas IV SD Negeri di Kecamatan Denpasar Barat.* Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017.
- Rahmawati, A., Tairas, M.M.W., & Nawangsari, N.A.F. (2018). *Children's School Readiness: Teachers' and Parents' Perceptions.* International Journal of Pedagogy and Teacher Education, 2(1), 9–20.
- Suharsimi, A. & C.S.A. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara
- Saputra, Hatta. 2016. Pengembangan Mutu Pendidikan Menuju Era Global: Penguatan Mutu Pembelajaran dengan Penerapan HOTS (High Order Thinking Skills). Bandung: SMILE's Publishing.
- Yazidi, Ahmad (2017). Memahami Model Model Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013 (The Understanding Of Model Of Teaching In Curriculum 2013). (<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/qathruna/article/view/251/250>)

CAPAIAN MUTU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN JENJANG SD DI KABUPATEN BULUKUMBA PROPINSI SULAWESI SELATAN

Ainun Farida

Widyaiswara LPMP Sulawesi Selatan

Abstrak: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Kabupaten Bulukumba adalah salah satu pemerintah daerah di Propinsi Sulawesi Selatan yang sangat concern terhadap mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana capaian mutu standar nasional pendidikan dan bagaimana rekomendasi peningkatan mutu untuk jenjang SD di Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran capaian mutu standar nasional pendidikan dan rekomendasi peningkatan mutu untuk jenjang SD di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menyajikan capaian mutu terhadap indikator yang terdapat dalam standar nasional pendidikan. Hasil penelitian ini adalah adanya gambaran capaian mutu standar nasional pendidikan jenjang SD di Kabupaten Bulukumba per standar dan indikator. Di samping itu juga dapat ditentukan rekomendasi dalam rangka peningkatan mutu untuk jenjang SD di Kabupaten Bulukumba dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan atau melampaui SNP.

Kata Kunci: capaian mutu SD, standar nasional pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Di lain pihak dengan diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah yang ada menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis di Indonesia yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman layanan proses, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya. Oleh karena itu, standarisasi mutu nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, karena semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan

dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (*quality control*). Pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengendalian mutu dalam bentuk jaminan atau assurance, agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan *Quality Assurance* atau penjaminan mutu (Sani, Pramuniati, Muchtiani: 2015).

Penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Dalam Permendikbud No. 28 Tahun 2016 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi

Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*).

Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan pemetaan mutu pendidikan. Pemetaan ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Data untuk pemetaan mutu pendidikan diambil dari aplikasi Dapodik dan pengumpulan data Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Dapodik memuat data pencapaian indikator SNP pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Sarana Prasarana, dan Pembiayaan. Sedangkan aplikasi PMP memuat indikator SNP untuk 5 standar lainnya yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan. Kedua aplikasi ini diisi oleh setiap satuan pendidikan dengan sejumlah responden yang telah ditentukan, kemudian disinkronisasi/dikirimkan ke server pusat pendataan untuk diolah dan dipetakan. Hasil pemetaan ini selanjutnya dijadikan

acuan dalam rangka penyusunan rencana pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan, informasi atas keterlaksanaan dan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu pemerintah daerah di Propinsi Sulawesi Selatan yang sangat *concern* terhadap mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana capaian mutu standar nasional pendidikan untuk jenjang SD di Kabupaten Bulukumba. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui gambaran capaian mutu standar nasional pendidikan untuk jenjang SD di Kabupaten Bulukumba dan bagaimana membuat rekomendasi bagi peningkatan mutu dalam rangka mencapai atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

METODE

Data penelitian ini adalah data sekunder yang diambil pada Bidang Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Sulawesi Selatan tahun 2019. Data tersebut adalah data hasil pemetaan mutu tahun 2018 yang hasilnya dipublikasikan pada tahun 2019. Data sekunder ini adalah data hasil sensus capaian mutu yang dilakukan terhadap semua sekolah yang ada di Kabupaten Bulukumba untuk jenjang SD. Pengisian instrumen dilakukan oleh semua responden yang ditentukan pada satuan pendidikan yang selanjutnya data dikirim ke pusat data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kategori capaian mutu ditentukan sebagai berikut:

Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
Menuju SNP 1	0	2.04
Menuju SNP 2	2.05	3.7
Menuju SNP 3	3.71	5.06
Menuju SNP 4	5.07	6.66
SNP	6.67	7

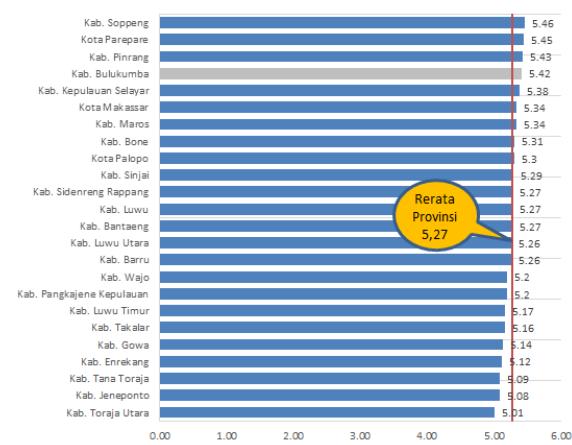
Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif tentang capaian mutu pendidikan jenjang SD. Analisis dilakukan terhadap capaian standar, indikator dan sub indikator pada standar nasional pendidikan yang selanjutnya dihasilkan rekomendasi peningkatan mutu sehingga harapannya satuan pendidikan pada jenjang SD di Kabupaten Bulukumba

dapat mencapai atau melampaui standar nasional pendidikan.

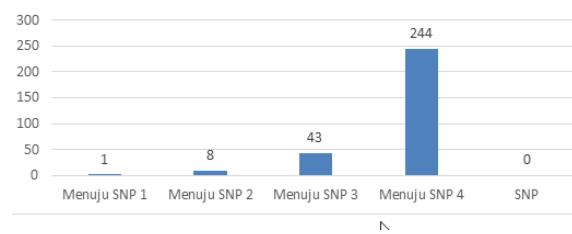
HASIL PENELITIAN

Hasil capaian mutu pendidikan berdasarkan acuan standar nasional pendidikan pada Jenjang SD di Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

Capaian 8 SNP Kab/Kota Prov. Sulawesi Selatan Jenjang SD

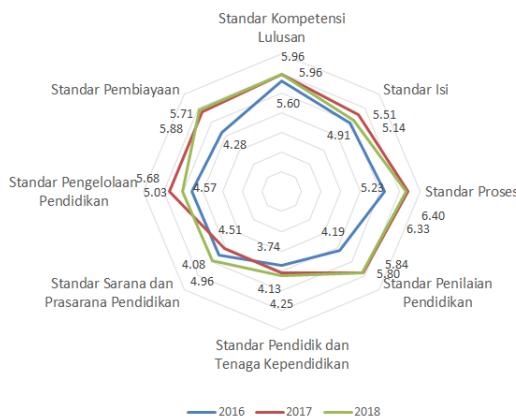


capaian pemenuhan 8 SNP jenjang SD Kab. Bulukumba berada pada angka 5.42 yaitu Menuju SNP 4 yang berada di atas rerata provinsi (5.27)



Berdasarkan data capaian mutu Jenjang SD Kabupaten Bulukumba terlihat bahwa jumlah satuan pendidikan jenjang SD adalah sebanyak 296. Dari jumlah tersebut terdapat 1 sekolah yang berada pada capaian "Menuju SNP 1", 8 sekolah yang berada pada capaian "Menuju SNP 2", 43

sekolah yang berada pada capaian “Menuju SNP 3”, 244 sekolah pada capaian “Menuju SNP 4” dan belum ada sekolah pada kategori “SNP”. Untuk capaian mutu per standar jenjang SD ditampilkan tiga tahun terakhir sebagai berikut:



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian SNP jenjang SD pada Kab. Bulukumba pada tahun 2018 untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Standar Pembiayaan secara rata-rata mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2017). Standar Kompetensi Lulusan tidak mengalami perubahan sedangkan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan dan Standar Pengelolaan Pendidikan mengalami penurunan pencapaian.

Capaian mutu setiap indikator pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang SD di Kabupaten Bulukumba disajikan sebagai berikut

1) Capaian Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), terdapat tiga indikator yaitu

1.1. lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap,

1.2. lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan dan

1.3 lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.96	Menuju SNP 4
1.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.75	SNP
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bermimpi dan bertakwa kepada Tuhan YME	6.72	SNP
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6.77	SNP
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.77	SNP
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.78	SNP
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6.73	SNP
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.76	SNP
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6.67	SNP
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.77	SNP
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6.69	SNP
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6.8	SNP
1.2	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.1	Menuju SNP 3
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	4.1	Menuju SNP 3
1.3	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.11	Menuju SNP 4
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	5.71	Menuju SNP 4
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5.54	Menuju SNP 4
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6.24	Menuju SNP 4
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.3	Menuju SNP 4
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.62	Menuju SNP 4
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6.23	Menuju SNP 4

Capaian mutu per indikator Standar Kompetensi Lulusan menunjukkan bahwa hanya indikator 1.1 yang masih berada pada kategori “SNP”. Indikator 1.2 sudah berada pada kategori “ menuju SNP 3 ” dan indikator 1.3 berada pada kategori “Menuju SNP 4 ”.

2) Capaian Mutu Standar Isi

Pada Standar Isi, terdapat tiga indikator yaitu

2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan

2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur

2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
2	Standar Isi	5.57	Menuju SNP
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.46	Menuju SNP
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5.08	Menuju SNP
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	5.64	Menuju SNP
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5.12	Menuju SNP
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	5.7	Menuju SNP
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	5.75	Menuju SNP
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.6	Menuju SNP
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	4.97	Menuju SNP
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6.8	SNP
2.2.3.	Meleverage tahapan operasional pengembangan	4.55	Menuju SNP
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6.08	Menuju SNP
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.64	Menuju SNP
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	7.05	SNP
2.3.2.	Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi	2.47	Menuju SNP
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	6.45	Menuju SNP
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6.59	Menuju SNP

Capaian mutu pada Standar Isi menunjukkan bahwa semua indikator sudah berada pada kategori “Menuju SNP 4”. Namun pada indikator 2.3 terdapat sub-indikator, *Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi* (2.3.2), yang hanya berada pada kategori “Menuju SNP 2”.

3) Capaian Mutu Standar Proses

Pada Standar Proses, terdapat tiga indikator yaitu

- 3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan
- 3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat

3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
3	Standar Proses	6.34	Menuju SNP 4
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.47	Menuju SNP 4
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6.58	Menuju SNP 4
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.75	SNP
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6.12	Menuju SNP 4
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.45	Menuju SNP 4
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.53	Menuju SNP 4
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.88	SNP
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6.67	SNP
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6.56	Menuju SNP 4
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6.56	Menuju SNP 4
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.67	SNP
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.66	Menuju SNP 4
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6.53	Menuju SNP 4
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6.52	Menuju SNP 4
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.72	SNP
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6.69	SNP
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa	6.72	SNP
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	5.9	Menuju SNP 4
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	5.39	Menuju SNP 4
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6.18	Menuju SNP 4
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6.74	SNP

3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.01	Menuju SNP 4
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5.71	Menuju SNP 4
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6.21	Menuju SNP 4
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6.31	Menuju SNP 4
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	5.57	Menuju SNP 4
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	5.92	Menuju SNP 4
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6.35	Menuju SNP 4

Capaian mutu Standar Proses menunjukkan bahwa semua indikator sudah berada pada kategori “Menuju SNP 4”. Beberapa sub-indikator pada indikator 3.1 dan 3.2 sudah berada pada kategori ‘SNP’, yaitu:

- 3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi.
- 3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan.

3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran

3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat

3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.

3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. 3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran.

4) Capaian Mutu Standar Penilaian
Standar penilaian terdiri atas 5 sub indikator yang terdiri atas:

- 4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi
- 4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel
- 4.3. Penilaian pendidikan ditindak lanjuti
- 4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek
- 4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.81	Menuju SNP 4
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.38	Menuju SNP 4
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6.53	Menuju SNP 4
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6.23	Menuju SNP 3

4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.6	Menuju SNP 4
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	5.86	Menuju SNP 4
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	5.35	Menuju SNP 4
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.17	Menuju SNP 4
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6.5	Menuju SNP 4
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	5.83	Menuju SNP 4
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.48	Menuju SNP 4
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	5.48	Menuju SNP 4
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	5.66	Menuju SNP 4
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	5.31	Menuju SNP 4
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.41	Menuju SNP 4
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	5.92	Menuju SNP 4
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6.04	Menuju SNP 4
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	4.26	Menuju SNP 3

Capaian mutu standar penilaian menunjukkan bahwa semua indikator sudah berada pada kategori ‘Menuju SNP 4’. satu sub-indikator pada indikator 4.5 masih berada pada kategori ‘Menuju SNP 3’, yaitu:

4.5.3 Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

5) Capaian Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terdapat 5 indikator pada Standar Pendidik dan Tenaga dan Kependidikan yaitu:

- 5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
- 5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan
- 5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan
- 5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan
- 5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
5	Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	4.16	Menuju SNP 3
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.21	Menuju SNP 4
5.1.1.	Berkualifikasi minimal SI/D4	5.03	Menuju SNP 3
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	6.92	SNP
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	5.93	Menuju SNP 4
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	4.33	Menuju SNP 3
5.1.5.	Berkkompetensi pedagogik minimal baik	3.98	Menuju SNP 3
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	4.33	Menuju SNP 3
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0	Menuju SNP 1
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.73	Menuju SNP 4
5.2.1.	Berkualifikasi minimal SI/D4	4.97	Menuju SNP 3
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6.65	Menuju SNP 4
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6.93	SNP
5.2.4.	Berpangkat minimal IIIc atau setara	6.86	SNP
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	6.82	SNP
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	5.29	Menuju SNP 4
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	2.99	Menuju SNP 2
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3.26	Menuju SNP 2
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3.19	Menuju SNP 2
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2.5	Menuju SNP 2
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3.23	Menuju SNP 2
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.61	Menuju SNP 1
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0	Menuju SNP 1
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/sederajat	0	Menuju SNP 1
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat		
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	4.85	Menuju SNP 3
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	4.07	Menuju SNP 3
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	n.a	SNP
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	n.a	SNP
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	n.a	SNP
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	n.a	SNP
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.78	Menuju SNP 1
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0	Menuju SNP 1
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	0	Menuju SNP 1
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat		
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	0	Menuju SNP 1
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0	Menuju SNP 1
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0	Menuju SNP 1
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	6.97	SNP
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik		
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik		
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik		
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.68	Menuju SNP 1
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	0.23	Menuju SNP 1
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	0.16	Menuju SNP 1
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat		
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	0.21	Menuju SNP 1
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0.85	Menuju SNP 1
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	3.1	Menuju SNP 2
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik		
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik		
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik		
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik		
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik		

Capaian mutu untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan bahwa masih banyak Standar/Indikator/SubIndikator yang belum memiliki

nilai/kategori. Hal tersebut diakibatkan oleh sinkronisasi antar DAPODIK dan PMP yang belum berjalan baik.

6) Capaian Mutu Standar Sarana Prasarana

Standar Sarana Prasarana memiliki dua indikator yaitu:

6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai

6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak

6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak.

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.92	Menuju SNP 3
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.43	Menuju SNP 3
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai		
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	6.85	SNP
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6.66	Menuju SNP 4
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3.42	Menuju SNP 2
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	5.77	Menuju SNP 4
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	2.31	Menuju SNP 2
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.04	Menuju SNP 1
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	4.66	Menuju SNP 3
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	0.05	Menuju SNP 1
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2.03	Menuju SNP 1
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0	Menuju SNP 1
6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar	0	Menuju SNP 1
6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar	0	Menuju SNP 1
6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar	0	Menuju SNP 1
6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar	0	Menuju SNP 1
6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar	0	Menuju SNP 1
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	4.82	Menuju SNP 3
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	0.04	Menuju SNP 1
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0	Menuju SNP 1
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6.52	Menuju SNP 4
6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai		
6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai		
6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai	0	Menuju SNP 1
6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai	0	Menuju SNP 1
6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai	0	Menuju SNP 1

6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	1.77	Menuju SNP 1
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	0.72	Menuju SNP 1
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0.27	Menuju SNP 1
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0.31	Menuju SNP 1
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0.07	Menuju SNP 1
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3.16	Menuju SNP 2
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0.09	Menuju SNP 1
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar		
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar	0	Menuju SNP 1
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar	0	Menuju SNP 1
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	0	Menuju SNP 1
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	5.9	Menuju SNP 4
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	5.45	Menuju SNP 4
6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja		
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	0.51	Menuju SNP 1
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	1.47	Menuju SNP 1
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	1.64	Menuju SNP 1
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0.23	Menuju SNP 1
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	2.97	Menuju SNP 2
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai		
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6.47	Menuju SNP 4
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai	0	Menuju SNP 1
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai	0	Menuju SNP 1
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai	0	Menuju SNP 1

Capaian standar sarana prasarana menunjukkan bahwa dari tiga Indikator yang ada, hanya indikator 6.1 (Kapasitas daya tamping sekolah memadai) yang berada pada kategori “Menuju SNP 3”. Dua indikator lainnya (6.2 dan 6.3) masih berada pada kategori “Menuju SNP 1”.

7) Capaian Mutu Standar Pengelolaan

Pada standar pengelolaan, terdapat empat indikator yaitu:

- 7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan
- 7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan
- 7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan
- 7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.19	Menuju SNP 4
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.08	Menuju SNP 4
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6.28	Menuju SNP 4
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6.08	Menuju SNP 4
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	5.89	Menuju SNP 4
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	5.85	Menuju SNP 4
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	5.73	Menuju SNP 4
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6.32	Menuju SNP 4
7.2.3.	Meningkatkan daya guna pendidik dan tenaga kependidikan	6.01	Menuju SNP 4
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6.23	Menuju SNP 4
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	5.78	Menuju SNP 4
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	5.03	Menuju SNP 3
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	3.52	Menuju SNP 2
7.3.1.	Berkrebatian dan bersosialisasi dengan baik		
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	5.68	Menuju SNP 4
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	3.26	Menuju SNP 2
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6.5	Menuju SNP 4
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	3.19	Menuju SNP 2
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	2.5	Menuju SNP 2
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	4.21	Menuju SNP 3
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	4.21	Menuju SNP 3

Capaian standar pengelolaan menunjukkan bahwa indikator 7.1 dan 7.2 sudah berada pada kategori “Menuju SNP 4”, indikator 7.4 berada pada kategori “Menuju SNP 3” sedangkan indikator 7.3 masih berada pada capaian “Menuju SNP 2” .

8) Capaian Mutu Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan memiliki tiga indikator yaitu:

- 8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang
- 8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan
- 8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
8	Standar Pembiayaan	6	Menuju SNP 4
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	7.25	SNP
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	7.18	SNP
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	7.18	SNP
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7.37	SNP
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.76	SNP
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.76	SNP
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.01	Menuju SNP 3
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan sumber lainnya	0.44	Menuju SNP 1
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	5.66	Menuju SNP 4
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	5.94	Menuju SNP 4

Capaian standar pembiayaan menunjukkan bahwa indikator 8.1 dan 8.2 sudah berada pada kategori “SNP”, sedangkan indikator 8.3 “Menuju SNP 3”.

PEMBAHASAN

Hasil analisis data dapat diketahui bahwa hasil capaian mutu pendidikan berdasarkan acuan standar nasional pendidikan pada Jenjang SD di Kabupaten Bulukumba berada pada angka 5.31 yaitu kategori Menuju SNP 4 yang berada di atas rerata provinsi (5.20). Hasil analisis data pada capaian mutu setiap standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan dapat diketahui bahwa ada indikator dan sub indikator yang capaiannya sudah mencapai SNP dan ada juga yang masih berada dibawah SNP. Hasil capaian mutu setiap indikator dan sub indikator tersebut dibuatkan rekomendasi sehingga Pemerintah Daerah dan *stake-*

holder yang lain dapat mendukung sekolah dalam upaya meningkatkan capaian mutunya sehingga mencapai atau melampaui SNP.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Capaian pada Standar Kompetensi Lulusan hanya indikator 1.1 yang masih berada pada kategori “SNP”. Indikator 1.2 sudah berada pada kategori “menuju SNP 3” dan indikator 1.3 berada pada kategori “Menuju SNP 4”. Rekomendasi yang dapat dibuat adalah pada indikator 1.2 yaitu lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan dengan sub indikator memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif yang memiliki nilai 4,1 yang masih berada dibawah capaian SNP. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa hasil proses pembelajaran yaitu lulusan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif belum mencapai SNP. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa indikator tersebut tidak tercapai, dan ini berhubungan dengan capaian standar yang lain yang langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi capaian indikator tersebut. Faktor yang mempengaruhi secara langsung diantaranya adalah kurikulum, proses pembelajaran, guru, sarana prasarana.

Sedangkan yang tidak langsung mempengaruhi adalah pengelolaan, dan pembiayaan. Jadi Rekomendasi yang dapat dibuat untuk meningkatkan indikator tersebut adalah dengan meningkatkan capaian indikator-indikator yang mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung indikator tersebut pada standar lain yang akan dibahas selanjutnya.

2. Standar Isi

Capaian mutu pada Standar Isi semua indikator sudah berada pada kategori “Menuju SNP 4”. Namun pada indikator 2.3 terdapat sub-indikator, *Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi* (2.3.2), yang hanya berada pada kategori “Menuju SNP 2”. Maka rekomendasi yang dapat dibuat adalah diperlukan koordinasi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa satuan pendidikan mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi yang disesuaikan dengan kurikulum nasional.

3. Standar Proses

Capaian mutu pada Standar Proses semua indikator sudah berada pada kategori “Menuju SNP 4” dan beberapa sub-indikator pada indikator 3.1 dan 3.2 sudah berada pada kategori ‘SNP’.

Rekomendasi yang dapat dibuat adalah pada indikator yang capaiannya masih berada dibawah SNP yaitu Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa sekolah perlu merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yaitu mengacu pada silabus yang telah dikembangkan, menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis, serta mendapat evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas. Selanjutnya adalah melaksanakan proses pembelajaran dengan tepat yang meliputi mendorong siswa mencari tahu, mengarahkan pembelajaran pada penggunaan pendekatan ilmiah, memberikan pembelajaran yang terpadu, melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi, melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif, menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa, memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dan menggunakan aneka sumber belajar. Rekomendasi selanjutnya adalah Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa satuan pendidikan melakukan pengawasan kualitas proses pembelajaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah

yang meliputi melakukan pemantauan proses pembelajaran, supervisi proses pembelajaran kepada guru, mengevaluasi proses pembelajaran, serta menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran. Disamping itu juga perlu dipastikan dalam proses pembelajaran dilakukan penilaian otentik secara komprehensif, dan memanfaatkan hasil penilaian otentik.

4. Standar Penilaian

Capaian mutu pada standar penilaian menunjukkan bahwa semua indikator sudah berada pada kategori “Menuju SNP 4”. Satu sub-indikator pada indikator 4.5 masih berada pada kategori ‘Menuju SNP 3’, yaitu 4.5.3 Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai. Rekomendasi yang dapat dibuat adalah pemerintah dan pemangku kepentingan memastikan sekolah melakukan aspek penilaian sesuai dengan ranah kompetensi yang mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan dan memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah. Selanjutnya, sekolah perlu menggunakan teknik penilaian objektif dan akuntabel yang mencakup jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel serta memiliki perangkat teknik penilaian lengkap. Sekolah juga perlu

menindaklanjuti penilaian yaitu menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian dan melakukan pelaporan penilaian secara periodik. Selanjutnya, sekolah perlu menggunakan instrumen penilaian sesuai dengan aspek penilaian yaitu instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan dan instrumen penilaian keterampilan. Memastikan juga sekolah melaksanakan penilaian mengikuti prosedur, melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur, melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur, menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian mutu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih banyak Standar/Indikator/Sub Indikator yang belum memiliki nilai/kategori. Hal tersebut diakibatkan oleh sinkronisasi antar DAPODIK dan PMP yang belum berjalan baik. Dengan demikian untuk dapat melakukan penyusunan program peningkatan mutu, sekolah perlu melakukan analisis dengan menggunakan dokumen Evaluasi Diri Sekolah yang indikator-indikatornya sesuai dengan SNP.

6. Standar Sarana Prasarana

Capaian mutu pada Standar Sarana Prasarana dapat ditunjukkan bahwa dari tiga Indikator yang ada, hanya indikator 6.1 (Kapasitas daya tampung sekolah memadai) yang berada pada kategori “Menuju SNP 3”. Dua indikator lainnya (6.2 dan 6.3) masih berada pada kategori “Menuju SNP 1”.

Rekomendasi yang dapat dibuat untuk indikator kapasitas daya tampung sekolah adalah pemerintah dan pemangku kepentingan memastikan sekolah memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai. Selanjutnya adalah memastikan kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan, rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa, kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan, memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan. Selanjutnya rekomendasi untuk indikator sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak adalah pemerintah dan pemangku kepentingan memastikan bahwa sekolah memiliki ruang kelas sesuai standar, memiliki laboratorium IPA sesuai standar, memiliki ruang perpustakaan sesuai standar, memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar, kondisi ruang kelas layak pakai, kondisi

laboratorium IPA layak pakai, kondisi ruang perpustakaan layak pakai, kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai. Sedangkan untuk indikator Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak, rekomendasi yang dibuat adalah pemerintah dan pemangku kepentingan memastikan bahwa sekolah memiliki ruang pimpinan sesuai standar, memiliki ruang guru sesuai standar, memiliki ruang UKS sesuai standar, memiliki tempat ibadah sesuai standar, memiliki jamban sesuai standar, memiliki gudang sesuai standar, memiliki ruang sirkulasi sesuai standar, memiliki ruang tata usaha sesuai standar, memiliki ruang konseling sesuai standar, memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, menyediakan kantin yang layak, menyediakan tempat parkir yang memadai, kondisi ruang pimpinan layak pakai, kondisi ruang guru layak pakai, kondisi ruang UKS layak pakai, kondisi tempat ibadah layak pakai, kondisi jamban sesuai standar, kondisi gudang layak pakai, kondisi ruang sirkulasi layak pakai, kondisi ruang tata usaha layak pakai, kondisi ruang konseling layak pakai.

7. Standar Pengelolaan

Capaian standar pengelolaan menunjukkan bahwa pada indikator 7.1

dan 7.2 sudah berada pada kategori “Menuju SNP 4”, indikator 7.4 berada pada kategori “Menuju SNP 3” sedangkan indikator 7.3 masih berada pada capaian “Menuju SNP 2”. Rekomendasi yang dapat dibuat adalah pemerintah dan pemangku kepentingan memastikan bahwa sekolah melakukan perencanaan pengelolaan yang meliputi memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan, mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan, melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah. Sedangkan rekomendasi untuk Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan meliputi memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap, menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan, meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan kegiatan evaluasi diri, membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan, melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya untuk indikator Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, rekomendasi yang dapat dibuat adalah berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik, berjiwa kepemimpinan, mengem-

bangkan sekolah dengan baik, mengelola sumber daya dengan baik, berjiwa kewirausahaan, melakukan supervisi dengan baik. Rekomendasi selanjutnya adalah sekolah memiliki dan mengelola sistem informasi manajemen sesuai ketentuan.

8. Standar Pembiayaan

Capaian mutu pada standar pembiayaan menunjukkan bahwa pada indikator 8.1 dan 8.2 sudah berada pada kategori “SNP”, sedangkan indikator 8.3 “Menuju SNP3”. Rekomendasi yang dapat dibuat pada indikator 8.3 adalah pemerintah dan pemangku kepentingan memastikan sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik yang meliputi mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Capaian mutu jenjang SD di Kabupaten Bulukumba berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) berada pada angka 5.42 yaitu Menuju SNP 4 yang berada di atas rata-rata provinsi (5.27). Diperoleh juga gambaran capaian setiap standar dan indikator serta sub indikator. Indikator dan sub indikator yang masih berada di bawah SNP, dapat dibuatkan rekomendasi berdasarkan sub indikator yang capaiannya

masih berada di bawah standar nasional pendidikan. Berdasarkan rekomendasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam membuat program atau kebijakan yang mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutunya dalam rangka mencapai atau melampaui standar nasional pendidikan. Saran yang dapat diberikan adalah satuan pendidikan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa data yang diberikan adalah valid, dengan demikian capaian mutu yang dihasilkan dan rekomendasi yang diberikan adalah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sani, Ridwan Abdullah and Pramuniati, Isda and Mucktiyany, Anies (2015) *PENJAMINAN MUTU SEKOLAH*. Bumi Aksara, Jakarta. ISBN 978-602-217-559-9
- Tiro, M. A. (2002). *Dasar-dasar Statistika*. Edisi Revisi. Makassar State University of Makassar Press.
- Tiro, Muhammad Arif and Ilyas, Baharuddin (2002). *Statistika Terapan untuk Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Cet.1. Andira Publisher, Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboran Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

PERANAN KEGIATAN PENDAMPINGAN WIDY AISWARA DAN PENGAWAS PEMBINA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD DAN SMP DI PROVINSI GORONTALO

Suleman Haridji

Widyaiswara LPMP Gorontalo

Abstrak: Kegiatan pendampingan di satuan pendidikan adalah suatu fasilitasi yang diberikan oleh pendamping dalam hal ini widyaiswara kepada pihak sekolah dampingan dalam pelaksanaan penguatan Kurikulum 2013 kepada kepala sekolah dan para guru terutama guru kelas I, II, IV, dan V Sekolah Dasar, dan guru mata pelajaran kelas VII pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jenis dampingan dilakukan melalui tiga tahap. Hasil pendampingan selama tiga tahap menunjukkan peningkatan yang maksimal sesuai harapan terutama dalam implementasi kurikulum 2013.

Kata kunci: pendampingan, dan peningkatan mutu pendidikan.

Program pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan (PMP) merupakan terobosan Kepala LPMP Gorontalo bersama para Widya swara guna mendampingi dan mengawal sekolah dalam pelaksanaan kurikulum 2013 supaya terlaksana sesuai panduan yang ada. Setiap widya swara mendapat 12 sekolah dampingan yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di enam (6) kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Adapun persyaratan sekolah yang menjadi sasaran pendampingan adalah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2016/2017. Kegiatan pendampingan di satuan pendidikan adalah suatu fasilitasi yang diberikan oleh pendamping dalam hal ini widya swara kepada pihak sekolah

dampingan dalam pelaksanaan penguatan Kurikulum 2013 kepada kepala sekolah dan para guru terutama guru kelas I, II, IV, dan V Sekolah Dasar, dan guru mata pelajaran kelas VII SMP. Jenis dampingan yang diberikan oleh widya swara, meliputi: (a) penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan, (b) Pengelolaan pembelajaran, (c) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), (d) Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan (e) Esktrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa "pendampingan adalah petunjuk penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntutan." Pendampingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan

memangku suatu jabatan dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya. Selain itu pendampingan membantu individu untuk lebih mengenal berbagai informasi tentang dirinya sendiri.

Berdasarkan pengertian pendampingan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendampingan adalah pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritik, keberhasilan suatu kurikulum 2013 secara utuh memerlukan proses panjang, mulai dari kajian dan kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, pengembangan desain kurikulum, penyiapan dan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana prasarana, penyiapan tata kelola pelaksanaan kurikulum, pembelajaran dan sistem penilaian. Pendampingan showcase dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut:

kolegial, profesional, berkelanjutan, berdasarkan kebutuhan, dan kolektif dan menyeluruh.

Kolegial, yaitu hubungan kesejawatan antara pemberi dan penerima pendampingan. Dengan prinsip ini maka antara widyaiswara, kepala sekolah, dan para guru memiliki kedudukan setara yang satu tidak lebih tinggi dibandinkan dengan yang lainnya. Profesional, yakni hubungan yang terjadi antara pemberi dampingan dalam hal ini widyaiswara dan penerima dampingan kepala sekolah dan guru adalah peningkatan kemampuan profesional dan bukan atas dasar hubungan personal. Berkelanjutan, yakni hubungan profesional yang terjadi antara pemberi dan penerima pendampingan berkelanjutan setelah pemberi pendampingan secara fisik sudah tidak lagi berada di lapangan, dilanjutkan melalui email, sms, atau alat lain yang tersedia. Berdasarkan kebutuhan, yaitu materi pendampingan adalah materi teridentifikasi sebagai aspek yang masih memerlukan penguatan dan kegiatan penguatan akan memantapkan pengetahuan dan keterampilan penerima pendampingan. Kolektif dan menyeluruh, yaitu pendampingan yang melibatkan semua unsur yang meliputi pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru.

METODE DAN MEKANISME PENDAMPINGAN

Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui metode kunjungan widyaiswara di dampingi pengawas pembina ke sekolah sasaran selama 3 (tiga) kali setiap sekolah dengan tenggang waktu selama kurang lebih 3 bulan. Mekanisme pendampingan kurikulum 2013 oleh widyaiswara adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan;
2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi :
 - a. Administrasi PBM
 - b. Telaah RPP
 - c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran
3. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK),
4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS),
5. Esktrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan

C. Pelaksanaan Pendampingan

Pendampingan peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan di 12 sekolah se Provinsi Gorontalo dan setiap sekolah mendapat kesempatan kunjungan pendampingan selama 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun pelaksanaan

pendampingan widyaiswara ke sekolah sasaran sebagai berikut:

1. SDN 3 Tapa Kabupaten Bone Bolango:
Pendampingan tahap 1 tanggal 22 Februari 2019, tahap 2 tanggal 8 April 2019, dan tahap 3 tanggal 27 Juli 2019.
2. SDN 11 Telaga Biru Kabupaten Gorontalo:
Pendampingan tahap 1 tanggal 23 Februari 2019, tahap 2 tanggal 3 Mei 2019
Dan taha 3 tanggal 28 Juli 2019.
3. SMPN 1 Suwawa Kabupaten Bone Bolango:
Pendampingan tahap 1 tanggal 24 Februari 2019, tahap 2 tanggal 15 April 2019, dan tahap 3 tanggal 29 Juli 2019.
4. SD Muh. 4 Limboto Kabupaten Gorontalo:
Pendampingan tahap 1 tanggal 28 Februari 2019, tahap 2 tanggal 5 Mei 2019, dan tahap 3 tanggal 29 Agustus 2019.
5. SMP Muh. 1 Gorontalo Kota Gorontalo:
Pendampingan tahap 1 tanggal 1 Maret 2019, tahap 2 tanggal 5 April

- 2019 , dan tahap 3 tanggal 1 Agustus 2019.
6. SMPN 1 Bongomeme Kabupaten Gorontalo:
Pendampingan tahap 1 tanggal 2 Maret 2019, tahap 2 tanggal 7 April 2019, dan tahap 3 tanggal 25 Agustus 2019.
7. SDN 3 Limboto Kabupaten Gorontalo:
Pendampingan tahap 1 tanggal 3 Maret 2019, tahap 2 tanggal 4 Mei 2019, dan tahap 3 tanggal 31 Juli 2019.
8. SMPN 3 Limboto Barat Kabupaten Gorontalo:
Pendampingan tahap 1 tanggal 6 Maret 2019, tahap 2 tanggal 4 April 2019, dan tahap 3 tanggal 22 Agustus 2019.
9. SMPN 2 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara:
Pendampingan tahap 1 tanggal 13 Maret 2019, tahap 2 tanggal 11 April 2019, dan tahap 3 tanggal 3 Agustus 2019.
10. SMPN 1 Boliyohuto Kabupaten Gorontalo:
Pendampingan tahap 1 tanggal 14 Maret 2019, tahap 2 tanggal 6 April 2019, dan tahap 3 tanggal 2 Agustus 2019.
11. SDN 06 Mananggu Kabupaten Boalemo:
Pendampingan tahap 1 tanggal 15 Maret 2019, tahap 2 tanggal 13 April 2019, dan tahap 3 tanggal 4 Agustus 2019.
12. SDN 06 Duhiadaa Kabupaten Pohuwato:
Pendampingan tahap 1 tanggal 16 Maret 2019, tahap 2 tanggal 12 April 2019, dan tahap 3 tanggal 5 Agustus 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

No.	Nama sekolah	Jenis Dampingan	Pendampingan Tahap			Ket.
			1	2	3	
1.	SDN 3 Tapa	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	62	78	87	
		2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi : a. Administrasi PBM	67	76	89	
		b. Telaah RPP	66	79	90	

	c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	64	75	88
	3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	69	77	93
	4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	68	79	95
	5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	66	78	90
2. SDN 11 Telaga Biru	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	69	79	91
	2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi :	66	80	92
	a. Administrasi PBM			
	b. Telaah RPP	70	78	87
	c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	68	79	89
	3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	67	79	90
	4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	71	79	93
	5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	65	80	93
3. SMPN 1 Suwawa	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	68	78	87
	2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi :	69	76	89
	a. Administrasi PBM			
	b. Telaah RPP	69	79	90
	c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	63	75	89
	3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	66	72	93
	4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	70	82	95
	5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	71	81	92
4. SD Muh. 4 Limboto	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	65	80	89
	2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi :	67	76	89
	a. Administrasi PBM			
	b. Telaah RPP	70	81	90
	c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	65	75	89
	3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	69	81	92
	4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	70	79	95
	5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	69	85	96
5. SMP Muh. 1 Gorontalo	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	67	80	88
	2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi :	68	78	89
	a. Administrasi PBM			

	b. Telaah RPP	71	82	92
	c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	64	75	90
	3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	67	77	93
	4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	68	80	92
	5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	70	78	89
6. SMPN 1 Bongomeme	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	64	79	89
	2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi :	67	81	89
	a. Administrasi PBM			
	b. Telaah RPP	70	79	91
	c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	63	75	91
	3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	69	78	91
	4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	70	83	94
	5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	79	81	96
7. SDN 3 Limboto	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	67	76	93
	2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi :	71	79	95
	a. Administrasi PBM			
	b. Telaah RPP	66	71	83
	c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	70	75	89
	3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	67	76	93
	4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	68	79	91
	5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	67	71	89
8. SMPN 3 Limboto Barat	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	68	81	91
	2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi :	67	77	89
	a. Administrasi PBM			
	b. Telaah RPP	69	79	90
	c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	71	75	90
	3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	69	84	93
	4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	70	82	95
	5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	71	82	97
9. SMPN 2 Kwandang	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	69	83	93

		2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi			
		:	69	75	89
		a. Administrasi PBM			
		b. Telaah RPP	72	79	90
		c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	64	75	89
		3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	67	85	96
		4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	75	89	97
		5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	78	83	93
10.	SMPN 1 Boliyohuto	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	70	82	90
		2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi			
		:	67	77	90
		a. Administrasi PBM			
		b. Telaah RPP	69	79	91
		c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	63	78	91
		3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	73	77	93
		4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	70	83	95
		5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	76	89	97
11.	SDN 06 Mananggu	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	66	79	88
		2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi			
		:	70	79	90
		a. Administrasi PBM			
		b. Telaah RPP	66	80	92
		c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	64	75	89
		3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	67	78	92
		4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	68	79	93
		5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	70	76	88
12.	SDN 06 Duhidaaa	1. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 SNP	68	80	87
		2. Pengelolaan pembelajaran, meliputi			
		:	68	79	92
		a. Administrasi PBM			
		b. Telaah RPP	69	79	90
		c. Penilaian pelaksanaan pembelajaran	71	76	90
		3. Penguatan pendidikan Karakter (PPK)	69	76	91
		4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)	70	79	91
		5. Ekstrakurikuler Wajib pendidikan kepramukaan	71	85	92

2. Pembahasan

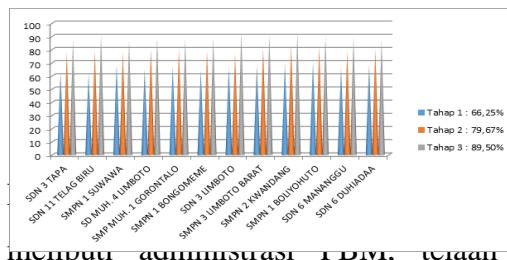
- a. Penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan untuk 12 (dua belas) sekolah awalnya masih standar, namun setelah didampingi oleh widyaiswara selama 3 kali pertemuan dan berhasil mengalami peningkatan. Upaya yang dilakukan oleh widyaiswara dalam menggenjot nilai yang dianggap masih di bawah dengan cara megisi instrumen yang berisi delapan 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Pendamping bersama kepala sekolah dan guru penanggung jawab duduk bersama-sama merencanakan bagaimana caranya memenuhi item-item tertentu. Antaranya: 1) Rasio buku teks pelajaran untuk siswa adalah 1:1 per tema/mapel. Kenyataannya masih sebagian besar sekolah belum memenuhinya. Sebagian sekolah sudah menyediakan dana untuk pengadaan buku dimaksud dan sudah memesannya, namun sampai menjelang akhir semester buku tersebut tidak kunjung tiba di sekolah. Hal ini sudah dapat dipastikan akan mempengaruhi lancarnya proses pembelajaran. Pendamping bersama kepala sekolah sudah mencoba

menghubungi agen buku agar bukunya lebih dipercepat waktunya untuk diantar ke sekolah mengingat ulangan akhir semester sudah dekat. Hasilnya ada sebagian sudah diantar minggu depannya dan sebagian masih tetap belum ada. Solusi lain yang disarankan ke guru kelas atau mapel agar meminjam satu atau dua buah buku dari sekolah lain kemudian memfotocopinya dan menjadi materi dalam pembelajaran. 2) Sebagian guru di sekolah tertentu belum berijazah S1. Kami himbau agar guru tersebut bisa melanjutkan kuliah sampai mencapai sarjana, bila guru yang bersangkutan kurang dana penunjang untuk menyelesaikan kuliah boleh diusulkan ke pemerintah guna mendapatkan beasiswa. Kalau sudah jadi sarjana guru yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan minimal sarjana sesuai Undang-undang Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula bila sudah sarjana dapat diusulkan untuk mendapat tunjangan profesi guru atau sertifikasi. 3) Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan berupa kurangnya ruang kelas, sehingga ruang perpustakaan, laboratorium sudah

dialihfungsikan menjadi ruang kelas.
4) Kurangnya tenaga guru di sekolah tertentu. Guna mengatasi masalah ini terpaksa kepala sekolah mengangkat sendiri guru honor yang berakibat pada penggunaan dana yang ada di sekolah. 5) Kurangnya prekuensi kepala sekolah melaksanakan supervisi baik administrasi maupun akademik. 6) Kepala sekolah kurang mampu membagi atau mendistribusi pekerjaan pada bawahannya dalam memenuhi delapan standar nasional pendidikan serta kurang kontrol terhadap tugas yang telah diberikan. Demikian siklus yang kami lakukan dari tahap I pengambilan data awal dan langsung pendampingan, selanjutnya pada tahap II dilihat lagi apa ada progresnya, dan tahap III dilihat lagi sampai sejauh mana peningkatan yang dialami oleh sekolah tersebut sebagai akibat dari pendampingan widyaiswara dari LPMP.

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan melalui tabel berikut.

b.



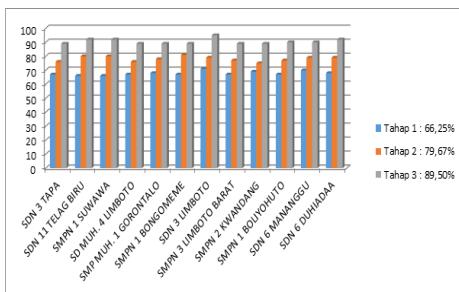
RPP dan penilaian pelaksanaan pembelajaran (observasi).

1) Administrasi Pembelajaran

Sebagian besar guru sudah memenuhi administrasi pembelajaran, namun masih terdapat sebagian kecil guru yang belum memenuhinya. Kami wawancara mengapa sampai tidak terpenuhi adiministrasi PBM, jawaban guru bervariasi. Ada yang mengatakan masih sementara dipersiapkan, ada pula yang beralasan masih di laptop, masih dipinjam teman guru dari sekolah lain, dan sebagainya. Pada saat pembimbingan, pendamping menjelaskan satu persatu hal-hal yang perlu disiapkan guru dan bagaimana cara membuatnya. Pada pertemuan kedua nanti sudah dipesan pada guru yang bersangkutan akan dilihat lagi apa sudah ada atau belum. Pada prinsipnya widyaiswara sebagai pendamping tidak pernah putus-putusnya mendampingi guru atau sekolah sasaran hingga mencapai hasil yang maksimal.

Pada tahap 1 rekapan nilai guru baru mencapai rata-rata 68,28%,

tahap 2 rata-rata 77.61%, dan tahap 3 sudah mencapai 89.5%. Melihat hasil perolehan nilai rata-rata untuk penilaian atau observasi pembelajaran sudah mengalami peningkatan dari tahap 1 hingga tahap 3. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada grafik berikut ini.

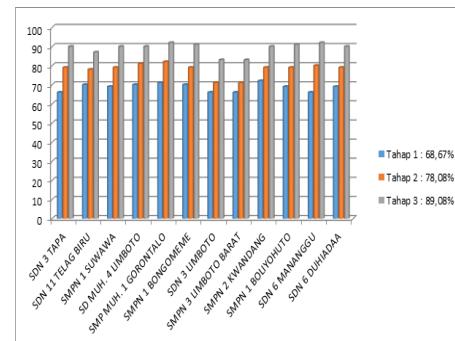


2) Telaah RPP

Setelah pendamping menelaah RPP milik guru, dapat dikatakan bahwa terdapat sebagian guru masih belum mampu menyusun sendiri RPP padahal yang bersangkutan sudah mengikuti bimbingan teknis implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan di induk klaster. Dengan keterbatasan kompetensi guru dalam menyusun RPP sehingga terjadilah copypaste RPP milik guru lain. Dengan demikian kami berusaha menjelaskan kembali kepada guru bagaimana proses penyusunan RPP sesuai

ketentuan termasuk penyesuaian permen terbaru. Setelah itu guru-guru berlatih menyusun sendiri RPP sesuai dengan tema atau mata pelajaran yang diampu.

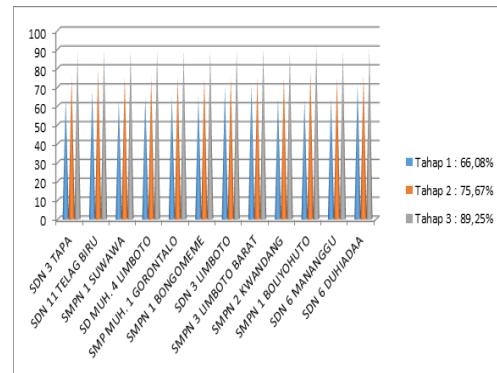
Pada tahap 1 rekapan nilai guru baru mencapai rata-rata 67.75%, tahap 2 rata-rata 78.08%, dan tahap 3 sudah mencapai 90.42%. Melihat hasil perolehan nilai rata-rata untuk telaah dan penyusunan RPP mengalami peningkatan dari tahap 1 hingga tahap 3. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada grafik berikut ini.



3) Kegiatan pengamatan proses pembelajaran.

Setelah pendamping melakukan penilaian atau observasi pembelajaran, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, antaranya sebagian besar guru pada saat pendahuluan tidak menyampaikan manfaat pembe-

lajaran, rencana kegiatan, dan teknik penilaian yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. Aspek lainnya guru tidak memperhatikan penggunaan papan tulis, cara membimbing guru yang masih kurang, pembelajaran yang masih kurang mengaitkan dengan kehidupan siswa sehari-hari atau belum kontekstual, pendekatan saintifik belum terlalu tampak dalam proses pembelajaran. Demikian pula guru kelihatannya belum kreatif dan inovasi dalam mengelola pembelajaran. Masih terdapat pula sebagian guru yang lupa melaksanakan post tes diakhir pembelajaran sehingga tidak diketahui daya serap capaian peserta didik. Pendamping sudah mengarahkan kepada guru yang bersangkutan bagaimana caranya menyusun tes yang mudah diperiksa dan diketahui hasilnya pada akhir pembelajaran. Adapun hasil pengamatan/observasi pembelajaran tahap 1 mencapai rata-rata nilai 66,08%, tahap 2 rata-rata 75,67%, dan tahap 3 rata-rata 89,25%. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

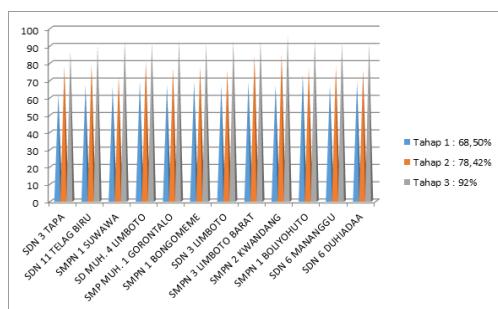


4) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Jenis kegiatan ini terdiri dari PPK berbasis kelas, PPK berbasis budaya sekolah, dan PPK berbasis masyarakat, umumnya sudah memperoleh hasil yang baik. PPK berbasis kelas sebagian besar sudah tertuang dalam RPP dan tampak pada proses pembelajaran. PPK berbasis budaya sekolah di hampir semua sekolah penumbuhan budi pekerti di kalangan peserta didik sudah berjalan baik mulai dari penyambutan anak dari pintu masuk sampai ke dalam kelas dan budaya cium tangan guru pada saat salaman. Demikian pula dalam aktivitas siswa selama di sekolah sudah tampak penerapan karakter dalam pergaulan mereka, baik saling menghormati, tanggung jawab, disiplin, toleransi beragama, sopan santun, dan lain sebagainya. PPK berbasis masyarakat juga sudah mulai tumbuh, misalnya kepedulian

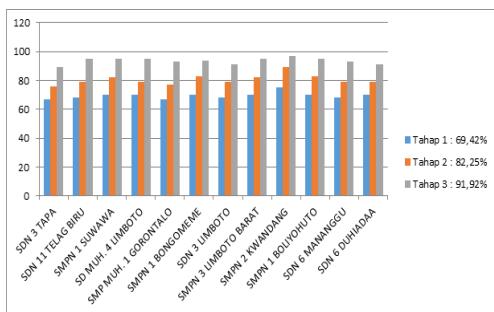
masyarakat, orang tua dalam pembinaan karakter anak. Tidak jarang sekolah bekerja sama dengan pihak lain dalam pembinaan karakter para peserta didiknya, misalnya dengan kepolisian dalam hal sosialisasi akibat penyalahgunaan narkoba, disiplin berlalu lintas, polisi cilik, dll. Bekerja sama dengan pihak Puskesmas dalam hal penyuluhan hidup sehat, disiplin dalam menjaga dan memelihara kesehatan. Pihak kementerian agama dalam hal latihan ceramah agama, taman pengajian Al-Quran, dll. dan masih banyak lagi pihak lain yang diajak terlibat dalam pembinaan karakter peserta didik. Dari 12 sekolah yang menjadi sasaran dapat diuraikan perolehan rata-rata nilai tahap 1 rata-rata nilai 68,50%, tahap 2 rata-rata nilai 74,42%, dan tahap 3 rata-rata nilai 92%. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

5) Gerakan Literasi Sekolah (GLS).



Gerakan Literasi Sekolah (GLS) umumnya sudah berjalan baik. Kegiatan ini meliputi 3 tahap, yakni tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Umumnya sekolah sasaran yang menjadi dampingan sudah melaksanakan ketiga tahap tersebut. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pembiasaan membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai sudah dilaksanakan namun peserta didik sebagian besar belum membuat jurnal hasil bacaannya. Sebagian guru pada saat kegiatan literasi 15 menit, sedianya harus bersama-sama membaca bersama siswa, tapi kenyataannya masih ada beberapa guru yang tidak melaksanakannya. Awalnya sekolah sasaran belum menata sudut baca, tapi setelah dua kali pendampingan hampir semua sekolah sudah mempunyai sudut baca yang tertata dengan baik. Demikian pula poster-poster yang mendukung kegiatan literasi sekolah sama sekali, setelah didampingi sudah mengalami peningkatan sesuai harapan. Tidak jarang sekolah mengadakan lomba sudut baca pada

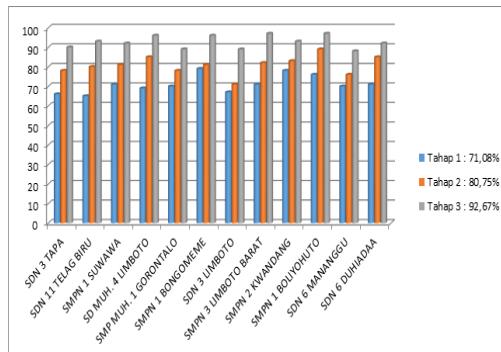
akhir semester, hal ini mendorong setiap sekolah atau kelas berlomba-lomba mengadakan pembenahan sehingga lebih menambah daya tarik kelas lebih terkesan indah dan menarik. Disarankan pula sekolah mengadakan pemilihan siswa yang paling banyak prekuensinya berkunjung ke perpustakaan sekolah. Dari 12 sekolah yang menjadi sasaran dapat diuraikan perolehan rata-rata nilai tahap 1 rata-rata nilai 69,41%, tahap 2 rata-rata nilai 82,25%, dan tahap 3 rata-rata nilai 91,92%. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



- 6) Kegiatan ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan pada Kurikulum 2013 awalnya belum terlaksana sesuai panduan karena hanya 1 model yang terlaksana yakni model reguler sedangkan untuk 2 model lainnya yakni model blok dan aktualisasi belum pernah dilaksanakan. Namun diakhir kegiatan

dilaksanakan workshop penyusunan program ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang diikuti oleh seluruh guru dan kepala sekolah, bahkan sempat dilaksanakan praktik langsung oleh para guru kepada peserta didik.

Dari 12 sekolah yang menjadi sasaran dapat diuraikan perolehan rata-rata nilai tahap 1 rata-rata nilai 71,08%, tahap 2 rata-rata nilai 80,75%, dan tahap 3 rata-rata nilai 92,67%. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



SIMPULAN

1. Kegiatan pendampingan di satuan pendidikan adalah suatu fasilitasi yang diberikan oleh pendamping dalam hal ini widyaiswara kepada pihak sekolah dampingan dalam pelaksanaan penguatan Kurikulum 2013 kepada kepala sekolah dan para guru terutama guru kelas I, II, IV, dan V Sekolah

- Dasar, dan guru mata pelajaran kelas VII SMP.
2. Jenis dampingan yang diberikan oleh widyaiswara adalah meliputi : a) penjaminan mutu pendidikan meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan, b) Pengelolaan pembelajaran, c) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), d) Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan e) Esktrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan.
 3. Pendampingan peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan di 12 sekolah se Provinsi Gorontalo dan setiap sekolah mendapat kesempatan kunjungan pendampingan selama 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan.
 4. Setelah diadakan pendampingan selama 3 kali atau tahap oleh widyaiswara dan pengawas pembina, ternyata membawa hasil yang maksimal sesuai harapan dan menurut kepala sekolah serta para guru merasa terbantu sekali dalam implementasi kurikulum 2013 ini.
 5. Kegiatan pendampingan disimpulkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum 2013 yang meliputi pengelolaan pembelajaran (telaah RPP, penyusunan RPP, dan sistem penilaian), gerakan literasi sekolah, dan kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib.
- ### Daftar Pustaka
- Hamalik, Oemar, 2001. Pendidikan dan Kebudayaan. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Bumi Aksara.
- Moh.User Usman, Lilies Setiawan. 2001. *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)*.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 65 Tahun 2016 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2014 Tentang *Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- Nomor 22 tahun 2016 Tentang Sri Lestari, dkk. 2015. *Supervisi Akademik Standar Proses.* *Kolaborasi untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Produktif Sekolah Menengah Kejuruan. Educational Management.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 Tentang *Standar Penilaian.* Tabrani, Atang, Zaina.1989. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nomor 22 tahun 2016 Tentang Sri Lestari, dkk. 2015. *Supervisi Akademik Standar Proses.* *Kolaborasi untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Produktif Sekolah Menengah Kejuruan. Educational Management.*
- Nomor 23 tahun 2016 Tentang *Standar Penilaian.* Tabrani, Atang, Zaina.1989. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional.*
- Sutikno, M.S. 2013. Belajar dan Pembelajaran: *Upaya Kreatif dalam Mewujudkan Pembelajaran yang Berhasil.* Lombok: Penerbit Holistica.

PENYUNTINGAN NASKAH ARTIKEL SEBELUM DIPUBLIKASIKAN

Syamsul Alam

Widyaiswara LPMP Sulawesi Selatan

syamsulalamwi@gmail.com

Abstrak: Penyuntingan naskah artikel dilakukan agar setiap artikel yang dipublikasikan di media memenuhi kelayakan. Sebenarnya naskah artikel sebelum dikirim ke media massa telah disunting oleh penulisnya. Walaupun demikian, naskah artikel tersebut masih harus disunting oleh penyunting media massa untuk disesuaikan dengan gaya selingkung media massa tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa naskah artikel yang dipublikasikan layak untuk dibaca dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Kata Kunci: penyunting, penyuntingan naskah, publikasi

Informasi secara tertulis berkembang cepat seiring dengan perkembangan zaman. Informasi tertulis tersebut diharapkan dapat memperkaya wawasan pembaca sehingga dapat menepis berbagai hal yang dapat merusak moral. Hanya tulisan yang mampu mengubah cara berpikir atau mengubah *mindset* seseorang (Yunus, 2015:21). Hal itulah yang menunjukkan pentingnya informasi secara tertulis dalam bentuk artikel karena dapat mengubah cara berpikir pembaca mengenai sesuatu hal.

Informasi yang termuat dalam artikel (sebelum diterbitkan dinamakan naskah artikel) masih masih merupakan naskah mentah. Jika naskah artikel itu belum disunting, biasanya masih ada kesalahan atau kekurangannya. Kesalahan tersebut dapat mempengaruhi pemahaman pembaca terhadap sesuatu hal jika tidak diperbaiki atau disunting.

Proses penyuntingan naskah artikel perlu dilakukan sebelum dimuat atau dipublikasikan di media massa. Penyuntingan naskah artikel dilakukan agar naskah artikel tersebut layak untuk dipublikasikan. Oleh karena pentingnya proses penyuntingan naskah artikel sebelum diterbitkan, maka dalam tulisan ini, penulis membahas penyuntingan naskah artikel yang difokuskan pada alasan penyuntingan naskah artikel, penyuntingan isi dan penggunaan bahasa.

PEMBAHASAN

Alasan Penyuntingan Naskah

Penyuntingan naskah yang akan dipublikasikan harus dilakukan oleh penyunting. Dalam proses penyuntingan

tersebut, misalnya penyuntingan penggunaan ejaan, penyunting harus memperhatikan: (1) pemakaian huruf, penulisan huruf kapital, dan penulisan huruf miring; (2) penulisan kata, seperti penulisan kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan dan paartikel, serta singkatan dan akronim; (3) penulisan angka dan lambing bilangan; (4) penulisan unsur serapan; dan (5) pemakaian tanda baca (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:6). Oleh karena itu, penyunting perlu mempelajari secara teliti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang termuat dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015.

Setiap kata memiliki batasan pengertian sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, penggunaan kata untuk mengungkapkan maksud secara tepat perlu diperhatikan. Pilihan kata (diksi) tidak hanya ditujukan pada pemakaian kata itu, tetapi juga tentang diterima atau tidaknya kata itu. Sebuah kata yang tepat untuk menyatakan suatu maksud tertentu, belum tentu dapat diterima oleh pembaca tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan menggunakan kata dalam suatu naskah artikel.

Kata yang penulis gunakan dalam tulisannya tidak selamanya tepat. Untuk

itu, penulis perlu memilih kata sesuai dengan jenis media massa, tingkat sosial pembaca, dan arah tulisan. Pemilihan kata yang tepat tersebut harus mendapat perhatian serius dari penulis naskah artikel agar naskah artikel yang dihasilkan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

Pemilihan kata hingga menjadi kalimat, dan pembentukan paragraf perlu dilakukan secara cermat agar informasi yang terdapat dalam paragraf tersebut dapat dipahami pembaca. Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf itu harus merupakan kesatuan, sehingga mudah dipahami pembaca.

Kata yang dirangkai menjadi kalimat, ada yang membentuk kalimat panjang dan ada pula yang membentuk kalimat pendek. Kalimat yang digunakan dalam artikel, tidak semuanya kalimat pendek. Kalimat yang digunakan dalam artikel, perlu bervariasi, ada kalimat pendek dan ada pula kalimat panjang. Hal ini penting diketahui, terutama bagi penulis pemula, agar naskah artikel yang dihasilkan dapat dimengerti dan diminati pembaca.

Pilihan kata hingga tersusun kalimat yang pendek, kalimat yang sedang, dan kalimat yang panjang. Kalimat-kalimat tersebut terbentuk menjadi paragraf.

Pembentukan paragraf berurutan yang menarik minat untuk dibaca menjadi langkah awal dalam menulis naskah artikel.

Naskah artikel yang telah dihasilkan penulis, perlu disunting dengan baik. Penyuntingan itu dilakukan agar naskah artikel yang telah melalui proses penyuntingan layak untuk dipublikasikan. Naskah artikel yang telah disunting itu memiliki kelayakan, baik kelayakan isi maupun kelayakan penggunaan Bahasa. Dengan demikian, naskah artikel tersebut memberikan manfaat bagi pembacanya.

Menyunting Naskah Artikel

Istilah naskah lazimnya digunakan dalam penyusunan artikel yang hendak diterbitkan atau dipublikasikan melalui media massa atau diterbitkan oleh penerbit. Naskah suatu artikel sesungguhnya merupakan bahan baku terbitan media massa. Sebagai bahan terbitan, bisa jadi naskah tulisan masih sederhana sehingga perlu dipastikan layak atau tidaknya untuk diterbitkan. Apabila naskah itu layak diterbitkan, maka naskah tersebut perlu disunting oleh penyunting.

Penyuntingan berarti proses, cara, atau perbuatan menyunting naskah. Seorang penyunting naskah harus

mengetahui dasar-dasar penyuntingan sebelum menyunting naskah. Dasar-dasar penyuntingan meliputi kode etik penyuntingan naskah, prapenyuntingan naskah, ruang lingkup penyuntingan naskah, dan pasca penyuntingan naskah.

Secara umum, penyuntingan adalah aktivitas menyiapkan naskah untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya. Menurut kalangan penerbit, penyuntingan berarti menyiapkan, menyeleksi, dan menyesuaikan naskah orang lain untuk penerbitan. Koreksi merupakan kegiatan pemeriksaan kembali suatu naskah dalam rangka perbaikan (Wibowo, 2007: 19). Koreksi yang dilakukan tersebut menjadikan naskah yang akan dipublikasikan semakin sempurna. Naskah artikel yang telah dihasilkan penulis memerlukan penyuntingan sebelum dipublikasikan. Penyuntingan dilakukan dalam dua hal, yaitu penyuntingan isi dan penyuntingan bahasa. Sebuah naskah yang diterima dari penulis, dua kali disunting. Pertama disunting duhulu isi informasi yang termuat dalam artikel itu. Setelah penyuntingan isi itu, dilanjutkan dengan penyuntingan penggunaan bahasa.

Dalam memudahkan pekerjaan penyunting bahasa, penulis artikel dalam menuliskan gagasan, perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang penggunaan tata bahasa dan ejaan. Setelah naskah artikel selesai ditulis, naskah artikel tersebut masih harus dibaca berulang kali untuk mengoreksi kesalahan yang mungkin masih ditemukan sebelum dikirim ke media massa.

Pengelola media massa umumnya masih menemukan kekurangan atau kesalahan naskah tulisan yang diterima dari penulis, meskipun naskah artikel tersebut telah disunting penulisnya. Agar Naskah artikel tersebut dapat dimuat dalam media massa, naskah artikel itu masih harus disunting, baik isi maupun penggunaan bahasanya.

Menyunting terhadap naskah artikel sebelum dipublikasikan di media massa cetak sangat penting untuk dilakukan. Naskah artikel yang telah disunting dapat dijaga kualitasnya, seperti keruntutan, kelogisan, ketepatan pamaikan bahasa, dan kelengkapan unsur tulisan. Dengan demikian, seorang penyunting dapat menjaga kelayakan dan kepantasan tulisan itu dibaca atau disampaikan kepada pembaca yang menjadi sasarannya. Melalui kegiatan

penyuntingan ini, penyunting dapat menyampaikan kritik, saran, atau catatan demi perbaikan suatu tulisan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 6).

Menyunting dapat diartikan merapikan naskah agar siap cetak dengan melihat kembali, membaca, atau memperbaiki naskah itu secara keseluruhan, baik dari segi bahasa maupun dari segi materinya, penyajiannya, kelayakan dan kebenaran materi (isi) naskah yang akan diterbitkan (Eneste dalam Departemen Pendidikan Nasional, 2005:6). Perbaikan itu dilakukan berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan kaidah penulisan. Perbaikan dapat bersifat menyeluruh atau sebagian. Ada tiga aspek yang harus disunting dalam naskah artikel, yaitu isi, organisasi, dan bahasa (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:6).

Penulisan artikel ilmiah menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, kalimat yang tidak berbelit-belit, dan struktur paragraf yang runtut.

Kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan kalimat pasif, kata yang tidak emotif, dan

tidak berbunga-bunga. Penggunaan kata seperti saya, kami, atau kita perlu dihindari. Jika terpaksa menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis sendiri, istilah yang dipakai bukan kami atau saya, melainkan penulis atau peneliti. Namun, kedua kata tersebut sebaiknya digunakan sedikit saja. Selain itu, dalam menulis artikel ilmiah perlu diperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat.

Pengetahuan dan pemahaman tentang aspek kebahasaan, di antaranya pemahaman tentang kata, pilihan kata, kalimat, paragraf, gaya bahasa, dan pengetahuan teknis lain mengenai penyuntingan naskah (Rahardi, 2009:2). Hal ini perlu mendapat perhatian penyunting agar artikel yang telah disunting dan dipublikasikan dapat dengan mudah dipahami pembaca.

Penyunting bahasa harus menguasai dimensi kebahasaan agar dapat menyunting artikel dengan baik. Apabila penyunting tidak memiliki penguasaan dimensi kebahasaan dipastikan tidak akan memiliki kemampuan yang memadai untuk meluruskan dan membetulkan kesalahan kebahasaan yang terdapat dalam artikel yang disunting. Hasil suntingannya dapat dipastikan tidak akan memberikan pencerahan kepada pembaca. Dengan

perkataan lain, hasil suntingannya itu tidak akan memberikan banyak maslahat dan tidak semakin menjadikan bahasa berharkat dan bermartabat (Rahardi, 2009:2). Untuk itu, penyunting yang baik harus belajar mengenai dimensi kebahasaan.

Syarat Penyunting Naskah

Meskipun bahasa Indonesia menjadi materi pembelajaran wajib pada pendidikan formal, mulai SD sampai perguruan tinggi, namun fakta menunjukkan bahwa pemahaman dan penguasaan seseorang terhadap penggunaan bahasa Indonesia umumnya belum maksimal. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai keinginan untuk menjadi penyunting naskah artikel (penggunaan Bahasa) harus mempelajari kaidah bahasa Indonesia yang dikenal dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) (Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015) dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.

Seorang penyunting naskah artikel harus memenuhi syarat untuk menjadi penyunting, seperti yang penulis kemukakan di atas. Namun, secara lebih rinci, Rahmadi (2017:237-238) menyatakan bahwa syarat yang harus dimiliki penyunting naskah dipaparkan di bawah ini.

Pertama, penyunting menguasai ejaan yang berlaku (PUEBI). Penyunting naskah harus memahami ejaan bahasa Indonesia saat ini. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca (titik, koma, dan sebagainya) harus dipahami benar. Penyunting mengalami kesulitan memperbaiki naskah jika tidak memahami ejaan.

Kedua, penyunting menguasai tata bahasa (Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia). Penyunting naskah harus menguasai bahasa Indonesia dalam arti luas. Penyunting naskah harus tahu kalimat yang baik dan benar, kata-kata baku, bentuk-bentuk yang salah kaprah, dan pilihan kata yang tepat.

Ketiga, penyunting bersahabat dengan kamus atau menguasai penggunaan kamus: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Orang yang malas membuka kamus tidak tepat untuk menjadi penyunting naskah, karena ahli bahasa sekalipun tidak mungkin mmenguasai semua kata dalam satu bahasa tententu. Dalam hal kamus istilah, leksikon, dan ensiklopedia. Seorang penyunting naskah juga harus mengetahui perubahan kamus yang dipakai karena bisa dimungkinkan ada perbedaan beberapa kata/istilah antara

cetakan terbaru dengan cetakan sebelumnya. Perbedaan juga dimungkinkan ada antara versi cetak dengan versi *online*. Untuk menyikapi hal ini, sebaiknya seorang penyunting naskah mencantumkan sumber kamus yang digunakan sebagai acuan dalam daftar pustaka.

Keempat, penyunting memiliki kepekaan bahasa (mengetahui ragam bahasa). Penyunting naskah harus mengetahui kalimat kasar dan kalimat halus atau mengetahui kalimat dan kata yang harus dihindari. Untuk itu, seorang penyunting naskah perlu membaca tulisan pakar bahasa atau kolom bahasa yang ada di sejumlah media cetak.

Kelima, penyunting memiliki pengetahuan luas (mengetahui beragam bidang ilmu). Penyunting naskah harus banyak membaca buku, majalah, koran dan menyerap informasi dari media audiovisual agar tidak ketinggalan informasi. Pengetahuan luas dapat membantu seorang penyunting naskah dalam proses penyuntingan naskah karena dimungkinkan ada informasi terbaru. Contohnya, di Pulau Sulawesi, ada provinsi baru dengan nama Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah provinsi baru ini

merupakan pemerakaran dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Keenam, penyunting memiliki ketelitian dan kesabaran untuk bekerja. Ketika menjalankan tugasnya menyunting, penyunting naskah harus teliti menyunting setiap kalimat, kata, dan istilah yang digunakan penulis naskah. Selain itu, penyunting harus pula sabar menghadapi setiap naskah karena penyuntingan naskah dilakukan melalui proses yang berulang-ulang.

Ketujuh, penyunting memiliki kepekaan terhadap SARA dan Pornografi. Penyunting naskah harus mengetahui kalimat yang layak cetak, kalimat yang perlu diubah konstruksinya, dan kata yang perlu diganti dengan kata lain. Dengan perkataan lain, penyunting naskah harus peka terhadap hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta pornografi. Dengan perkataan lain, semua naskah yang telah disunting dipastikan tidak ada lagi yang mengandung SARA dan pornografi sehingga naskah yang telah disunting itu layak untuk dipublikasikan.

Kedelapan, penyunting memiliki keluwesan. Sikap luwes dan supel harus dimiliki oleh seorang penyunting naskah, karena sering berkomunikasi dengan

penulis yang naskahnya disunting. Penyunting harus bersedia mendengarkan berbagai pertanyaan, saran, dan keluhan. Itulah sebabnya, orang yang kaku dalam berinteraksi, berwatak keras, angkuh, dan kasar tidak tepat untuk menjadi penyunting naskah.

Kesembilan, penyunting memiliki kemampuan menulis. Penyunting naskah harus dimiliki kemampuan untuk menulis karena apabila penyunting naskah tidak memiliki kemampuan menulis, misalnya menulis kalimat yang benar, tentu sulit memperbaiki kalimat orang lain dalam naskah yang disunting.

Kesepuluh, penyunting menguasai bidang tertentu. Ada baiknya jika seorang penyunting menguasai salah satu bidang keilmuan tertentu, misalnya ilmu bahasa, matematika, sejarah, jurnalistik, teknologi, dan kesehatan. Hal tersebut sangat membantu tugasnya menyunting.

Kesebelas, penyunting menguasai bahasa asing. Dalam tugasnya, seorang penyunting naskah akan berhadapan dengan istilah asing, khususnya bahasa Inggris. Itulah sebabnya, minimal seorang penyunting naskah dapat menguasai bahasa Inggris secara pasif. Artinya, penyunting naskah dapat membaca dan memahami teks bahasa Inggris agar tidak

terjadi kesalahan penulisan atau ketidaktepatan dengan padanan kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia.

Kedua belas, penyunting memahami kede etik penyuntingan naskah. Dalam penyuntingan naskah, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan agar tidak muncul masalah, terutama dengan penulis/pengarang. Rambu-rambu yang merupakan pedoman dalam menyunting naskah, antara lain: (1) penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah; (2) penyunting naskah bukanlah penulis naskah; (3) penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah; (4) penyunting wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya.

Kedua belas syarat yang harus dimiliki oleh penyunting yang dipaparkan oleh Rahmadi (2017), perlu diperhatikan oleh penanggung jawab penerbitan. Hal itu perlu diperhatikan agar naskah yang telah melalui proses penyuntingan layak untuk dipublikasikan.

Penyunting harus menyadari kinerja profesionalnya, yakni mulai dari pengumpulan infomasi (naskah), penyeleksian, pengolahan, pengadaan, serta, penyebaran informasi tersebut ke masyarakat. Seorang penyunting wajib

menguasai medan kerjanya. Selain dituntut berdaya intelektual tinggi dan berpengalaman, ia harus pula kreatif, menguasai seluk beluk bahasa dan pakar di bidangnya. Seorang penyunting malahan juga dituntut memiliki gagasan yang fresh dan berdaya jual tinggi, di samping gagasan pokok yang sudah menjadi kebijakan lembaga tempatnya bekerja (Wibowo, 2007: 19-20). Hal tersebut menjadikan penyunting lebih mudah menyempurnakan atau meluruskan gagasan yang terdapat dalam tulisan yang dikoreksi.

Menurut Wibowo (2007: 21-22), penyunting harus memahami dan menghayati eksistensi profesionalisme kepenyuntingan. Eksistensi kepenyuntingan tersebut terkait dengan hal berikut.

Pertama, penyunting memahami prinsip tata permainan bahasa bahwa di dalam kehidupan sehari-hari terdapat bermacam-macam pengguna bahasa. Pemahaman terhadap prinsip tata permainan ini lebih meudahkan dalam menyunting naskah.

Kedua, penyunting memahami teknik penulisan sesuai dengan laras bahasa (kesesuaian di antara bahasa dan pemakainya) tulisan dan sekaligus memahami tata permainan bahasa dalam

bahasa tulis. Hal ini memungkinkan tidak terjadinya kesalahan dalam penyuntingan.

Ketiga, penyunting memahami pertalian erat antara dunia penulisan dan dunia marketing. Pasalnya, pada dasarnya menulis adalah melahirkan produk. Itulah sebabnya, dibutuhkan tindak marketing yang terencana atau berdasarkan strategi market.

Keempat, penyunting yakin bahwa topik yang akan ditulis mendatangkan pencerahan bagi pembaca. Hal ini patut digarisbawahi sebab sebuah topik biasanya ditulis oleh sejumlah dengan angle yang berbeda-beda dan dengan tujuan yang berbeda-beda pula.

Kelima, penyunting jernih dan objektif dalam menyikapi perbedaan pendapat. Jernih bertalian dengan tidak menyebabkan pembaca kebingungan dan objektif berarti sejauh dalam jangkauan akal manusia. Hal ini berpeluang muncul, biasanya, apabila penulis tanpa sadar dihegemoni (dipengaruhi kepemimpinan, dominasi, kekuasaan) pandangan yang lebih bersifat politis. Tidak semua orang sependapat dengan penulis.

Keenam, penyunting memahami kecenderungan yang berlangsung dan berkembang terus-menerus dalam masyarakat. Untuk itu, setidaknya,

penyunting selalu mengasah diri dan membuka pikiran terhadap informasi baru. Penyunting harus rajin membaca berbagai informasi terkini.

Ketujuh, penyunting penggunaan bahasa untuk sebuah naskah yang harus dipublikasikan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Menyunting penggunaan bahasa itu tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang ejaan, kosakata, dan struktur kalimat. Dengan perkataan lain, penyunting harus sungguh-sungguh memahami seluk-beluk kebahasaan.

Kedelapan, penyunting bahasa harus dapat menyunting penggunaan bahasa dalam suatu artikel. Untuk dapat melakukan penyuntingan bahasa itu, penyunting bahasa harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang segala hal yang terkait dengan unsur kebahasaan. Bahkan, lebih sempurna lagi jika penyunting bahasa itu memahami latar belakang teori dan kidah kebahasaan (Bahasa Indonesia). Jika penyunting bahasa tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai kebahasaan, dikhawatirkan terjadinya hiperkorek, yaitu memperbaiki (mengoreksi) penggunaan bahasa sudah benar, akhirnya menjadi salah. Contoh,

kata *jadwal* dan *silakan* dikoreksi menjadi *jadual* dan *silahkan*.

Menyunting bahasa, khususnya untuk sebuah naskah artikel harus dipublikasikan, bukanlah pekerjaan mudah. Penyuntingan bahasa itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai segala hal yang terkait dengan kebahasaan. Selain itu, penyuntingan juga dilakukan oleh orang yang menguasai hal-hal praktis kebahasaan dan latar belakang teori dan kaidah kebahasaan. Pengetahuan dan pemahaman menyangkut berbagai aspek kebahasaan itu di antaranya akan mencakup pemahaman iihwal kata, pilihan kata atau diksi, kalimat, paragraf, gaya bahasa, dan beberapa pengetahuan teknis lain tentang penyuntingan naskah (Rahardi, 2009:2). Oleh karena itu, naskah artikel yang telah lolos pada kegiatan menyunting harus dipastikan telah memenuhi syarat untuk dipublikasikan.

PENUTUP

Sebelum dipublikasikan, naskah artikel harus melalui proses penyuntingan. Dalam proses penyuntingan tersebut, harus dipastikan bahwa naskah artikel yang akan dipublikasikan itu memiliki kelayakan, baik kelayakan isi maupun kelayakan

penggunaan Bahasa. Dengan demikian, naskah artikel yang telah dipublikasikan itu dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Penyunting naskah artikel harus memiliki pengetahuan dasar mengenai kaidah bahasa Indonesia (PUEBI) dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Selain itu, penyunting naskah artikel harus memiliki kemampuan menulis, menguasai bidang ilmu, memiliki pengetahuan luas, menguasai bahasa asing, mahir menggunakan kamus, menguasai bidang bahasa, ketelitian dan kesabaran bekerja, memahami kode etik penyuntingan, dan berbagai hal yang mendukung kegiatan penyuntingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Pengembangan Kemampuan Menyunting dalam Materi Pelatihan Terintegrasi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
Kristiantari, Rini. 2010. “Bahasa dalam Penulisan Karya Ilmiah”, *bahan ajar* Diklat KTI Widya Iswara di Jakarta.

- Rahardi, Kunjana. 2009. *Penyuntingan Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang*. Jakarta: Erlangga.
- Rahmadi, Duwi. 2017. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kesalahan Berbahasa Edisi Terbaru Superlengkap*. Solo: Genta Smart Publisher.
- Yunus, Syarifuddin. 2015. *Kompetensi Menulis Kreatif*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wibowo, Wahyu. 2007. *Langkah Jitu Merangkai Kata agar Komunikatif, Hidup, dan Memikat Menjadi Penulis dan Penyuntung Sukses*. Jakarta: Bumi Aksara.

PEMANFAATAN GAME EDUKASI DALAM MENGAJARKAN TATA CARA BERWUDHU KEPADA ANAK USIA DINI

Sitti Hajrah

*Pengembang Teknologi Pembelajaran di LPMP Sulsel
yhachi77@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan guru dalam menggunakan media game edukasi saat mengajarkan materi tentang berwudhu. Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk ujicoba media di TK DWP LPMP Sulawesi Selatan dengan melihat antusias peserta didik memainkan game edukasi “Aku Pintar Thaharah” yang dikembangkan oleh penulis. Data diperoleh dari instrumen penilaian media kepada guru TK DWP LPMP Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, game ini efektif untuk mengajarkan thaharah, terutama tentang urutan dalam berwudhu.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Game Edukasi, Anak Usia Dini

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari waktu ke waktu telah memengaruhi berbagai bidang kehidupan sehari-hari termasuk bidang pendidikan. Ketergantungan terhadap perangkat TIK semakin hari sudah semakin meningkat, bahkan ada sebagian masyarakat yang sulit melepaskan diri dari perangkat TIK. Pengaruh TIK terhadap kehidupan sehari-hari tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat perkotaan saja tetapi sudah menjangkau masyarakat pedesaan. Berdasarkan hasil survei penggunaan TIK tahun 2017 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam satu rumah tangga sedikitnya satu orang yang menggunakan TIK, Perangkat TIK dalam rumah tangga yaitu Komputer/Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone (3G/4G), atau Handphone (2G). Hasil survei juga menunjukkan bahwa 66,3% individu memiliki smartphone dengan frekuensi penggunaan minimal 1 jam/hari (Kemkominfo, 2017). Saat ini pengguna smartphone mulai dari usia balita hingga usia lanjut.

Di Indonesia, seseorang tidak diwajibkan untuk menempuh pendidikan di TK. Di TK, siswa diberi kesempatan untuk belajar dan diberikan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan usia pada

tiap-tiap tingkatannya. Siswa diajarkan mengenai hal berikut ini: agama, budi bahasa, berhitung, membaca (mengenal aksara dan ejaan), bernyanyi, bersosialisasi dalam lingkungan keluarga dan teman-teman sepermainannya, dan berbagai macam keterampilan lainnya.

Tujuan belajar di TK adalah meningkatkan daya cipta anak-anak dan memacu mereka untuk belajar mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan melalui pendekatan nilai budi bahasa, agama, sosial, emosional, fisik, motorik, kognitif, bahasa, seni, dan kemandirian. Semua dirancang sebagai upaya mengembangkan daya pikir dan peranan anak dalam hidupnya.

Pendidikan anak usia dini yang baik dan tepat dibutuhkan anak untuk menghadapi masa depan. Terlebih pembelajaran tersebut menyangkut tentang pengenalan komputer sejak usia dini ini yang sangat di anjurkan karena dengan teknologi yang serba canggih pada saat sekarang ini berbagai informasi dunia dapat diakses melalui tangan kita. begitu juga dengan anak-anak sebagai penerus generasi bangsa kita yang memerlukan pengenalan komputer sejak dinilah yang paling tepat diajarkan.

Salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan oleh pendidik anak usia dini adalah menyiapkan anak didik agar dapat hidup di masa depan dengan lebih baik. Diperkirakan pada masa depan nanti penggunaan teknologi akan semakin mendominasi kehidupan. Untuk itu, semenjak dini pendidik perlu mengenalkan teknologi tersebut kepada anak didik. Karena penguasaan teknologi dimasa depan akan menentukan kejayaan sebuah bangsa. Begitulah pesan yang disampaikan oleh Profesor Sandralyn Byrnes, Australia's & International Teacher of the Year saat seminar kecil di acara Giggle Playgroup Day 2011, gelaran Minneapolis & Giggle Management, Jumat, 11 Februari 2011 lalu. Usia tiga dan empat tahun adalah usia yang siap untuk mengeksplorasi komputer (Haugland, 2000).

Anak usia dini membutuhkan banyak waktu untuk bereksperimen dan eksplorasi. Pembelajaran melalui komputer bagi anak dapat menstimulasi koordinasi mata dengan ketepatan gerak tangan dengan belajar menggunakan mouse. Secara tidak langsung pembelajaran melalui komputer juga membantu perkembangan motorik halus. Pada awalnya anak-anak menggunakan komputer dengan bantuan orang dewasa.

Mereka lebih perhatian, lebih minat dan berkurang frustasinya ketika orang dewasa ada bersamanya. Selanjutnya bantuan dan supervisi orang dewasa menjadi minimal karena mereka sudah bisa mengoperasikan komputer.

Pepatah Arab mengatakan pendidikan pada anak usia dini bagi mengukir di atas batu. Pendidikan yang diperoleh menjadi dasar kehidupannya kelak, dan pelajaran yang diperoleh di usia dini akan tertanam lama dalam ingatan seseorang. Hal inilah yang menjadi dasar untuk mengajarkan ilmu agama sejak usia dini termasuk tentang tata cara berwudhu yang menjadi dasar dalam melaksanakan ibadah shalat sebagai salah satu ibadah wajib umat muslim. Mengajarkan tata cara berwudhu kepada anak perlu metode tertentu agar kegiatan tersebut tetap menjadi hal yang menyenangkan bagi anak-anak dan tidak menyusahkan bagi anak dan orang tua ataupun gurunya.

Atas dasar inilah sehingga penulis memaparkan cara mengajarkan wudhu kepada anak tanpa harus kerepotan karena basah. Selain itu, melalui artikel ini juga penulis menjawab pertanyaan “Apakah media pembelajaran dalam bentuk game edukasi “Aku Pintar Thaharah” layak untuk dimanfaatkan dalam mengajarkan

materi wudhu kepada anak taman kanak-kanak?”

Gagne dan Briggs dalam Batara Risdianto (2014) menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yaitu antara lain buku, *tape recorder*, kaset, *video camera*, *video recorder*, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.

Ciri-ciri umum media pembelajaran menurut Azhar Arsyad dalam Batara Risdianto (2014) sebagai berikut:

- (1) Pengertian fisik dikenal sebagai hardware (perangkat keras) yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar atau dibaca;
- (2) Pengertian non fisik dikenal sebagai software (perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras merupakan isi yang ingin disampaikan pada siswa;
- (3) Penekanan media pendidikan terdapat pada audio dan visual;
- (4) Alat bantu proses belajar;
- (5) Alat komunikasi proses belajar;
- (6) Alat yang digunakan secara massal (misalnya: film, slide, video, OHP), atau perorangan

(misalnya: modul, komputer, radio, tape/kaset, video, recorder); (7) Sikap perbuatan, organisasi dan managemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu.

Game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Dalam setiap game, terdapat peraturan yang berbeda-beda untuk memulai permainannya sehingga membuat jenis game semakin bervariasi.

Salah satu fungsi game adalah penghilang stress atau rasa jemu. Hal itulah yang menyebabkan hampir setiap orang senang bermain game, baik anak kecil, remaja, maupun dewasa. Jenis game yang mereka mainkan berbeda.

Beberapa definisi dan pengertian dari game menurut ahli yang dirangkum oleh Crysna (2018) adalah: Game adalah penarik perhatian yang telah terbukti. Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. Game merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan dan dinikmati para pengguna media elektronik saat ini. Game merupakan suatu bentuk hiburan yang seringkali dijadikan sebagai penyegar pikiran dari rasa penat yang disebabkan oleh aktivitas dan rutinitas. Game merupakan bagian tak terpisahkan dari

keseharian anak, sedangkan sebagian orang tua menuduh game sebagai penyebab nilai anak turun, anak tak mampu bersosialisasi, dan tindakan kekerasan yang dilakukan anak. Game adalah salah satu candu yang susah dihilangkan, bahkan ada yang mengatakan bahwa candu game online setara dengan narkoba. Game merupakan sistem partisipatoris dinamis karena game memiliki tingkat penceritaan yang tidak dimiliki film. Game adalah bentuk investigasi paling tinggi.

Game merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi masalah besar bagi pengguna komputer. Untuk dapat memainkan game dengan nyaman, semua komponen komputer yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik, terutama VGA card-nya.

Educational game atau game edukasi menurut Ritzhauf (dalam Yudi, 2011) adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan pendidikan (mendukung pengajaran dan pembelajaran), menggunakan teknologi multimedia interatif. Atau dengan kata lain game edukasi adalah game yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran.

Anik (2016) mengemukakan game edukasi sangat menarik untuk dikembangkan, ada beberapa kelebihan

dari game edukasi dibandingkan dengan metode edukasi konvensional, salah satu kelebihan utama game edukasi adalah pada visualisasi dari permasalahan nyata. Berdasarkan pola yang dimiliki oleh game tersebut, pemain dituntut untuk belajar sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Status game, instruksi, dan tools yang disediakan oleh game akan membimbing pemain secara aktif untuk menggali informasi sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan strategi saat bermain. Game edukasi bisa digunakan sebagai media alternatif pembelajaran guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam mengubah cara belajar konvensional menjadi cara belajar simulasi game, sehingga dapat mengembangkan kreativitas anak, karena dalam game edukasi memiliki unsur tantangan, ketepatan, daya nalar dan etika.

Salah satu media yang dapat digunakan adalah game edukasi dengan judul “Aku Pintar Thaharah”. Game ini dibuat dengan menggunakan aplikasi construct 2 yang mana dapat dimainkan melalui laptop/PC maupun melalui smartphone. Aplikasi game beserta petunjuk penggunaan “Aku Pintar Thaharah” ini dapat diunduh melalui <https://sites.google.com/view/belajar->

barengptp/galeri. Game ini dapat dimainkan di smartphone hanya dengan menginstal aplikasi dalam format apk di smartphone. Untuk dapat menggunakan game ini di laptop ataupun PC, pengguna terlebih dahulu harus menginstal aplikasi construct di laptop.

Gambar 1. Halaman awal game menampilkan profil pengembang game



PROFIL PENGEMBANG :

NO REGISTRASI PESERTA	28514
NAMA	SITI HAJRAH, S.Pd., M.Pd
INSTANSI	LPMP SULAWESI SELATAN
JABATAN	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
JUDUL GAME EDUKASI	AKU PINTAR THAHARAH
EMAIL	yhajrah7@gmail.com
NO. HP	085242050816

SILAHKAN KLIK DI MANA SAJA

Game edukasi ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu:

1. Penjelasan tentang thaharah dalam format audio
2. Game yang berisi pertanyaan tentang seputar thaharah
3. Penjelasan tentang pengertian wudhu, sunnah wudhu, dan rukun wudhu dalam format gambar dan audio jika gambarnya diklik
4. Game tentang urutan berwudhu, yang mana jika pemain mengklik pada gambar yang benar nilai bertambah 10 namun jika mengklik gambar yang salah nilai berkurang 5. Jawaban benar

atau salah juga dapat ditandai dengan adanya suara yang berbeda.

5. Di bagian akhir, pemain dapat mengetahui skor yang diperoleh. Selanjutnya pemain dapat memilih apakah ingin kembali bermain atau selesai.

Gambar 2. Contoh salah satu bagian permainan



Menurut bahasa, wudhu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah (syariah Islam) artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan *hadast* kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat (orang yang akan *sholat*, diwajibkan berwudhu lebih dulu, tanpa wudhu shalatnya tidak sah).

Apabila seorang muslim mau berwudhu maka hendaknya ia **berniat** di dalam hatinya kemudian membaca "*Bismillahirrahmanirrahim*" sebab Rasulullah SAW bersabda "*Tidak sah*

wudhu orang yg tidak menyebut nama Allah". Dan apabila ia lupa maka tidaklah mengapa. Jika hanya mengucapkan "*Bismillah*" saja maka dianggap cukup. Kemudian disunnahkan mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali sebelum memulai wudhu. Kemudian **berkumur-kumur** lalu **menghirup** air dgn hidung lalu **mengeluarkannya**. Lalu **mencuci muka** dari batas tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai dagu dan mulai dari batas telinga kanan hingga telinga kiri. Dan jika rambut yang ada pada muka tipis maka wajib dicuci hingga pada kulit dasarnya. Tetapi jika tebal maka wajib mencuci bagian atasnya saja namun disunnahkan mencelahi celahi rambut yang tebal tersebut. Rasulullah selalu mencelahi celahi jenggotnya di saat berwudhu. Kemudian, **mencuci kedua tangan sampai siku** lalu **mengusap kepala beserta kedua telinga** satu kali dimulai dari bagian depan kepala lalu diusapkan ke belakang kepala lalu mengembalikannya ke depan kepala. Setelah itu, langsung mengusap kedua telinga dengan air yang tersisa pada tangannya. Terakhir, **mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki**.

Ketika berwudhu wajib mencuci anggota-anggota wudhunya **secara**

berurutan tidak menunda pencucian salah satunya hingga yang sebelumnya kering. Hal ini berdasar hadits yang diriwayatkan Ibn Umar Zaid bin Sabit dan Abu Hurairah bahwa Nabi senantiasa berwudu secara berurutan kemudian beliau bersabda “*Inilah cara berwudu di mana Allah tidak akan menerima shalat seseorang kecuali dengan wudu seperti ini*”. Oleh karena itu, dalam game edukasi “Aku Pintar Thaharah ini juga membahas tentang urutan dalam berwudhu.

Kegiatan berwudhu adalah salah satu syarat sahnya *sholat*. Oleh karena itu, berwudhu termasuk salah satu ibadah yang sangat penting dan sebaiknya diajarkan sejak dini. Sesuai kurikulum yang berlaku, pembelajaran tentang *sholat* dan berwudhu dimulai sejak taman kanak-kanak. Pada jenjang sekolah dasar pun diajarkan tentang berwudhu ini pada kelas 1 SD. Hal ini menunjukkan betapa pembelajaran tentang wudhu dan sholat adalah materi yang sangat penting sehingga harus diajarkan sejak kecil dengan harapan materi yang disampaikan dapat dipahami dan tertanam lebih lama dalam ingatan anak-anak.

Anak-anak dengan karakteristik mereka yang suka bermain apalagi “bermain air” tentu menjadi masalah

tersendiri dalam mengajarkan materi tentang berwudhu jika diajarkan secara langsung dengan menggunakan air. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media yang dapat digunakan untuk mengajarkan materi tentang wudhu namun tidak membuat anak-anak kebasahan.

Pembelajaran melalui komputer yang diterapkan pada anak usia dini tentunya dapat menstimulasi kecerdasan mereka, misalnya kecerdasan kognitif mengenai pemahaman konsep bilangan maupun kecerdasan bahasa dan mengasah kemampuan untuk berpikir kritis. Pembelajaran melalui komputer bagi anak dapat menstimulasi koordinasi mata dengan ketepatan gerak tangan dengan belajar menggunakan mouse. Secara tidak langsung pembelajaran melalui komputer juga membantu perkembangan motorik halus.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan (*mixed methods*) antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Peneliti meneliti kualitas respons peserta didik yang menggunakan game edukasi secara langsung. Selain itu peneliti juga memberikan beberapa pertanyaan dalam

bentuk instrumen penelitian kepada guru untuk menilai kualitas dan tingkat kebermanfaatan dari penggunaan game edukasi dalam mengajarkan materi tentang berwudhu.

Penelitian ini dilaksanakan di TK DWP LPMP Sulawesi Selatan dengan responden peserta didik sebagai populasi target sebanyak 18 orang dan guru sebanyak 3 orang. Peneliti mengamati interaksi yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran tentang berwudhu dengan menggunakan game edukasi “Aku Pintar Thaharah”. Peneliti menyiapkan alat berupa laptop dan smartphone untuk digunakan sebagai sarana bermain game edukasi.

Sebelum pembelajaran dimulai, peneliti menjelaskan kepada guru tentang media pembelajaran ini dan cara menggunakan multimedia interaktif. Peserta didik dan guru tetap bersikap relaks karena tujuan uji coba bukan untuk menguji kemampuan peserta didik maupun gurunya, tetapi untuk melihat kesesuaian media itu sendiri.

Guru mengisi kuesioner pemanfaatan media pembelajaran untuk memberikan penilaian terhadap media game edukasi yang digunakan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengamati cara guru menjelaskan tata cara berwudhu menggunakan gambar mengenai langkah-langkah berwudhu. Ini dimaksudkan sebagai informasi awal bagi peserta didik. Siswa yang telah mendapat penjelasan awal, kemudian secara bergantian memainkan game edukasi “Aku Pintar Thaharah”. Setiap peserta didik dapat memainkan game melalui dua media yaitu melalui laptop ataupun melalui smartphone. Pada dasarnya game nya sama hanya saja untuk penggunaan smartphone peserta menjawab dengan menyentuh gambar dimaksud. Siswa bermain dengan didampingi oleh guru.

Guru mencatat perolehan nilai setiap peserta didik dalam memainkan game edukasi. Guru mengumumkan perolehan nilai peserta hingga diperoleh siswa dengan skor tertinggi. Guru juga menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah bermain game. Sebagai penguatan, guru meminta siswa untuk mengulang bagaimana tata cara berwudhu yang benar sesuai urutan yang telah dipelajari melalui game edukasi.

Penilaian terhadap media menggunakan instrumen dengan 15 pertanyaan skala *likert* dengan pilihan

sebagai berikut: (1) Sangat Kurang, (2) Kurang,

(3) Cukup, (4) Baik dan (5) Sangat Baik.

Materi dalam game edukasi ini sudah sesuai dengan kurikulum. Hal ini dapat dilihat dari hasil 100% guru menyatakan bahwa kriteria kesesuaian materi dalam media pembelajaran dengan standar isi sudah baik. Demikian pula untuk kesesuaian penjabaran materi dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal penggunaan bahasa sesuai dengan perkembangan peserta didik dan penggunaan bahasa yang komunikatif 100% guru menyatakan cukup.

Untuk kategori keunggulan media dibandingkan media yang lain dan tampilan media menarik sudah berada pada kategori baik. Dua dari tiga orang guru (66,67%) menyatakan bahwa kesesuaian ukuran teks dengan gambar sudah berada pada kategori baik demikian pula untuk kategori kesesuaian pemilihan musik-suara. Namun masih ada 66,67% responden yang menyatakan kesesuaian pemilihan ukuran huruf masih berada pada kategori cukup.

Beberapa pertanyaan menyangkut tampilan dan pengoperasian yaitu kesesuaian ilustrasi gambar dengan materi, kesesuaian pemilihan jenis huruf,

kemudahan penggunaan/pengoperasian media ini, durasi waktu sesuai kebutuhan, dan jenis media sesuai dengan karakteristik peserta didik 100% responden menyatakan sudah berada pada kategori baik. Sedangkan untuk kemudahan fasilitas dalam penggunaan media 66,67% menyatakan baik dan ada 33,33% menyatakan sangat baik.

Melalui kegiatan ujicoba ini pula diperoleh beberapa saran dari para guru yang sebagai responden yaitu: (1) Sebaiknya di dalam game edukasi ini, bahasa yang digunakan sesuai dengan lingkungan sehari-hari anak (lebih disederhanakan) dan (2) Ukuran dan warna huruf sebaiknya disesuaikan dengan background (pilih warna yang cerah, jangan menggunakan putih). Ukuran huruf sebaiknya diperbesar agar anak bisa bermain sambil belajar membaca.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ujicoba pemanfaatan media menunjukkan bahwa sebagian besar guru menilai bahwa media ini baik untuk digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan materi thaharah khususnya tata cara berwudhu. Bahkan ada guru yang menilai media ini sangat baik dan memudahkan siswa dalam memainkannya.

Kekurangan dari media ini adalah penggunaan bahasa, teks, gambar maupun pemilihan musik-suara yang masih perlu diperbaiki.

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan game edukasi sebagai media pembelajaran ini dapat membuat suasana pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Hal ini dapat peneliti lihat saat melaksanakan penelitian dimana nampak setiap anak begitu antusias dan tidak sabar untuk menunggu giliran bermain game. Bermain game harus antri karena sarana berupa laptop dan smartphone yang dapat digunakan terbatas hanya perangkat kepunyaan peneliti. Untuk itu kami disarankan selanjutnya agar dapat menerapkan game edukasi ini dalam pembelajaran sebaiknya di sekolah telah disediakan perangkat yang telah terinstal game dan dapat digunakan.

Untuk mengatasi antusiasme peserta didik, maka para guru membantu dengan memberikan penjelasan manual kepada peserta didik yang masih menunggu giliran bermain. Untuk itu diperlukan bahan penyerta penggunaan media bagi guru sebagai bahan bacaan sebelum menggunakan media.

Game edukasi “Aku Pintar Thaharah” dapat digunakan sebagai salah

satu alternatif media pembelajaran dalam menyampaikan materi tentang thaharah khususnya tata cara berwudhu. Hal ini dapat dilihat pada hasil penilaian yang menyatakan bahwa materi pada media ini sudah sesuai dengan standar isi pada kurikulum yang berlaku.

Tampilan media sudah baik dalam hal tampilan gambar, warna dan jenis huruf walaupun masih perlu perbaikan dalam hal ukuran huruf perlu diperbesar sesuai dengan saran dari responden. Dalam hal kemudahan penggunaan, media ini sudah dapat digunakan oleh anak usia dini walaupun harus dengan pendampingan dari guru atau orang tua terutama untuk anak yang belum bisa membaca. Diharapkan guru ataupun orang tua yang mendampingi dapat membantu membacakan soal dan memberi bimbingan kepada anak agar dapat menggunakan sarana berupa laptop/komputer ataupun smartphone untuk hal yang positif.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian tentang pemanfaatan media dapat disimpulkan bahwa game edukasi ini efektif untuk mengajarkan tentang thaharah terutama tentang urutan dalam berwudhu. Kelebihan mengajarkan wudhu

dengan menggunakan game ini, di antaranya pembelajaran dapat diulang-ulang tanpa takut anak-anak basah karena bermain air. Agar permainan dapat lebih efektif, sebaiknya saat anak-anak bermain tetap dalam pendampingan dan bimbingan orang tua atau guru agar dapat membacakan soal maupun penjelasan yang ada dalam permainan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik Vega Vitianingsih. 2016. *Game Edukasi Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini*. Jurnal INFORM Vol. 1, No. 1.
- Crysna Raniningrum. 2018. Modul Sagusagame (Satu Guru Satu Game Edukasi). Tidak diterbitkan.
- Feby Dhikamulya. 2016. *Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran*. <http://lisnawatimurni.blogspot.co.id/2016/02/penerapan-teknologi-informasi-dan.html>.
- Haugland, S. W. (2000). *Early childhood classrooms in the 21st century: Using computers to maximize learning*. Young Children.
- Heni Kuswanti. 2016. Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods) <https://www.dkampus.com/2016/03/metode-penelitian-gabungan-mixed-methods-dalam-penelitian>.
- Kak Lia. *Game Edukatif untuk Anak*. 2012. Jakarta. Penerbit Anak Kita.
- Mustaqfirin ZA. 2013. *Pengertian Wudhu, Niat Wudhu, Rukun dan Sunnah Wudhu*. <http://mtsfalalahulhuda.blogspot.com/2013/07/pengertian-wudhu-niat-wudhu-rukun-dan.html> diakses tanggal 11 Juni 2018.
- Nursila. 2015. *Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* <http://duniapaudkita.blogspot.co.id/2015/08/pemanfaatan-tik-untuk-pendidikan-anak.html>
- Sitti Hajrah. 2018. Game Thaharah untuk Anak TK dan SD Kelas Awal. <https://sites.google.com/view/belajar-barengptp/galeri>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2017. *Survey Pengguna TIK 2017 serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat*. 2017. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan

- Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Saputra A., Prayudi. 2014. *Fenomena Penggunaan Smartphone Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Di SMP Islam Athirah I Makassar)* <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/10322>
- Yudi Wibisono. 2011. *Educational Game (Game Edukasi)*. <https://yudiwbs.wordpress.com/2011/01/02/educational-game-game-edukasi/> diakses tanggal 11 Juni 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_kanak-kanak. diakses tanggal 11 Juni 2018.

**MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN BAHASA
INGGRIS MELALUI PENILAIAN AUTENTIK PADA SISWA KELAS VII SMP
NEGERI 6 MAKASSAR**

ROSMAWATI MUHMAR

Abstract: *The research was aimed at knowing the learning result improvement of English in the first year students of SMP Negeri 6 Makassar through autentic assessment. The subject of the research was 32 students. The data collection was done by using component of autentic evaluation involving the students signment, the student jurnal, English process skill, examination, and the student behavior during the learning process. The result of research showed that the autentic assessment and the treatment could improve the English learning result of the First Year students of SMP Negeri 6 Makassar.*

Kata Kunci: hasil belajar, hasil belajar bahasa Inggris, penilaian autentik

Belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung itu, terjadi proses interaksi antara orang yang melakukan kegiatan belajar, yaitu warga belajar dengan sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa manusia yang berfungsi sebagai fasilitator ataupun sumber manusia, seperti buku dan rekaman bahan belajar pandang dengar (Basleman, 2011:2). Pemanfaatan sumber belajar dilakukan untuk membantu orang yang belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. dan interaksi antara siswa dengan siswa. Pada saat kegiatan belajar-mengajar di kelas berlangsung, dilakukan penilaian pembelajaran. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan output dari proses belajar mengajar yang berkualitas. Oleh karena itu, penilaian pembelajaran tersebut harus dilaksanakan dan dikelola dengan baik dan berarti (*manageable and meaningful*). Penilaian pembelajaran bahasa Inggris dapat berhasil dengan baik jika terjadi strukturisasi situasi untuk membantu siswa mengalami perubahan perilaku. Perubahan dalam diri siswa yang dibawa dari proses pengajaran tersebut merupakan indikasi terselenggaranya proses pembelajaran dengan baik.

Dalam kegiatan belajar-mengajar, terjadi interaksi antara guru dengan siswa

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah sangat dipengaruhi

oleh kualitas profesional kinerja guru dan kualitas menejemen sekolah (Sagala, 2010: 32). Pendapat tersebut mengandung makna bahwa kegiatan belajar mengajar berhasil dengan baik jika dilakukan oleh guru yang baik. Guru tersebut dapat memberikan layanan belajar yang berkualitas kepada siswa. Keberhasilan layanan yang diberikan guru menjadikan siswa dapat meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Keberhasilan belajar tersebut dapat dilihat dari ketepatan penilaian yang digunakan.

Penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembelajaran. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian. Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil penilaiannya (Rasyid, 2007: 6-7).

Penilaian sebagai bagian integral dari pembelajaran memiliki fungsi yang amat menentukan untuk mendapatkan informasi kualitas proses dan hasil belajar melalui pendekatan kontekstual. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang bisa memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar

peserta didik. Dengan terklumpulnya berbagai data dan informasi yang lengkap sebagai perwujudan dari penerapan penilaian, maka akan semakin akurat pula pemahaman guru terhadap proses dan hasil pengalaman belajar setiap peserta didik.

Guru dengan cermat akan mengetahui kemajuan, kemunduran, atau kesulitan peserta didik dalam belajar. Hal tersebut menjadikan guru memiliki kemudahan untuk melakukan upaya perbaikan dan Penyempurnaan proses bimbingan belajar dalam langkah selanjutnya. Mengingat gambaran tentang kemajuan belajar peserta didik diperlukan di sepanjang proses Pembelajaran, maka penilaian tidak hanya dilakukan di akhir program Pembelajaran. Akan tetapi, secara integral dilakukan selama proses program pembelajaran itu terjadi. Dengan cara tersebut, guru secara nyata akan mengetahui tingkat kemampuan siswa yang sebenarnya.

Dalam pembelajaran kontekstual, program pembelajaran merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang oleh guru, yaitu dalam bentuk scenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran. Dalam program tersebut harus tercermin

penerapan dari ketujuh komponen pendekatan kontekstual dengan jelas, sehingga setiap guru memiliki memiliki persiapan yang utuh mengenai rencana yang akan dilaksanakan dalam membimbing kegiatan belajar mengajar di kelas.

Sistem penilaian hasil belajar hingga saat ini, tes tertulis berupa tes objektif dan tes uraian (*essay test*) masih mendominasi pelaksanaan evaluasi hasil belajar siswa di sekolah menengah pertama. Hal tersebut menjadikan hasil belajar sulit untuk maksimal capaiannya.

Penilaian yang berupa tes tertulis menjadi pilihan terbaik yang diandalkan oleh guru. Alasan guru memilih tes tertulis karena penggunaannya lebih praktis, baik dalam penyusunan, cara penyelenggaraannya maupun koreksinya. Namun demikian, dari banyak tinjauan, alat evaluasi konvensional ini dipandang banyak memiliki kelemahan, salah satunya adalah hanya mengukur sebagian kecil saja kemampuan siswa.

Dalam kegiatan penilaian yang dilakukan terjadi ketidakpuasan siswa dalam menerima hasil penilaian yang dilakukan guru, misalnya siswa terkadang tidak puas terhadap penilaian yang dilakukan oleh guru mereka karena tugas

dan hasil ujiannya tidak dikembalikan setelah diperiksa. Hanya ada sebagian tugas yang dikembalikan oleh guru. Hasil penilaian itu pun biasanya tidak dapat siswa jadikan cerminan untuk perkembangan belajar selanjutnya. Oleh karena itu, siswa tidak termotivasi untuk belajar dan mempunyai tanggapan kurang baik terhadap penilaian yan dilakukan guru.

Penerapan teknik penilaian yang kurang menyeluruh untuk mengukur perkembangan yang dicapai siswa selama proses pembelajaran Bahasa Inggris akan menyebabkan rendahnya kualitas hasil belajar bahasa Inggris. Berkaitan dengan hal inilah, maka tugas seorang guru dalam mengevaluasi siswanya, tentu tidak hanya sekadar memberikan tes tertulis, tetapi hendaknya menilai kinerja siswa secara menyeluruh dan komprehensif. Oleh karena itu, guru harus menggunakan alat untuk mengumpulkan informasi tentang unjuk kerja siswa serta mengadakan penilaian secara kontinu terhadap kemajuan yang dicapai siswa dalam belajar. Dalam mengatasi ketidakpuasan siswa terhadap hasil penilaian siswa tersebut, salah satu alat yang baik digunakan adalah penilaian autentik.

Berdasarkan hasil diskusi dengan sesama guru bahasa Inggris SMP Negeri 6 Makassar, maka diperoleh informasi bahwa masalah sistem penilaian inilah yang merupakan salah satu hal yang paling penting untuk segera diatasi. Sistem penilaian autentik merupakan sistem penilaian yang ditawarkan dan diharapkan mampu menjadi solusi terhadap sistem penilaian yang digunakan di SMP Negeri 6 Makassar melalui penelitian tindakan kelas.

Masalah yang diteliti dalam penelitian tindakan ini adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar Bahasa Inggris siswa kelas VII.A SMP Negeri 6 Makassar melalui penilaian autentik? Berdasarkan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas VII.A SMP Negeri 6 Makassar melalui penilaian autentik.

Penilaian autentik (*authentic assessment*) merupakan salah satu komponen dari tujuh komponen dalam pembelajaran dengan pendekatan *contextual Teaching and Learning* (CTL). Keenam komponen lainnya adalah konstruktivisme (*construktivism*), masyarakat belajar (*learning community*), inkuiri,

bertanya (*question*), pemodelan (*modelling*), refleksi. CTL ini merupakan salah satu pendekatan yang sejalan dengan kurikulum berbasis kompetensi dan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sejak tahun 2007. Penerapan pembelajaran yang berbasis kompetensi memerlukan guru yang memahami dan mampu menyajikan satu lingkungan belajar yang dapat membangun dan memperluas pengalaman siswa sebelumnya dan responsif terhadap keragaman tipe pembelajaran siswa.

Menurut Nurgiantoro (2012: 3), penilaian merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan dari kegiatan pembelajaran secara umum. Semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus selalu disertai dengan kegiatan penilaian. Oleh karena itu, kegiatan penilaian harus dilakukan secara terencana dengan baik.

Penilaian merupakan proses yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh itu. Penilaian tersebut dilakukan oleh guru untuk menilai siswa yang mengikuti pembelajaran. Dalam proses belajar-mengajar, penilaian berarti alat ukur untuk mengevaluasi hasil

yang telah dicapai dari proses belajar-mengajar yang dilakukannya.

Pranowo (2015: 227) mengungkapkan bahwa penilaian autentik memberikan tantangan kepada siswa untuk menerapkan informasi dan keterampilan akademik baru dalam situasi nyata untuk tujuan yang bermakna. Penilaian autentik memberikan peluang kepada siswa untuk memperlihatkan kemampuan terbaik mereka sambil memperlihatkan hal yang telah dipelajarinya.

Penilaian autentik memberikan keuntungan kepada siswa untuk (1) mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman materi akademik siswa; (2) memperkuat kompetensi melalui pengumpulan informasi, memanfaatkan segala sumber daya, menanagni teknologi yang diperlukan, dan berpikir sistematis; (3) mengaitkan pelajaran dengan pengalaman hidup; (4) mempertajam keahlian berpikir; (5) menerima tanggung jawab dan membuat alternatif; (6) belajar bekerja sama dengan orang lain dalam mengerjakan tugas. Berbagai penilaian autentik, yaitu portofolio, proyek, unjuk kerja, dan tanggapan tertulis lengkap (Pranowo, 2015: 227-228). Penilaian autentik tersebut dapat meningkatkan kreativitas, inisiatif, pendapat, dan

argumen yang dimiliki siswa yang muncul setiap saat.

Penilaian prestasi siswa yang dapat dijadikan dasar pada penilaian autentik, antara lain: (1) proyek/kegiatan dan laporannya, (2) pekerjaan rumah, (3) kuis, (4) karya wisata, (5) presentasi atau penampilan siswa, (6) demonstrasi, (7) laporan, (8) jurnal, (9) hasil tes tertulis, dan (10) karya tulis siswa. Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas) menyatakan bahwa alat penilaian dalam penilaian autentik berupa pengumpulan kerja siswa (portofolio), hasil karya (produk), penugasan (proyek), kinerja (*performance*), dan tes tertulis (Nurhadi, 2003:53). Bentuk penilaian prestasi siswa yang dipilih untuk dijadikan bentuk penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa Inggris.

Penilaian autentik yang dilakukan pada pembelajaran bahasa Inggris sangat bergantung pada keluasan tujuan. Penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa Inggris dilakukan untuk memaksimalkan penilaian proses dan hasil belajar. Penggunaan penilaian autentik itu menjadi dasar pertimbangan dalam mencapai hasil kemajuan belajar bahasa Inggris siswa kelas VII.A SMP Negeri 6 Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus penelitian dilakukan melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun 2018/2019. Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa Kelas VII.A SMP Negeri 6 Makassar. Jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian sebanyak 32 orang yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 20 orang siswa perempuan.

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan observasi. Pada tahap ini peneliti melaksanakan diskusi awal dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran Bahasa Inggris untuk membahas permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini.

Siklus I

Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus I ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada kegiatan perencanaan dilakukan persiapan untuk mengkaji materi pelajaran Bahasa Inggris siswa kelas VII.A SMP Negeri 6 Makassar berdasarkan Implementasi

kurikulum 2013, yang meliputi persiapan rencana pembelajaran, pengalokasian waktu dengan menyesuaikan antara waktu yang tersedia dalam kurikulum dengan waktu penelitian. Setelah itu, menetapkan dan mempersiapkan jenis-jenis penilaian yang akan dilakukan sesuai dengan materi yang akan diajarkan, yaitu KD 3.4 Memahami tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks lisan dan tulis untuk menyebut nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun.

Penilaian yang dilakukan adalah jenis penilaian autentik yang sesuai dengan hasil diskusi antara sesama guru mata pelajaran bahasa Inggris. Penilaian autentik dilakukan terhadap tugas yang dikerjakan siswa di kelas dan di rumah, jurnal, keterampilan proses, ulangan harian, serta mempersiapkan lembar observasi perilaku dan kreativitas siswa. Setelah menentukan penilaian, dilanjutkan dengan menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan format yang berlaku di SMP Negeri 6 Makassar.

Pelaksanaan tindakan dilakukan dengan menginformasikan kepada siswa menenai penilaian autentik. Pada pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran difokuskan pada langkah-

langkah kegiatan dan penilaian autentik yang telah disusun di dalam RPP.

Kegiatan observasi atau pengamatan dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi untuk melihat perilaku dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Pada kegiatan observasi itu juga dilakukan untuk melihat pengembangan aktivitas siswa dalam belajar sesuai dengan lembar pengamatan keaktifan siswa; pemberian tugas kepada siswa dalam bentuk lembaran kegiatan siswa (LKS), kuis, jurnal, dan pengumpulan data pengetahuan siswa pada saat siswa menjawab pertanyaan dengan menggunakan lembar pengamatan. Demikian juga mengenai tugas-tugas belajar siswa seperti pada kuis, dan evaluasi diri selama siklus I. Lembar pekerjaan siswa dikembalikan kepada siswa setelah diperiksa dan diberi nilai kemudian diarsipkan dalam bentuk portofolio. Pemeriksaan hasil belajar siswa dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar yang dicapai siswa pada siklus I. Pada kegiatan pembelajaran di akhir siklus I, siswa diberi tes hasil belajar atau ulangan harian untuk mengukur capaian hasil belajar siswa pada siklus I.

Refleksi dilakukan untuk mengevaluasi data yang diperoleh dari hasil belajar siswa pada setiap komponen penilaian autentik. Hasil refleksi pembelajaran dijadikan acuan untuk membuat rencana tindakan yang akan dilakukan pada siklus II.

Siklus II

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini adalah kompetensi dasar keterampilan, yaitu KD 4.4 Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan jati diri, sangat pendek dan sederhana, dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara benar, dan sesuai dengan konteks. Kompetensi dasar keterampilan ini diajarkan dalam dua kali pertemuan yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

Pembelajaran pada siklus II dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari siswa sebagai subjek penelitian. Pada siklus II ini dilakukan tes untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh pada siklus II menjadi lebih meningkat.

HASIL PENELITIAN

Kegiatan pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan di kelas VII.A pada SMP Negeri 6 Makassar menunjukkan hasil sebagai berikut. Pada siklus I dilakukan pembelajaran bahasa Inggris dua kali pertemuan. Pada pembelajaran yang dilakukan terjadi perubahan hasil belajar basa Inggris dari siklus I ke siklus II. Data kualitatif yang diperoleh dari lembar pengamatan pada setiap pertemuan yang dicatat oleh pengamat pada setiap siklus. Frekuensi kehadiran siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II (rata-rata kehadiran sebesar 94% pada siklus I dan 97% pada siklus II). Hal ini menunjukkan keseriusan siswa untuk mengikuti pelajaran Bahasa Inggris karena seluruh siswa yan berjumlah 32 orang semuana hadir.

Perhatian siswa pada saat guru membahas materi pelajaran mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya siswa yang melibatkan diri dan aktif memberi tanggapan terhadap pertanyaan guru maupun jawaban dari siswa pada proses belajar-mengajar. Frekuensi siswa yang meminta untuk dijelaskan ulang materi yang kurang dipahami semakin berkurang. Siswa yang masih memerlukan

bimbingan dalam menyelesaikan soal-soal latihan sebanyak 18 orang siswa pada siklus I dan sebanyak 4 orang siswa pada siklus II. Keberanian dan semangat siswa dalam menjawab pertanyaan mengenai materi pelajaran bahasa Inggris juga mengalami peningkatan, terlihat dari sejumlah siswa yang mengajukan diri atau mengacungkan tangan berulang-ulang untuk memberi jawaban.

Keaktifan siswa dalam berdiskusi dalam kelompoknya dan membantu temannya mengerjakan soal latihan mengalami peningkatan. Demikian juga jumlah siswa yang mengajukan diri untuk membantu temannya menyelesaikan soal di papan tulis semakin meningkat jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Hasil Belajar Siswa pada Siklus I

Hasil belajar bahasa Inggris pada siklus I dengan membahas KD 3.4 Memahami tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks lisan dan tulis untuk menyebut nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Skor rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I tersebut adalah 71,23 dari skor yang dicapai yaitu 100

dengan skor tertinggi yang dicapai adalah 84,25 sedangkan skor terendah adalah 52,48. Setelah dilakukan kategorisasi, terlihat bahwa dari 32 orang siswa yang dijadikan subjek penelitian tidak terdapat siswa yang berada pada kategori sangat rendah, hanya 1 orang siswa atau 3,12% berada pada kategori rendah, 2 orang siswa atau 6,25% berada pada kategori sedang, 24 orang siswa atau 75 % berada pada kategori tinggi, dan 5 orang siswa atau 15% berada pada kategori sangat tinggi.

Hasil Belajar Bahasa Inggris pada Siklus II

Hasil belajar bahasa Inggris siswa pada siklus II dengan pembasan mengenai kompetensi dasar: KD 4.4 Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan jati diri, sangat pendek dan sederhana, dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebaasaan, secara benar, dan sesuai dengan konteks adalah 76,2. Skor ideal yang dicapai yaitu 100. Skor tertinggi yang dicapai siswa 94,23 sedangkan skor terendah 75,00. Dari 32 orang siswa dari setiap komponen penilaian autentik pada siklus II menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang berada pada kategori sangat rendah, 1 orang siswa atau 3,12% siswa yang berada pada kategori sedang, 20 orang siswa atau 62,5% yang berada pada

kategori tinggi, 11 orang siswa atau 34,37% yang berada pada kategori sangat tinggi. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa setelah pemberian tindakan selama dua siklus, skor rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Data ini menunjukkan bahwa hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas VII SMP Negeri 6 Makassar dapat ditingkatkan melalui penilaian autentik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar bahasa Inggris yang diperoleh siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Peningkatan hasil belajar siswa tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris dengan penilaian autentik sangat tepat untuk digunakan sebagai tindakan dalam memecahkan masalah pembelajaran bahasa Inggris.

Pada pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan siswa diberi kebebasan untuk memilih topik sendiri dalam membuat jurnal, meningkatkan pemberian soal latihan disertai langkah penyelesaiannya, dan memberikan bimbingan dalam melakukan unjuk kerja dan lebih mengembangkan aktivitas siswa dalam

kegiatan pembelajaran. Hal yang demikian dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris pada siswa Kelas VII SMP Negeri 6 Makassar.

Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan penilaian autentik dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas VII SMP Negeri 6 Makassar, sehingga disarankan guru untuk menggunakan penialain autentik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Penilaian autentik yang digunakan guru, hendaknya ditentukan bentuk penilaian yang tepat atau bervariasi sehingga tepat digunakan dalam proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Basleman, Anisah dan Syamsu Mappa. 2011. *Teori Belajar Orang*

- Dewasa. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ghofar A, 2003, *Pola Induk Pengembangan Sistem Penilaian*. Proyek Peningkatan Mutu Sulawesi Selatan. Makassar
- Nurgiantoro, Burhan. 2012. Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi. Yogyakarta: BPFE.
- Nurhadi, 2003. Peningkatan Kontesktual (*Contextual Teaching And Learning*) Direktorat Pendidikan Lanjutan Atas.
- Paidi, 2000, *Implementasi Authentic Assesment dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Lanjutan Atas*. Universitas Yogyakarta.
- Pranowo. 2015. *Teori Belajar Bahasa untuk Guru Bahasa dan Mahasiswa Jurusan Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Harun dan Mansur. 2007. *Penilaian Hasil Belajar*. Bandun: CV Wacana Prima.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.

IMPLEMENTASI PENILAIAN BERORIENTASI HOTS PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA

Mansur HR
Widyaiswara LPMP SULSEL

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengembangkan keterampilan guru ekonomi dalam mengimplementasikan penilaian berorientasi HOTS. Penilaian HOTS adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekadar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, akan tetapi kemampuan berpikir secara kritis, kreatif dan mampu memecahkan masalah. Karakteristik soal HOTS adalah: (1) mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi; (2) berbasis permasalahan kontekstual; (3) menggunakan bentuk soal beragam; (4) tidak rutin dan mengusung kebaruan. Pembuatan soal HOTS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS; (2) menyusun kisi-kisi soal; (3) memilih stimulus yang menarik dan kontekstual; (4) menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal; dan (5) membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Contoh implementasi penilaian berorientasi HOTS pada mata pelajaran ekonomi dapat dilihat pada "KD 3.2 Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi" yang diuraikan dalam tulisan ini.

Kata kunci: implementasi, soal hots, kompetensi dasar ekonomi.

Kurikulum 2013 (K-13) dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia (Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018). Untuk mencapai hal tersebut, maka K-13 menerapkan pembelajaran berbasis aktivitas yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*.

Pembelajaran berbasis aktivitas adalah kegiatan pembelajaran yang

menekankan pada aktivitas siswa secara optimal yang meliputi aktivitas fisik, aktivitas mental, aktivitas emosional, dan aktivitas sosial (Kosasih, 2016). Aktivitas fisik dapat berupa aktivitas mengamati, mendengarkan, menyentuh, dan aktivitas fisik lainnya. Sementara aktivitas mental, dapat berupa aktivitas bertanya, memikirkan, menyimpulkan, menilai, presentasi. Adapun aktivitas emosional, dapat berupa aktivitas menanggapi, merefleksi, sedangkan aktivitas sosial, misalnya berdiskusi, menyatakan simpati, kerjasama kelompok, dan aktivitas sosial lainnya.

Pembelajaran berbasis aktivitas sudah diterapkan sejak Kurikulum 1984 melalui penerapan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), namun secara umum aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut belum berorientasi *HOTS*. Tugas-tugas yang dikerjakan siswa di kelas umumnya masih berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat rendah atau *Lower Order Thinking Skill (LOTS)*, seperti mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang jawabannya hanya menyalin dari buku siswa tanpa harus berpikir kritis, menganalisis atau mengkreasi. Namun pembelajaran berbasis aktivitas yang dikembangkan dalam K-13 adalah pembelajaran berbasis aktivitas yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau *HOTS*.

HOTS merupakan proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar (Resnick dalam Ariyana, 2018). Sejalan dengan pendapat tersebut Thomas dan Thorne (dalam Nugroho, 2019) mengemukakan bahwa *HOTS* merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafalkan fakta, mengemukakan fakta,

atau menerapkan peraturan, rumus, dan prosedur. *HOTS* mengharuskan peserta didik melakukan sesuatu berdasarkan fakta, membuat keterkaitan antarfakta, mengkategorikannya, memanipulasinya, menempatkannya pada konteks atau cara yang baru, dan mampu menerapkannya untuk mencari solusi baru terhadap sebuah permasalahan.

Menurut Brookhart (dalam Nugroho, 2019:17), didasarkan pada tujuan pembelajaran di kelas, *HOTS* terdiri dari: (1) *HOTS* sebagai transfer pengetahuan (*HOTS as transfer of knowledge*); (2) *HOTS* sebagai berpikir kritis (*HOTS as critical thinking*), dan 3) *HOTS* sebagai pemecahan masalah (*HOTS as problem solving*). Lebih lanjut Brookhart (2019) menguraikan bahwa *HOTS* sebagai transfer pengetahuan didefinisikan sebagai keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikembangkan dalam pembelajaran pada konteks yang baru. *HOTS* sebagai transfer pengetahuan mencakup keterampilan menganalisis (*analyzing*), mengevaluasi (*evaluating*), dan mencipta (*creating*). Sementara *HOTS* sebagai berpikir kritis didefinisikan sebagai keterampilan memberikan penilaian yang bijak dan mengkritisi sesuatu menggunakan alasan

yang logis dan ilmiah. Adapun *HOTS* sebagai pemecahan masalah didefinisikan sebagai keterampilan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah menggunakan strategi yang tidak rutin. Dari beberapa pengertian *HOTS* yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran *HOTS* adalah pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, dan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pembelajaran *HOTS* yang diterapkan dalam K-13, tentunya akan berimplikasi pada pelaksanaan penilaian. Untuk menilai *HOTS* peserta didik, maka penilaian yang dikembangkan haruslah penilaian yang berorientasi *HOTS* pula. Akan sulit mengembangkan *HOTS* peserta didik jika instrumen penilaian yang digunakan hanya untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah atau *LOT* seperti kemampuan mengingat, memahami, dan/ atau menerapkan. Oleh karena itu pembelajaran dan penilaian yang berorientasi *HOTS* harus keduanya berjalan beriringan.

Dari hasil supervisi mutu pendidikan yang dilakukan oleh LPMP Sulawesi Selatan terhadap satuan pendidikan dasar

dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019, diperoleh informasi bahwa salah satu Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang secara umum nilainya masih di bawah kategori SNP (6,667-7,00) adalah Standar Penilaian. Permasalahan yang hampir sama ditemukan dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemdikbud tentang implementasi K-13 di satuan pendidikan yang menyimpulkan bahwa, permasalahan utama yang dihadapi satuan pendidikan adalah pada penilaian hasil belajar peserta didik (Kemdikbud, 2015).

Implementasi penilaian berorientasi *HOTS* masih menjadi kendala utama bagi guru pada aspek penilaian dalam menerapkan K-13. Miskonsepsi tentang soal *HOTS* masih sering terjadi. Ada yang menyatakan bahwa soal yang sulit selalu menunjukkan level *HOTS*. Padahal soal yang sulit dijawab belum tentu bisa mengukur *HOTS*. Begitu pula sebaliknya soal *HOTS* tidak harus sulit untuk dijawab. Ada pula yang beranggapan bahwa soal pilihan ganda tidak dapat digunakan untuk menilai *HOTS* secara valid. Anggapan ini juga kurang tepat, karena soal pilihan ganda bisa digunakan untuk menilai level kognisi rendah sampai tinggi. Seringkali pula terjadi bahwa soal yang dibuat

bertujuan untuk mengukur *HOTS*, tetapi jenis soal tersebut telah didiskusikan sebelumnya pada saat pembelajaran di kelas. Hal ini hanya mengubah level soal dari *HOTS* menjadi *LOTS*, karena siswa hanya mengingat pembahasan soal yang pernah dilakukan. Masalah tersebut dialami oleh hampir semua guru termasuk guru Ekonomi di SMA.

Berdasarkan uraian tersebut, maka informasi tentang penilaian berorientasi *HOTS* masih merupakan hal yang urgen untuk disampaikan kepada guru. Untuk maksud tersebut, maka dalam tulisan ini penulis menguraikan konsep penilaian *HOTS*, karakteristik dan langkah-langkah penyusunan soal *HOTS*, serta penyusunan soal *HOTS* pada mata pelajaran Ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengembangkan keterampilan guru Ekonomi dalam mengimplementasikan penilaian berorientasi *HOTS* pada mata pelajaran Ekonomi di SMA.

PEMBAHASAN

Konsep Penilaian Berorientasi HOTS

Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, dinyatakan bahwa Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar

peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Sementara penilaian pengetahuan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Adapun penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

Seiring dengan pembelajaran yang berorientasi *HOTS* yang ditekankan dalam K-13 untuk meningkatkan kemampuan peserta didik berpikir analitis, kritis dan kreatif, maka penilaian yang dikembangkan pun harus berorientasi *HOTS*. Istilah *HOTS* muncul dari dimensi proses kognitif dalam Taksonomi Bloom. Menurut Ariyana (2018), dimensi proses kognitif dalam Taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl terdiri atas kemampuan: mengingat (*remembering* = C1), memahami (*understanding* = C2), menerapkan (*applying* = C3), menganalisis (*analyzing* = C4), menilai/mengevaluasi (*evaluating* = C5), dan mengkreasi/

mencipta (*creating* = C6). Dari proses kognitif tersebut, Bloom membagi keterampilan menjadi dua, yakni: (1) keterampilan berpikir tingkat rendah (*LOTS*) yaitu mengingat (C1), memahami (C2), dan menerapkan (C3); dan (2) keterampilan berpikir tingkat tinggi (*HOTS*) yaitu menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengkreasi atau mencipta (C6).

Untuk mengenali tingkatan kemampuan berpikir peserta didik dalam proses pembelajaran, Bloom (dalam Ariyana, 2018:10) telah mengenalkan kata kerja operasional (KKO) yang bisa digunakan sebagai panduan. Namun untuk mengukur level kognisi sebuah soal, apakah *LOTS* atau *HOTS*, tidak hanya dilihat dari KKO atau kata kerja bantu yang digunakan pada soal tersebut, tetapi juga harus dilihat esensinya. Misalnya, penggunaan kata kerja bantu “*jelaskan*”, bisa berada pada beberapa level kognisi, tetapi yang menentukan adalah esensinya. Contoh soal nomor (1) pada mata pelajaran ekonomi: Jelaskan pengertian kelangkaan! Soal ini berada pada level “memahami (C-2)”. Namun untuk contoh soal nomor (2) Jelaskan solusi terbaik untuk mengatasi kelangkaan! Soal ini berada pada level “mencipta (C-6)”. Contoh soal tersebut

menunjukkan bahwa bisa saja kata kerja bantu yang digunakan pada dua nomor soal sama, namun level kognitifnya berbeda.

Perbedaan penafsiran sering muncul ketika guru menentukan kata kerja bantu atau KKO yang akan digunakan dalam penulisan indikator soal. Untuk meminimalkan perbedaan penafsiran tersebut, Puspendik (dalam Widana, 2017) mengklasifikasikan proses kognitif menjadi 3 level, yaitu: Level-1 adalah pengetahuan dan pemahaman; Level-2, adalah aplikasi; dan Level-3 adalah penalaran. Level-1 mencakup dimensi proses berpikir mengingat (C1) dan memahami (C2), sedangkan Level-2 adalah dimensi proses berpikir menerapkan atau mengaplikasikan (C3). Sementara Level-3 mencakup analisis (C4), evaluasi (C5) dan mencipta atau mengkreasi (C6). Level 1 dan 2 adalah level kemampuan berpikir tingkat rendah (*LOTS*), sementara Level-3 (penalaran) merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi (*HOTS*) karena untuk menjawab soal-soal pada level-3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk

memecahkan masalah-masalah kontekstual

Penilaian hasil belajar dalam K-13 diharapkan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*HOTS*), karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran. Oleh karena itu, maka penilaian yang dikembangkan dalam K-13 adalah penilaian berorientasi *HOTS*. Menurut Widana (2017), penilaian berorientasi *HOTS* adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekadar mengingat (*recall*), menyatakan kembali (*restate*), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (*recite*). Soal-soal *HOTS* pada konteks asesmen lanjut Widana (2017), mengukur kemampuan: (1) transfer dari satu konsep ke konsep lainnya; (2) memproses dan menerapkan informasi; (3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda; (4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah; (5) menelaah ide dan informasi secara kritis. Meskipun demikian soal-soal berorientasi *HOTS* tidak berarti soal yang lebih sulit dari pada soal *recall* (mengingat).

Dilihat dari dimensi pengetahuan, umumnya soal *HOTS* mengukur dimensi metakognitif, tidak sekadar dimensi faktual, konseptual dan prosedural saja (Setiawati, 2019). Lebih lanjut Setiawati (2019) menguraikan bahwa dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah, memilih strategi pemecahan masalah, menemukan metode baru, berargumen dan mengambil keputusan yang tepat.

Dari beberapa pengertian tentang penilaian *HOTS*, maka dapat dikemukakan bahwa Penilaian *HOTS* adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekadar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, akan tetapi kemampuan berpikir secara kritis, kreatif dan mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu dalam penyusunan soal *HOTS* umumnya menggunakan stimulus sebagai dasar untuk membuat pertanyaan yang dapat merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis.

Karakteristik Soal *HOTS*

Soal *HOTS* adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena soal *HOTS* memiliki karakteristik yang membedakannya dengan soal *LOTS*. Menurut Widana (2017) karakteristik soal *HOTS* adalah sebagai berikut:

Pertama, Mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajaran yang dikembangkan di kelas adalah pembelajaran berbasis aktivitas yang penekanannya pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*HOTS*). Pembelajaran berbasis aktivitas memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas, membangun kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Untuk mengukur keterampilan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi, maka soal yang digunakan dalam penilaian hasil

belajar peserta didik adalah soal *HOTS*, yakni soal level kognitif-3 yang meliputi kemampuan untuk menganalisis (C-4), evaluasi (C-5), dan mencipta atau mengkreasi (C-6).

Kedua, Berbasis permasalahan kontekstual dan menarik. Soal-soal *HOTS* merupakan penilaian yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, dimana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Dalam pengertian tersebut termasuk pula bagaimana keterampilan peserta didik untuk menghubungkan, menginterpretasikan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata. Widana (2017) menguraikan bahwa asesmen kontekstual memiliki lima karakteristik, yakni : (1) *relating*, yakni asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata; (2) *experiencing*, yakni asesmen yang ditekankan kepada penggalian (*exploration*), penemuan (*discovery*), dan penciptaan (*creation*); (3) *applying*, yakni asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah

nyata; (4) *communicating*, yakni asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konsteks masalah; (5) *transferring*, yakni asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru.

Ketiga, Menggunakan bentuk soal beragam. Menurut Widana (2017), bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes (soal-soal *HOTS*) sebagaimana digunakan dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)*, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Hal ini penting diperhatikan oleh guru agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip objektif, artinya hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal *HOTS*, yakni: (1) pilihan ganda; (2) pilihan ganda kompleks (benar/salah, atau ya/tidak); (3) isian singkat atau melengkapi; (4) jawaban singkat atau pendek; (5) uraian.

Selain dari ketiga karakteristik soal *HOTS* tersebut, Subekti dan Krisnawati (2019) menambahkan karakteristik yang *keempat*, yakni Tidak Rutin dan Mengusung Kebaruan. Bahwa salah satu tujuan penyusunan soal-soal *HOTS* adalah untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontekstual. Oleh karena itu soal-soal *HOTS* tidak dapat diujikan berulang-ulang pada peserta tes yang sama. Apabila suatu soal yang awalnya merupakan soal *HOTS* diujikan berulang-ulang pada peserta tes yang sama, maka proses berpikir peserta didik menjadi menghapal dan mengingat. Soal tersebut tidak lagi mendorong terjadinya proses berpikir tingkat tinggi. Bahkan soal tersebut tidak lagi mampu menggali ide-ide orisinal yang dimiliki peserta tes untuk menyelesaikan masalah. Sementara soal-soal yang tidak rutin dapat dikembangkan dari Kompetensi Dasar (KD) tertentu dengan memvariasikan stimulus yang bersumber dari berbagai topik. Pokok pertanyaan soal tersebut tetap mengacu pada kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan tuntutan pada KD.

Langkah-langkah Penyusunan Soal HOTS

Tabel 1. Format Analisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran		
No	Kompetensi Dasar	Level Kognitif

Dalam penyusunan soal *HOTS*, dibutuhkan penguasaan materi pelajaran, keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal berdasarkan hal yang sedang hangat dibicarakan pada saat itu (*trending topic*) atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. Menurut Kemdikbud (2017), langkah-langkah penyusunan soal *HOTS* adalah sebagai berikut;

Pertama, Menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal *HOTS*. Cara menganalisis KD adalah, terlebih dahulu mengutip KD mata pelajaran pada Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang KI dan KD pelajaran K-13. Selanjutnya menganalisis “kemampuan” yang ingin dicapai dengan mencermati “kata kerja bantu” yang ada pada KD tersebut, apakah berada pada level-1 (C-1 dan C-2), level-2 (C-3) atau level-3 (C-4, C-5, dan C-6). KD yang berada pada level-3 dapat dibuatkan soal *HOTS*, sedangkan

KD yang berada pada level 1 dan 2, tidak dapat dibuatkan soal *HOTS*. Namun menurut Setiawati (2019) untuk mengembangkan soal *HOTS* pada KD level 1 dan 2, terlebih dahulu harus dirumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pengayaan dengan tingkat kognitif C-4, C-5, atau C-6. Hasil analisis KD dituangkan dalam format analisis.

Kedua, Menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang hendak disusun. Kisi-kisi penulisan soal *HOTS* bertujuan untuk membantu para guru dalam menulis butir soal *HOTS*. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam: (a) memilih KD yang dapat dibuatkan soal *HOTS*, (b) memilih materi yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan KD yang akan diukur, (c) merumuskan indikator soal yang berisi stimulus dan ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal, (d) menentukan level kognitif, (e) menentukan bentuk soal, dan (f) menuliskan nomor soal. Adapun format kisi-kisi soal *HOTS* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Format Kisi-Kisi Soal						
Mata Pelajaran: Kelas/Semester:						
No	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
.....
.....
Mengetahui Kepala Sekolah,	Guru Mata Pelajaran,

Ketiga, Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Dalam penyusunan soal *HOTS* umumnya menggunakan stimulus. Stimulus merupakan dasar untuk membuat pertanyaan. Dalam konteks *HOTS*, stimulus yang disajikan hendaknya menarik dan kontekstual. Stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca oleh peserta didik atau isu-isu yang sedang mengemuka. Sedangkan stimulus yang kontekstual adalah stimulus yang diangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar satuan pendidikan, seperti budaya, adat, kasus-kasus di daerah, atau berbagai keunggulan yang terdapat di daerah tertentu. Menurut Subekti dan Krisnawati (2019), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun stimulus soal *HOTS*: (1) memilih beberapa informasi, dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus; (2) stimulus hendaknya menuntut kemampuan untuk menginterpretasi,

mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan; (3) memilih kasus/ permasalahan kontekstual dan menarik yang memotivasi peserta didik untuk membaca dan: (4) stimulus terkait langsung dengan pertanyaan (pokok soal) dan berfungsi. Stimulus dapat ditulis dalam format sebagai berikut:

Tabel 3. Format Stimulus Mata Pelajaran				
No	Kompetensi Dasar	Stimulus	Kemampuan yang diuji	Tahapan Berpikir
.....
.....

Pengisian tabel 3 tentang format stimulus untuk soal *HOTS* dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Nomor, diisi dengan nomor urut KD yang akan dibuatkan soal *HOTS*; (2) KD, diisi dengan KD yang dikutip dari Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018 ; (3) Stimulus, diisi dengan bentuk stimulus yang dipilih (gambar, grafik, tabel, hasil percobaan, kurva, wacana, atau kasus); (4) kemampuan yang diuji, diisi dengan kemampuan yang berada level kognitif-3 (*HOTS*) yang akan diujikan; dan (5) tahapan berpikir, diisi dengan tahapan berpikir yang harus dilalui/dikuasai peserta didik untuk

sampai pada tahapan berpikir *HOTS* sesuai kemampuan yang akan diujikan.

Tabel 4. Format Kartu Soal	
Mata Pelajaran	:
Kelas/Semester	:
Kurikulum	:
Kompetensi Dasar	
Materi	
Indikator Soal	
Level Kognitif	
Butir Soal:	
Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran:	

Keempat, Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal *HOTS*. Kaidah penulisan butir soal *HOTS*, pada dasarnya hampir sama dengan kaidah penulisan soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi (misalnya pada kisi-kisi soal *HOTS*, soal menggunakan stimulus yang menarik dan kontekstual, mengukur level kognitif penalaran, tidak rutin/familiar dan mengusung kebaruan). Sementara pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal. Kartu soal memuat: (a) mata pelajaran; (b) kelas/semester; (c) kurikulum yang dijadikan acuan penulisan soal; (d) kompetensi dasar; (e) materi pelajaran yang akan dibuat soalnya; (f) indikator soal; (g) level kognitif dari soal

yang dibuat; (h) butir soal; dan (i) kunci jawaban/pedoman penskoran. Format kartu soal *HOTS* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Format Pedoman Penskoran		
No	Uraian Jawaban/Kata Kunci	Skor
	Jumlah Skor	

Kelima, Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban. Setiap butir soal *HOTS* yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian. Sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah, ya/tidak), dan isian singkat. Format Pedoman Penskoran adalah sebagai berikut:

Penyusunan Soal *HOTS* pada Mata Pelajaran Ekonomi

Berdasarkan kriteria dan langkah-langkah penyusunan soal *HOTS* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berikut ini disajikan contoh penyusunan soal *HOTS* pada mata pelajaran Ekonomi di SMA.

Tabel 6. Contoh Analisis KD Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI

No	Kompetensi Dasar	Level Kognitif
1	3.1 Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi	L-1 (C-2)
2	3.2 Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi	L-3 (C-4)
3	dan seterusnya

Pertama, Menganalisis KD mata pelajaran Ekonomi yang dapat dibuatkan soal *HOTS*.

Berdasarkan tabel 6 di atas, diperoleh informasi bahwa kemampuan yang ingin dicapai pada KD 3.1, adalah “mendeskripsikan”, sedangkan materinya adalah “konsep ilmu ekonomi”. Kemampuan “mendeskripsikan” tersebut berada pada level-1 (C-2) yakni “memahami”, dengan demikian KD ini berada pada kategori *LOTS*. Sementara kemampuan yang ingin dicapai pada KD 3.2 adalah “menganalisis” dan materinya adalah “masalah ekonomi dalam sistem

ekonomi”. Kemampuan “menganalisis” berada pada level 3 (C-4) atau kategori *HOTS*. Dengan demikian, soal yang harus dikembangkan untuk KD 3.2 adalah soal *HOTS*.

Kedua, Menyusun kisi-kisi soal. Setelah teridentifikasi KD yang berada pada level-3, langkah berikutnya adalah membuat kisi-kisi sebagai panduan dalam mengembangkan soal, khususnya soal *HOTS*. Berikut ini adalah contoh kisi-kisi soal *HOTS* untuk KD 3.2 berdasarkan hasil analisis KD yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 7. Contoh Kisi-Kisi Soal *HOTS*

Mata Pelajaran: Ekonomi
Kelas/Semester: XI

No	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	3.2 Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi	Masalah Ekonomi - Inti masalah Ekonomi (Kelangkaan)	Disajikan sebuah kasus yang berkaitan dengan kelangkaan, peserta didik dapat menyimpulkan penyebab terjadinya kelangkaan	3 (C-4)	PG	1

		tersebut dengan tepat		
Masalah Pokok Ekonomi: - Barang apa yang diproduksi - Bagaimana cara memproduksi barang tersebut - Untuk siapa barang tersebut diproduksi	Disajikan permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi dalam mengembangkan sebuah usaha, peserta didik dapat menyimpulkan masalah pokok ekonomi yang ada pada kasus tersebut dengan tepat	3 (C-4)	PG	2
	Disajikan kasus tentang daya beli masyarakat pedesaan yang rendah, dihadapkan dengan tingginya harga barang kebutuhan (selain harga hasil pertanian), peserta didik dapat menjelaskan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut dengan benar	3 (C-6)	Uraian	3

Tabel 7 di atas memberikan informasi bahwa, materi pokok untuk KD 3.2 adalah “masalah ekonomi dalam sistem ekonomi”, yang terdiri dari dua sub materi pokok (uraian materi), yakni “inti masalah ekonomi” dan “masalah pokok ekonomi”. Indikator soal yang

dikembangkan untuk materi “inti masalah ekonomi” berada pada C-4 (menganalisis) sedangkan bentuk soalnya adalah PG dan nomor soal adalah soal nomor 1. Sementara materi “masalah pokok ekonomi” terdiri dari dua indikator, yakni indikator (2) sekaligus

soal nomor 2, dan indikator (3) yang sekaligus menjadi soal nomor 3. Indikator (2) berada pada level C-4 (menganalisis) dan bentuk soalnya PG, sedangkan indikator (3) berada pada level C-6 (mencipta) dan bentuk soalnya adalah uraian.

Ketiga, Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus (dasar

pertanyaan) bisa berupa gambar, grafik, tabel, hasil percobaan, kurva, wacana, atau kasus yang dapat merangsang/memotivasi peserta didik berpikir sebelum menentukan pilihan jawaban. Berikut ini adalah contoh stimulus untuk KD 3.2 yang akan dibuatkan soal *HOTS*.

Tabel 8. Contoh Stimulus untuk soal *HOTS*

No	Kompetensi Dasar	Stimulus	Kemampuan yang diuji	Tahapan Berpikir
1	3.2 Menganalisis	Disajikan sebuah kasus yang berkaitan dengan ekonomi kelangkaan dalam sistem ekonomi	Menyimpulkan penyebab terjadinya kelangkaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan pengertian kelangkaan • Mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan • Menerapkan cara mengatasi kelangkaan • Menyimpulkan kasus yang berkaitan dengan kelangkaan
		Disajikan permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi dalam mengembangkan usahanya,	Menyimpulkan masalah pokok ekonomi modern yang ada pada kasus tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan pengertian masalah ekonomi • Mengidentifikasi 3 masalah pokok ekonomi • Menjelaskan dan memberikan contoh 3 masalah pokok ekonomi • Menyimpulkan hasil analisis masalah pokok ekonomi yang dihadapi pelaku ekonomi
		Disajikan kasus tentang daya beli masyarakat pedesaan yang rendah, dihadapkan dengan tingginya harga barang kebutuhan (selain harga hasil pertanian)	Menjelaskan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi masalah pokok ekonomi • Menjelaskan dan memberikan contoh 3 masalah pokok ekonomi • Memberikan contoh cara mengatasi suatu masalah ekonomi • Menjelaskan solusi mengatasi masalah rendahnya daya beli masyarakat pedesaan yang dihadapkan dengan tingginya harga barang kebutuhan.

Dari tabel 8 di atas, diperoleh informasi bahwa stimulus yang dikembangkan dari KD 3.2 adalah studi kasus atau masalah yang kontekstual. Sementara kemampuan yang diuji untuk stimulus-1 dan stimulus-2 adalah “menyimpulkan”. “Menyimpulkan” merupakan salah satu kata kerja operasional (KKO) yang digunakan untuk mengukur kemampuan “menganalisis” sebagaimana kemampuan yang ingin dicapai pada KD 3.2. Adapun kemampuan yang diuji untuk stimulus-3 adalah “menjelaskan”. KKO “menjelaskan” bisa berada pada beberapa “level kognitif”, namun dalam menentukan level kognitif sebuah indikator soal, tidak hanya melihat KKO atau kata kerja bantu yang ada pada indikator tersebut, tetapi juga harus melihat esensinya. Kata kerja bantu “menjelaskan” pada indikator “menjelaskan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi” berada pada level kognitif-6 (mencipta), karena pada konteks ini peserta didik diminta mencari dan menemukan serta menjelaskan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Kemampuan “menemukan solusi” termasuk kemampuan “mengkreasi atau mencipta” (C-6). Adapun tahapan

berpikir yang dimaksud pada tabel 8, adalah tahapan berpikir yang harus dilalui atau dikuasai peserta didik untuk sampai pada kemampuan yang diuji. Sebagai contoh, jika kemampuan yang diuji adalah “menyimpulkan penyebab terjadinya kelangkaan”, maka sebelum peserta didik mampu mencapai kemampuan tersebut, terlebih dahulu peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan, menerapkan cara mengatasi kelangkaan baru bisa sampai pada kemampuan “menyimpulkan penyebab terjadinya kelangkaan” tersebut.

Keempat, Menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal.

KARTU SOAL (Pilihan Ganda)	
Mata Pelajaran : Ekonomi	Kelas/Semester : X/1
Kurikulum : 2013	
Kompetensi Dasar : 3.2 Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi	
Materi : Inti masalah ekonomi (Kelangkaan)	
Indikator Soal : Disajikan sebuah kasus yang berkaitan dengan kelangkaan, peserta didik dapat menyimpulkan penyebab terjadinya kelangkaan tersebut	
Level Kognitif : 3	
Butir Soal:	
1. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, bahkan pada tahun 90-an Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan, dimana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Namun saat ini, Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Dari ilustrasi diatas, maka terjadinya kelangkaan disebabkan oleh faktor....	
A. perbedaan letak geografis B. pertumbuhan penduduk C. kemampuan produksi D. sumber daya alam yang terbatas E. kurangnya sumber daya manusia	
Kunci Jawaban:	
B	

Soal di atas dikategorikan soal HOTS karena: (1) stimulus yang disajikan

kontekstual dan menarik karena sesuai dengan dinamika perkembangan perekonomian Indonesia khususnya dalam penyediaan beras sebagai kebutuhan pokok; (2) untuk dapat menjawab soal di atas, terlebih dahulu peserta didik harus dapat menjelaskan konsep “kelangkaan”, mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan, menerapkan cara mengatasi “kelangkaan”, kemudian menganalisis kasus “kelangkaan” pada soal tersebut untuk menentukan jawaban yang tepat.

KARTU SOAL (Pilihan Ganda)	
Mata Pelajaran : Ekonomi	
Kelas/Semester : X/1	
Kurikulum : 2013	
Kompetensi Dasar	3.2 Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi
Materi	Masalah Pokok Ekonomi Modern
Indikator Soal	Disajikan permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi, peserta didik dapat menyimpulkan masalah pokok ekonomi modern yang ada pada kasus tersebut
Level Kognitif	3
Butir Soal:	
2. Permasalahan yang dihadapi ibu Astuty dalam mengembangkan usaha penjualan kue bolu yang dirintisnya adalah:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. kesulitan menentukan varian kue bolu yang akan diproduksi 2. mengapa Astuty ingin memproduksi kue bolu? 3. distribusi kue bolu yang masih mengalami kesulitan 4. menentukan cara atau teknik untuk memproduksi kue bolu yang lebih efisien 5. memilih sasaran konsumen yang akan mengkonsumsi kue bolu yang diproduksinya 	
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk dalam masalah pokok ekonomi yang dihadapi ibu Astuty adalah ...	
<p>A. (1), (2), dan (3) B. (1), (2), dan (4) C. (1), (4), dan (5) D. (2), (4), dan (5) E. (3), (4), dan (5)</p>	
Kunci Jawaban:	
C	

Soal di atas dikategorikan soal *HOTS* karena: (1) stimulus yang disajikan kontekstual dan menarik karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik; (2) untuk dapat menjawab soal di atas, terlebih dahulu peserta didik harus dapat menjelaskan konsep “masalah ekonomi”, mampu

mengidentifikasi 3 masalah pokok ekonomi, menjelaskan dan memberikan contoh dari 3 masalah pokok ekonomi, menyimpulkan masalah pokok ekonomi berdasarkan kasus yang dihadapi ibu Astuty dalam mengembangkan usaha penjualan kue bolu yang dirintisnya.

KARTU SOAL (Uraian)		
Mata Pelajaran : Ekonomi		
Kelas/Semester : X/1		
Kurikulum : 2013		
Kompetensi Dasar	3.2 Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi	
Materi	Masalah Pokok Ekonomi Modern	
Indikator Soal	Disajikan kasus tentang daya beli masyarakat pedesaan yang rendah yang dihadapkan dengan tingginya harga barang kebutuhan lahan (selain harga hasil pertanian), peserta didik dapat menjelaskan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut.	
Level Kognitif	3	
Butir Soal :		
3. Masalah ekonomi yang terjadi di pedesaan adalah rendahnya daya beli masyarakat, akibat rendahnya produksi dan harga hasil pertanian. Sementara harga barang kebutuhan lahan (selain produk pertanian) cukup mahal termasuk pendidikan dan kesehatan. Jelaskan solusi untuk mengatasi masalah tersebut!		
Pedoman Penjurian :		
No	Uraian Jawaban/Kata Kunci	Skor
1	1. Melakukan diversifikasi jenis tanaman komoditi	1
	2. Penerapan program padat karya	1
	3. Memberikan fasilitas kredit kepada pengusaha kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian masyarakat setempat	1
	4. Pemerintah harus menjaga agar harga hasil pertanian stabil	1
	5. Pemerintah harus lebih optimal dan tepat waktu menyalurkan bantuan sosial.	1
	Jumlah Skor	5

Soal di atas dikategorikan soal *HOTS* karena: (1) stimulus yang disajikan kontekstual dan menarik karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik; (2) untuk dapat menjawab soal di atas, terlebih dahulu peserta didik harus mampu mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, menjelaskan dan memberikan contoh masalah pokok ekonomi, memberikan contoh cara mengatasi masalah ekonomi, menjelaskan solusi mengatasi masalah rendahnya daya beli masyarakat pedesaan

yang dihadapkan dengan tingginya harga barang kebutuhan.

Kelima, Membuat kunci jawaban pedoman atau penskoran (rubrik). Salah satu prinsip penilaian adalah “Objektif”, artinya penilaian hasil belajar peserta didik harus dapat menjaga objektivitas proses dan hasil penilaian. Untuk menjaga objektivitas penilaian tersebut, maka instrumen penilaian (soal) yang dibuat perlu disertakan kunci jawaban untuk soal objektif dan pedoman penskoran untuk soal uraian. Contoh kunci jawaban dan pedoman penskoran bisa dilihat pada kartu soal di atas, karena kunci jawaban atau pedoman penskoran menjadi bagian dari kartu soal yang dibuat.

PENUTUP

Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran dan penilaian berorientasi *HOTS* untuk membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif. Penilaian berorientasi *HOTS* adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekadar mengingat (*recall*), menyatakan kembali (*restate*),

atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (*recite*), tetapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif.

Karakteristik soal *HOTS* adalah: (1) mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi; (2) berbasis permasalahan kontekstual; (3) menggunakan bentuk soal beragam; dan (4) tidak rutin dan mengusung kebaruan. Untuk menyusun soal *HOTS* sesuai karakteristik tersebut, maka diperlukan langkah-langkah penyusunan soal *HOTS* sebagai berikut: (1) menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal *HOTS*; (2) menyusun kisi-kisi soal; (3) memilih stimulus yang menarik dan kontekstual; (4) menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal; dan (5) membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban.

Mengingat soal *HOTS* adalah soal yang tidak rutin dan senantiasa mengusung kebaruan, maka diperlukan kreativitas guru dalam mengembangkan soal *HOTS*. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya pelatihan, workshop atau bimtek penyusunan soal *HOTS* bagi guru. Kemampuan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran dan penilaian beroorientasi *HOTS* sangat menentukan keberhasilan satuan pendidikan dalam menerapkan

Kurikulum 2013 sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018

tentang Perubahan atas

Permendikbud Nomor 59

Tahun 2014 tentang

Kurikulum 2013 SMA/MA.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyana, Yoki, dkk. 2018. *Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi*. Jakarta: Dirjen GTK Kemdikbud.

Kemdikbud, 2017. Pengembangan Soal HOTS (Materi Pelatihan Kurikulum 2013).

Kosasih, E, 2016. *Strategi Belajar dan Pembelajaran, Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Yrama Widya.

Nugroho, R. Arifin, 2019. *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.

Setiawati, Wiwik, 2019. *Penilaian Berorientasi Higher Order Thinking Skills (HOTS)*. Jakarta: Dirjen GTK Kemdeikbud.

Subekti, Dwi dan Krisnawati, Linda, 2019. *Modul Penyusunan Soal Higher Order Thinking Skills Ekonomi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Kemdikbud.

Widana, I Wayan, 2017. *Modul Penyusunan Soal Higher Order Thinking Skills*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Kemdikbud.

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM MENYUSUN KELENGKAPAN MENGAJAR MELALUI METODE IN HOUSE TRAINING (IHT) DI SMKN 2 BARRU

Sabirin SJ

*Pengawas Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Email: sabirinkorwas@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan guru dalam menyusun kelengkapan pembelajaran melalui metode In House Training (IHT) serta faktor penghambat yang dialami guru setelah diberlakukan metode IHT. Subjek penelitian adalah guru SMKN 2 Barru. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kepengawasan yang dilakukan melalui dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode IHT dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyelesaikan penyusunan kelengkapan mengajar.

Kata Kunci: kemampuan guru, kelengkapan mengajar, metode IHT

Pendidikan adalah upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual individual maupun sosial (Sagala, 2006:1). Apapun bentuk penyelenggarannya, secara umum pendidikan bertujuan untuk membantu anak-anak atau peserta didik mencapai kedewasaannya masing-masing, sehingga mereka mampu berdiri di lingkungan masyarakatnya.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Pada level ujung tombak pendidikan, yaitu pada proses pembelajaran oleh guru di kelas administrasi guru harus ada, mulai dari perencanaan sampai pada pencapaian tujuan pembelajaran.

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggung jawaban guru dalam melaksanakan tugasnya (Zamroni, 2000:74) mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam

hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar (Usman, dalam Rastodio, 2009). Sudiarto menegaskan bahwa guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jika memiliki tiga aspek, yaitu; (1) kemampuan merencanakan pembelajaran, (2) kemampuan melaksanakan pembelajaran, dan (3) kemampuan mengevaluasi pembelajaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengamanatkan tersusunnya kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, mengacu kepada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Untuk dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tersebut, guru harus membuat silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan kelengkapan administrasi lainnya.

Silabus dapat didefinisikan sebagai “garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran”. Silabus

digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standart kompetensi dan kemampuan dasar.

Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, diperlukan RPP sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga berjalan secara efektif dan efisien (Kunandar, 2011: 264).

Guru menjadi faktor utama dalam penciptaan suasana pembelajaran. Satu hal yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh guru di SMKN 2 Barru adalah masih kurangnya guru yang berstatus sebagai PNS dibandingkan dengan guru honorer yang mencapai 3 kali lipat dari guru PNS tadi. Selama ini guru-guru yang berstatus honorer sedikit/jarang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti

berbagai Diklat Peningkatan Profesionalisme Guru dibandingkan guru yang bertstatus pegawai negeri. Hal ini menyebabkan banyak guru yang belum tahu dan memahami penyusunan RPP secara baik dan lengkap.

Beberapa guru mengadopsi RPP orang lain. Hal ini peneliti ketahui pada saat mengadakan supervisi akademik (supervisi kunjungan kelas) di sekolah binaan. Permasalahan tersebut berpengaruh besar terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang ujung-ujungnya adalah perolehan nilai hasil belajar atau prestasi belajar anak didik yang masih rendah. Kekurangan ini tentu saja akan menghambat upaya peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran, karena RPP guru tidak disusun dengan baik. Padahal, keberhasilan sebuah kegiatan, lebih dari 50% ditentukan oleh perencanaan yang baik, seperti halnya dengan keberhasilan pembelajaran, juga ditentukan oleh RPP yang disusun guru. Diharapkan semua guru memiliki kelengkapan mengajar yang lengkap dan mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah pada tercapainya tujuan pembelajaran. Atas dasar hal tersebut dalam upaya meningkatkan mutu

pembelajaran, SMKN 2 Barru berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kompetensi guru.

Guru yang berkompotensi mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dan media belajar yang ada di lingkungannya untuk pembelajaran yang optimal. Mengacu kepada peran strategis guru dalam meningkatkan prestasi belajar anak didik, maka SMKN 2 Barru memberikan perhatian yang besar bagi terwujudnya guru yang profesional dengan merancang sebuah program yang dapat meningkatkan kemampuan guru dengan mengadakan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kemampuan guru dalam menyusun kelengkapan mengajar melalui kegiatan IHT.

Penguasaan kompetensi profesional guru dalam menciptakan efektivitas pembelajaran di kelas sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, penulis menyatakan perlu mengadakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam sebuah Penelitian Tindakan Kepengawasan (PTKs) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Menyusun Kelengkapan Mengajar Melalui Kegiatan IHT di SMKN 2 Barru”. Masalah yang dibahas, yakni: Bagaimanakah gambaran kualitas dan

kompetensi guru di SMKN 2 Barru tahun 2019; Bagaimanakah gambaran pelaksanaan kegiatan IHT yang diadakan di SMKN 2 Barru tahun 2019? dan Apakah metode IHT dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun administrasi kelengkapan mengajar di SMKN 2 Barru tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian tindakan kepengawasan ini dilakukan oleh peneliti sendiri selaku pengawas pembina di sekolah (Drs. Sabirin, MM.) pada SMKN 2 Barru

Rencana Tindakan

SIKLUS	LANGKAH	RENCANA KEGIATAN	HASIL
Siklus 1	Perencanaan	- Identifikasi masalah dan penetapan tindakan - Perumusan scenariotindakan	Masalah kemampuan guru menyusun kelengkapan mengajar
		- Persiapan tindakan (Instrumen, jadwal) - Penentuan data dan cara memperolehnya - Identifikasi guru-guru yang akan IHT	Tindakan : In House Training Apakah pelaksanaan In-House Training dapat meningkatkan kemampuan guru menyusun kelengkapan mengajar
			Rencana Tindakan: Memeriksa hasil kelengkapan mengajar guru setelah mengikuti In House Training 1
			Melakukan In-House Training 2 bagi guru yang belum mampu menguasai penyusunan kelengkapan mengajar

bersama-sama dengan kolaborator Kepala Sekolah Muhammad Idris, S. Pd. Adapun jumlah guru yang menjadi peserta adalah sebanyak 17 orang, yang terdiri atas 5 orang Guru Mata pelajaran normatif, 7 orang Guru mata pelajaran adaptif dan 5 orang Guru mata pelajaran produktif.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kepengawasan yang dilakukan melalui dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

		Memeriksa mengajar guru	kelengkapan
Pelaksanaan	Tindakan dilakukan sesuai rencana selama 2 minggu Tindakan dilakukan melibatkan semua guru yang ikut In-House Training	Tindakan dapat dilaksanakan sesuai scenario	
Pengamatan	Pengamatan dilakukan dengan Data kualitatif dengan catatan instrument Seluruh kejadian dalam proses tindakan dicatat dlm lembar observasi		peristiwa selama proses tindakan
Refleksi	Evaluasi tindakan dan data-data yang diperoleh Pertemuan membahas hasil evaluasi Merencanakan langkah-langkah siklus 2	Masalah yang dialami Peristiwa yang terjadi di luar scenario Rencana langkah- langkah siklus 2	
Siklus 2	Perencanaan	Pelaksanaan In-House Training Tahap 2 Rencana langkah tindakan sesuai hasil refleksi 1	
	Pelaksanaan	Pelaksanaan sesuai scenario siklus 2	
	Pengamatan	Sesuai rencana siklus 2	
	Refleksi	Evaluasi sesuai siklus 2	

Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi

Setelah semua persiapan dilakukan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan In-House Training penyusunan kelengkapan mengajar.

HASIL PENELITIAN

Siklus 1

Pada siklus 1 ini kegiatan In-House Training dilaksanakan selama dua hari

yaitu pada tanggal 6 s.d 7 September 2019 dengan waktu 17 jam yang materinya meliputi: (a) Teknik penghitungan pekan epektif, Teknik penyusunan Program Tahunan (Prota), Teknik penyusunan Program Semester (Promes), Teknik penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (b)

Penyampaian materi berakhir dilanjutkan dengan tugas individu penyusunan kelengkapan mengajar (c) Setelah In-House Training berakhir, penulis meminta seluruh peserta mengumpulkan kelengkapan mengajar dalam bentuk file yang terdiri dari Program Tahunan (Prota), Perhitungan Pekan Efektif dan Distribusi Alokasi Waktu, Program Semester (Promes), Silabus Pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (d) Kegiatan berikutnya penulis melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan mengajar yang telah disusun oleh Guru dalam bentuk file tersebut kemudian menganalisis data sesuai dengan lembar observasi yang telah dipersiapkan (e) Dari hasil analisis tersebut kemudian penulis melakukan refleksi untuk menentukan program tindak lanjut.

Siklus 2

Setelah siklus 1 berakhir dan telah melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh pada siklus 1 tersebut, pada siklus 2 ini penulis melakukan kegiatan In-House Training Tahap 2 karena: Presentase Guru yang menyelesaikan kelengkapan mengajar belum mencapai 100%

Kelengkapan mengajar yang telah disusun oleh Guru ternyata masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang

diharapkan yaitu masih perlu penyempurnaan. Hal tersebut disebabkan karena setelah penyusunan kelengkapan mengajar dilakukan ternyata mengalami permasalahan-permasalahan teknis sehingga perlu penyamaan persepsi.

PEMBAHASAN

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan Kepengawasan ini yang berjudul Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menyusun Kelengkapan Mengajar Melalui In-House Training pada SMKN 2 Barru, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Hasil Angket Sebelum In-House Training Dilakukan

Tabel 1: Pentingnya memiliki kelengkapan mengajar Guru SMKN 2 Barru.

No	Alternatif Jawaban	%
1	Sangat Setuju	57.4
2	Setuju	42.6
3	Cukup Setuju	0.00
4	Tidak Setuju	0.00
5	Sangat Tidak Setuju	0.00
Jumlah		100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 57.4% Guru menyadari bahwa sebagai seorang Guru sangat penting memiliki kelengkapan mengajar sebelum melaksanakan proses pembelajaran dan sebanyak 42.6% menyatakan penting memiliki kelengkapan

mengajar. Hal tersebut berarti secara keseluruhan Guru SMKN 2 Barru menyatakan penting untuk memiliki kelengkapan mengajar. Hal ini sangatlah beralasan karena dengan memiliki kelengkapan mengajar yang baik sangat membantu kelancaran dalam proses pembelajaran.

Tabel 2: Ketidaksesuaian mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan Guru SMKN 2 Barru.

No	Alternatif Jawaban	%
1	Sangat Setuju	11.2
2	Setuju	33.4
3	Cukup Setuju	44.2
4	Tidak Setuju	11.2
5	Sangat Tidak Setuju	0.00
Jumlah		100

Data dalam Tabel 2, menunjukkan bahwa hanya 11.2% guru yang merasa mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 44.2% menyatakan cukup setuju atau ragu-ragu hal ini mungkin Guru merasa mata pelajaran yang diajarkan memang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya namun mereka merasa mampu mengajarkan mata pelajaran yang diajarkan mungkin karena mata pelajaran yang diajarkan tersebut masih satu rumpun

dengan latar belakang pendidikannya. Selebihnya menjawab setuju yang berarti sekitar 44.6% merasa mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini terjadi karena SMKN 2 Barru pada awal berdirinya sangat kesulitan mencari tenaga pengajar sehingga pada waktu itu berlaku pepatah tidak ada rotan akarpun jadi.

Tabel 3: Kurangnya Pengalaman Mengajar Guru SMK Neg. 2 Barru.

No	Alternatif Jawaban	%
1	Sangat Setuju	0.00
2	Setuju	33.3
3	Cukup Setuju	22.3
4	Tidak Setuju	44.4
5	Sangat Tidak Setuju	0.00
Jumlah		100

Berdasarkan data dalam table 3 di atas, dapat diartikan bahwa 44.4% menyatakan tidak setuju kalau pengalaman mengajarnya dikatakan kurang, dengan kata lain 44.4% tersebut Guru merasa sudah berpengalaman dalam mengajar sedangkan sisanya 55.6% Guru merasa dirinya belum berpengalaman mengajar. Hal ini dikarenakan mungkin mereka belum lama diangkat sebagai Guru dan mungkin juga beberapa diantaranya bukan berlatar belakang dari kependidikan.

Tabel 4: Perlunya In-House Training Penyusunan Kelengkapan Mengajar Pada SMKN 2 Barru.

No	Alternatif jawaban	%
1	Sangat Setuju	22.7
2	Setuju	47.7
3	Cukup Setuju	11.6
4	Tidak Setuju	18.0
5	Sangat Tidak Setuju	0.00
	Jumlah	100

Data dalam Tabel 4 diatas mengindikasikan bahwa hanya 18.0% saja Guru merasa tidak perlu *In-House Training* Penyusunan kelengkapan mengajar. Hal ini terjadi mungkin karena mereka sudah cukup berpengalaman dalam mengajar sehingga tanpa *In-House Training* mereka merasa sudah bisa menyusun kelengkapan mengajar. 11.6% menjawab cukup setuju/ragu-ragu mungkin mereka belum mengetahui dengan jelas tentang materi yang akan disampaikan dalam *In-House Training* sehingga mereka merasa tidak yakin apakah sudah bisa atau belum bisa materi tersebut.

Sedangkan sisanya 70.0% menyatakan perlu diadakan *In-House Training* penyusunan kelengkapan mengajar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar Guru SMKN 2 Barru mengharapkan adanya

In House Training penyusunan kelengkapan mengajar. Hal ini mungkin dikarenakan sebagian besar Guru menyadari bahwa dirinya belum memiliki kelengkapan mengajar dan merasa pengalaman mengajarnya masih kurang serta mata pelajaran yang diajarkan kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga masih kesulitan dalam menyusun kelengkapan mengajar.

Tabel 5: Motivasi Guru dalam Menyusun Kelengkapan Mengajar Pada SMKN 2 Barru.

No	Alternatif Jawaban	%
1	Sangat Setuju	33.3
2	Setuju	66.7
3	Cukup Setuju	0.00
4	Tidak Setuju	0.00
5	Sangat Tidak Setuju	0.00
	Jumlah	100

Berdasarkan data dalam tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa 100% Guru memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti *In-House Training* dan memiliki keinginan yang kuat untuk membuat kelengkapan mengajar bahkan akan menggunakan kelengkapan mengajar tersebut sebagai penunjang proses pembelajaran.

Hasil yang diperoleh pada Siklus 1

Pada siklus 1 seluruh guru mulai menyusun kelengkapan mengajar

walaupun belum ada seorangpun Guru yang berhasil menyelesaikan kelengkapan mengajar dengan lengkap namun demikian sudah ada 3 orang Guru yang menyelesaikan hingga 80%, lima orang Guru menyelesaikan hingga 73,33% dan yang lainnya masih dibawah 70% dan yang paling rendah (paling sedikit) berhasil menyusun kelengkapan mengajar adalah sebesar 33,33%.

Selain data seperti telah dijelaskan diatas, terdapat satu data yang menggambarkan bahwa ada seorang Guru yang baru menyelesaikan kelengkapan mengajar hanya 33,33%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, mungkin yang bersangkutan belum lancar menggunakan computer karena dalam mengerjakan tugas tersebut tugas (kelengkapan mengajar) dikumpul dalam bentuk file. Kemungkinan lain yang bersangkutan masih belum begitu paham cara menyusun kelengkapan mengajar tersebut sehingga menjadi lambat dalam mengerjakannya. Selanjutnya data dalam table 6 terlihat pula bahwa RPP kelas XI sebanyak 64,71% tersusun oleh Guru. Bahkan ada Guru yang belum menyusun Prota (Program Tahunan) dan Promes (Program Semester) untuk kelas XI namun sudah menyusun RPP

untuk siswa kelas XI. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Guru tersebut menganggap bahwa Prota dan Promes untuk kelas X sama saja dengan Prota dan Promes kelas XI sehingga bisa saja disusun belakangan yang penting sudah ada RPP-nya Secara umum, pada siklus 1 Guru sudah mulai menyusun kelengkapan mengajar (60,78%) namun demikian masih perlu dilakukan tindak lanjut terhadap kegiatan *In-House Training* tersebut karena indicator keberhasilan In-House Training ini adalah 100% Guru berhasil menyelesaikan penyusunan kelengkapan mengajar.

Tabel 6. Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menyusun Kelengkapan Mengajar

No.	Nama guru/	% Siklus 1	% Siklus 2	% Peningkatan
1	MR	73,33	93,33	20,00
2	GW	73,33	100,00	26,67
3	RG	46,67	93,33	46,66
4	EA	80,00	100,00	20,00
5	HW	73,33	100,00	26,67
6	HR	73,33	100,00	26,67
7	MH	53,33	100,00	46,67
8	AI	46,67	93,33	46,66
9	DR	80,00	100,00	20,00
10	AH	60,00	93,33	33,33
11	AS	33,33	86,67	53,34
12	SKH	73,33	93,33	20,00

13	HRL	40,00	80,00	40,00
14	ATH	46,67	93,33	46,66
15	SRN.	53,33	93,33	40,00
16	ERY.	46,67	80,00	33,33
17	MNW	80,00	100,00	20,00
Jumlah		1.033,33	1.600,00	566,67
Prosentase (%)		60,78	94,12	33,34

Secara umum seluruh guru telah terjadi peningkatan kemampuan dalam penyusunan kelengkapan mengajar. Namun seperti data yang terlihat pada table 8 di atas masih ada tiga orang guru belum berhasil menyelesaikan keseluruhan kelengkapan mengajar yang ditargetkan. Masih terdapat 3 orang guru yang baru menyelesaikan kelengkapan mengajarnya di bawah 93,33%. Menurut pengamatan penulis, salah satu dari 3 orang Guru tersebut dikarenakan belum menguasai keterampilan komputer sehingga dalam mengerjakan tugas tersebut sangat terhambat. Sedangkan 2 orang lainnya lagi, menurut pengamatan penulis sebenarnya cukup menguasai keterampilan komputer namun yang bersangkutan kebetulan pada saat tugas diberikan ada masalah keluarga sehingga belum sempat menyelesaikan tugas yang diberikan. Tindak lanjut dari siklus 2 adalah: Guru yang belum menguasai keterampilan komputer tersebut

dilakukan mentoring dan diberi tambahan waktu untuk menyelesaikan penyusunan kelengkapan mengajar. Peserta yang ada masalah keluarga tersebut diberi kebijakan berupa tambahan waktu untuk menyelesaikan penyusunan kelengkapan mengajar tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian Tindakan Kepengawasan ini, serta data-data yang terkumpul dari sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan IHT di SMKN 2 Barru, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan, antara lain:

- 1) Secara keseluruhan guru SMKN 2 Barru menyatakan penting untuk memiliki kelengkapan mengajar.
- 2) Sebagian besar Guru SMKN 2 Barru merasa bahwa pengalaman mengajarnya masih minim pada mata pelajaran yang diajarkan, latar belakang pendidikan tidak begitu sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan pengetahuan tentang penyusunan kelengkapan mengajar masih kurang.
- 3) Seluruh Guru SMKN 2 Barru menghendaki adanya *In-House*

Training penyusunan kelengkapan mengajar.

- 4) 100% Guru memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti *In-House Training* dan memiliki keinginan yang kuat untuk membuat kelengkapan mengajar dan akan menggunakan kelengkapan mengajar tersebut sebagai penunjang proses pembelajaran.
- 5) Pada Siklus 1 terdapat 60,78% Guru berhasil menyelesaikan penyusunan kelengkapan mengajar dan mengalami peningkatan pada Siklus 2 yaitu menjadi 94,12% Guru berhasil menyelesaikan penyusunan kelengkapan mengajar. Jadi ada peningkatan kemampuan Guru dalam menyusun kelengkapan mengajar sebesar 33,34%
- 6) Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun kelengkapan mengajat pada SMKN 2 Barru dapat dilakukan melalui kegiatan IHT.

Saran

Saran mengenai hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun kelengkapan

mengajar melalui *In-House Training* pada SMKN 2 Barru” antara lain :

- 1) Bagi kepala sekolah hendaknya secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan mengajar guru, agar para guru senantiasa melaksanakan proses pembelajaran secara terencana.
- 2) Kepala sekolah perlu melakukan bimbingan kepada para guru khususnya dalam penyusunan kelengkapan mengajar terutama kepada guru yang masih pemula atau guru yang mengajar bukan pada bidangnya karena ada kecenderungan mengalami kesulitan dalam menyusun kelengkapan mengajar.
- 3) Kepala sekolah perlu melakukan kegiatan penyegaran kepada para guru agar dapat mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyusunan kelengkapan mengajar. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan IHT.
- 4) Bagi guru hendaknya setiap awal tahun pelajaran menyusun kelengkapan mengajar sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Selanjutnya, kelengkapan mengajar yang telah disusun hendaknya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan

proses pembelajaran.

Guru yang pengetahuan dan pengalamannya masih kurang agar dapat meminta bimbingan atau berkoordinasi dengan teman sejawat yang lebih berpengalaman atau meminta bimbingan kepada kepala sekolah atau yang ditunjuk.

Daftar Pustaka

- Alfonso, RJ., Firth, G.R., dan Neville, R.F.1981. *Instructional Supervision, A Behavior System*, Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Aqib, Zainal. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas. untuk: Guru*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Dasar-Dasar Supervisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta Kiat-kiat Kepala sekolah Sebagai Supervisor.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan Jenderal Pendidikan Tinggi. 2009. *Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal. *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Dodd, James., Kent, B, Monroe and P Grewal,, 1972, *The Evaluating of Price, Perceived Quality, and Customer Perceptions of Products Quality, Journal of Marketing Research*, Vol.42, pp.331-349.
- Edward Sallis, 2006. Total Quality Management in Education. Jogjakarta: IRCiSoD
- Garry Dessler, 2008. *Human Resource Management*. Edisi Sebelas, New Jersey : Pearson Education, Inc. *Human Resource Management*. Edisi Sebelas, New Jersey : Pearson Education, Inc.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Herman Sofyandi, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi

- Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Justine Sirait. 2006. *Memahami Aspek-aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Grasindo
- Kemmis, S. dan Taggart, R. 1988. *The Action Research Planner*. Deakin: Deakin University.
- Malayu, S.P. *Hasibuan*, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mantja, W. 2001. *Profesionalisasi Tenaga Kependidikan: Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran*. Malang: Elang Mas.
- Mathis, Robert L dan Jackson, John H, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Muslim, Sri Banun, 2009, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru*, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia., Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah. Jakarta: Depdiknas
- Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007. Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah
- Permendiknas. 2008. *Permendiknas No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.

PELAKSANAAN SUPERVISI MUTU PENDIDIKAN OLEH PENGAWAS SEKOLAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

RAHMANIAR

Widyaiswara LPMP SULSEL

rahmaniarlpmpulsel@gmail.com

Abstrak: Pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah dan dampaknya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di propinsi Sulawesi Selatan. Artikel ini membahas masalah: (1) Bagaimana gambaran pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah di satuan pendidikan? (2) Bagaimana dampak pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah terhadap implementasi SPMI di satuan pendidikan? Tujuan penulisan ini adalah: (1) Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah di satuan pendidikan; (2) untuk mengetahui dampak pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah terhadap implementasi SPMI di satuan pendidikan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah di satuan pendidikan telah terlaksana efektif mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2019 dengan melakukan pendampingan pelaksanaan EDS, pemahaman standar dan implementasi SPMI, verval data EDS, mendampingi dalam menganalisis Permasalahan Mutu sekolah, menyusun rencana peningkatan mutu, melakukan upaya peningkatan mutu, dan mengevaluasi hasil peningkatan mutu. Dampak pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah terhadap implementasi SPMI adalah sekolah telah melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, merencanakan peningkatan mutu, melaksanakan peningkatan mutu, dan melaksanakan monev internal.

Kata Kunci: pelaksanaan, supervisi mutu pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu

pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen di dalamnya memiliki tanggung jawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Dengan kualitas lulusan yang unggul, kualitas SDM ke depan akan mampu eksis dalam dinamika perubahan dan pembangunan nasional. Menurut Edward, 2011:45 bahwa peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui usahanya sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan mutu yang terjadi disetiap satuan pendidikan tidak akan terjadi kalau bukan karena usaha dan kegigihan setiap institusi atau lembaga itu sendiri. Penjaminan mutu menjadi kontrol atau alat pengukuran bagi tercapainya kualitas pendidikan yang bermutu.

Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Barnawi, (2017:25) bahwa penjaminan mutu dimaksudkan untuk menciptakan budaya mutu. Penjaminan mutu bertujuan untuk

mencegah terjadinya kesalahan melalui proses evaluasi dan perbaikan secara terus menerus. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*) agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah dikembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) berdasarkan Permendikbud No. 28 Tahun 2016.

Pengawas satuan pendidikan diangkat dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan atau sekolah yang menjadi binaannya. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 tahun 2010 Tentang Jabatan fungsional pengawas sekolah pada Bab II Pasal 5 dijelaskan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada

satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Pengawas satuan pendidikan banyak berperan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dilakukan kegiatan supervisi mutu pendidikan berkelanjutan oleh supervisor ke setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan supervisi mutu pendidikan mencakup supervisi dalam integrasi penerapan Kurikulum 2013 (K13), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan aspek mutu lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Sistem

Penjaminan Mutu Internal) sesuai Standar Nasional Pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ridwan, 2015:20) bahwa Sistem manajemen mutu pendidikan yang diterapkan di pendidikan dasar dan menengah adalah suatu proses pengelolaan untuk mengarahkan, dan mengendalikan satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan, sasaran, rencana, dan prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan

Dari latar belakang di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan supervisi mutu pendidikan di sekolah, pengawas memegang peranan penting terutama dalam menerapkan SPMI. Keberhasilan penerapan SPMI di sekolah sangat tergantung pada keseriusan pengawas dalam mengawal SPMI ini. Artikel ini akan membahas secara rinci tentang pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas dan dampaknya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di sekolah.

Masalah yang dibahas adalah: (1) Bagaimana gambaran pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah di satuan pendidikan? (2) Bagaimana dampak pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah terhadap implementasi Sistem Penjaminan

Mutu Internal di satuan pendidikan? Adapun tujuan penulisan ini adalah: (1) gambaran pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah di satuan pendidikan; (2) untuk mengetahui dampak pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di satuan pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Hasil Pelaksanaan Supervisi Mutu Pendidikan oleh Pengawas di Satuan Pendidikan

Supervisi mutu pendidikan adalah proses mengawal upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan oleh LPMP bersama dengan Pengawas Sekolah melalui tahapan mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan 8 standar, memberikan rekomendasi penyelesaian masalah, melakukan pendampingan pemenuhan mutu pada satuan pendidikan, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi supervisi mutu. Keseluruhan dari tahapan di atas pada satuan pendidikan lebih dikenal dengan istilah Sistem Penjaminan mutu Internal. Jadi, tugas pengawas di satuan pendidikan adalah melakukan pendampingan dan pembimbingan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di sekolah dan memastikan keterlaksanaannya sesuai dengan siklus.

Sejalan dengan itu penulis melakukan survey kepada 212 responden yang terdiri dari perwakilan kepala sekolah dan perwakilan guru pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk melihat keterlaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas dan untuk mengetahui dampaknya terhadap implementasi Sistem

Penjaminan Mutu Internal di setiap satuan pendidikan. Pelaksanaan supervisi mutu pendidikan diawali dengan Bimbingan Teknis fasilitator nasional Supervisi Mutu untuk selanjutnya bimbingan teknis kepada seluruh pengawas satuan pendidikan yang tersebar pada 24 kabupaten/kota. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pengawas satuan pendidikan dalam menjamin terlaksananya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan terintegrasi Kurikulum 2013 (K13), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan aspek mutu lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang kompeten dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Pelaksanaan supervisi mutu pendidikan secara serentak dilaksanakan pada rentang bulan Juni sampai dengan Desember 2019. Tahap pertama dalam melakukan supervisi ini adalah memastikan bahwa satuan pendidikan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait

untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa satuan pendidikan telah melakukan pengisian aplikasi penjaminan mutu pendidikan dan aplikasi Dapodik dengan lengkap dan jujur, sehingga memiliki rapor mutu tahunan yang kredibel, akurat, dan benar. Melalui rapor mutu, dapat dilihat terjadinya peningkatan atau penurunan skor indikator mutu sesuai SNP, khususnya terkait implementasi Kurikulum 2013 (K13), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan aspek mutu lainnya lainnya. Namun pada kenyataannya tidak semua pengawas melaksanakan tugas dan kunjungan supervisi secara maksimal. Hasil survei tentang pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas yang dilaksanakan pada 212 responden yang terdiri dari kepala sekolah dan guru yang tersebar pada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan menghasilkan data seperti pada grafik di bawah ini:



Grafik 1.1. Pelaksanaan Supervisi Mutu pendidikan oleh Pengawas sekolah

Berdasarkan grafik di atas diperoleh data tentang pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas satuan pendidikan pada rentang waktu bulan Juni sampai dengan Desember 2019. Hasil survey dari 212 responden, diperoleh informasi bahwa sebanyak 62 responden (30%) pengawas yang melaksanakan 1 sampai dengan 2 kali kunjungan dalam rangka pelaksanaan supervisi mutu pendidikan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2019. Sebanyak 89 responden (43%) yang menyatakan bahwa pada bulan Juni sampai dengan Desember 2019 pengawas melakukan kunjungan supervisi mutu pendidikan di sekolahnya sebanyak 3 s.d. 4 kali kunjungan. Selanjutnya 53 responden (26%) yang mengatakan bahwa sejak bulan Juni sampai dengan Desember pengawas melaksanakan supervisi mutu dengan 4 sampai dengan 5 kali kunjungan, dan ada 2 responden (1%) yang mengatakan bahwa sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2019 sekolahnya

belum pernah dikunjungi oleh pengawas dalam pelaksanaan supervisi mutu pendidikan. Hasil survei ini membuktikan bahwa kunjungan pengawas dalam pelaksanaan supervisi mutu pendidikan masih bervariasi dan bahkan masih ada pengawas dalam jangka waktu enam bulan sama sekali belum pernah mengunjungi sekolah binaannya melakukan supervisi mutu.

Tugas pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan supervisi mutu pendidikan di sekolah adalah melakukan pendampingan dan pengawasan dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan. Pada tahap pendampingan supervisi mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh pengawas pada satuan pendidikan pada 24 Kabupaten/Kota dalam melakukan evaluasi diri sekolah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

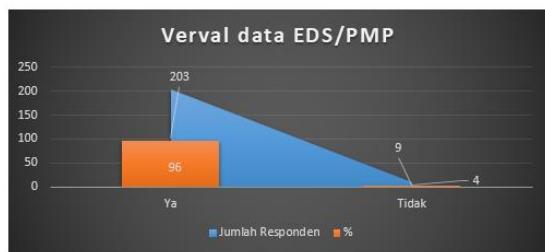


Grafik 1.2. Pendampingan oleh pengawas dalam melaksanakan evaluasi diri sekolah (EDS)

Grafik di atas menunjukkan keterlaksanaan pendampingan oleh pengawas di satuan pendidikan pada tahap

pelaksanaan Evaluasi diri Sekolah. Dari 212 responden yang terdiri dari Kepala Sekolah dan guru sebanyak 204 responden (97%) yang menyatakan bahwa sekolahnya telah didampingi oleh pengawas pembina dalam melaksanakan evaluasi diri sekolah dan masih ada 5 responden (2%) yang menjawab tidak atau belum pernah didampingi oleh pengawas pada saat melaksanakan EDS di sekolahnya. Dari 212 responden hanya 209 yang menjawab dan ada 3 responden (1%) yang tidak memberi tanggapan. Grafik di atas membuktikan bahwa sebagian besar pengawas sudah melaksanakan supervisi mutu pendidikan dan hanya sebagian kecil yakni hanya sekitar 2% yang menyatakan sekolahnya belum pernah didampingi.

Pada tahap pelaksanaan verifikasi dan validasi data EDS/PMP oleh pengawas dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1.3. Pelaksanaan Verifikasi dan validasi data EDS/PMP oleh pengawas sekolah.

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa dari 212 terdapat 203 responden (96%) yang menjawab pengawas pembina

di sekolahnya telah melakukan verifikasi dan validasi data EDS/PMP dan masih ada 9 responden (4%) yang mengatakan bahwa pengawas pembina di sekolahnya belum melaksanakan verifikasi dan validasi data EDS/PMP. Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pengawas telah melaksanakan tugasnya dalam memastikan keterlaksanaan evaluasi diri sekolah dan telah mengecek keakuratan dan kevalidan data yang terkirim melalui aplikasi PMP.

Pada tahap pelaksanaan sosialisasi pemahaman 8 standar nasional pendidikan dan pemahaman tentang sistem penjaminan mutu internal pada setiap satuan pendidikan sebagai salah satu tugas pengawas dalam rangka mengawal Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 1.4. Pelaksanaan sosialisasi pemahaman standar dan Sistem Penjaminan Mutu Internal di sekolah binaan

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 212 responden yang tersebar pada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

sebanyak 204 responden (97%) menjawab ya dalam arti bahwa sebagian besar pengawas telah melaksakan sosialisasi tentang pemahaman standar nasional pendidikan beserta indikator-indikator mutu yang ada didalamnya sebagai acuan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal. Kemudian masih terdapat 5 responden (2%) yang menjawab tidak dalam arti bahwa masih ada pengawas yang belum pernah melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman standar dan Sistem Penjaminan Mutu Internal di sekolah binaannya. Dari keseluruhan responden terdapat 3 responden (1%) yang tidak memberikan respon atau jawaban. Hasil survey ini juga membuktikan bahwa sebagian besar pengawas telah bekerja dengan baik dan maksimal dalam mengawal sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan.

Pada proses sosialisasi ini diharapkan satuan pendidikan memahami tentang Standar nasional pendidikan dan sistem penjaminan mutu internal sebagai langkah awal untuk memudahkan warga sekolah dalam mengimplementasikan SPMI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 1.5. Pemahaman warga sekolah tentang SPMI tujuan dan manfaatnya

Pemahaman warga sekolah tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal pada grafik di atas tergambar bahwa dari 212 responden sebanyak 7 responden (3%) yang mengatakan sangat memahami tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal serta tujuan dan manfaatnya, terdapat 102 responden (48%) yang mengatakan telah memahami tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal serta tujuan dan manfaatnya, terdapat 94 responden (45%) yang mengatakan cukup memahami tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal serta tujuan dan manfaatnya, dan masih ada 9 responden (4%) yang mengatakan bahwa mereka sama sekali belum memahami tentang SPMI.

Grafik di atas menunjukkan bahwa pengawas telah melaksanakan tugas pendampingan dengan baik dan telah melakukan upaya maksimal dalam rangka memberikan pemahaman awal kepada seluruh warga sekolah. Hal ini dapat dilihat pada grafik bahwa warga sekolah

sebagian besar sudah memahami tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal beserta tujuan dengan manfaatnya dan ini menjadi modal besar bagi semua warga sekolah dalam mengimpelementasikan sistem penjaminan mutu internal.

Setelah warga sekolah memahami tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal serta tujuan dan manfaatnya, pengawas lebih mudah dalam mendampingi satuan pendidikan dalam pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Sebuah organisasi berupa tim penjamin mutu pendidikan, yaitu TPMPS perlu dibentuk untuk mengelola sistem penjaminan mutu pendidikan internal secara profesional. Bila di sekolah telah ada tim yang mengelola Kurikulum 2013 (K13), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan aspek mutu pendidikan lainnya secara terpisah perlu diintegrasikan ke dalam TPMPS, sehingga TPMPS menjadi payung bagi semua tim yang ada di sekolah yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan.



Grafik 1.6. Pendampingan oleh pengawas dalam pembentukan TPMPS

Pendampingan pengawas dalam pembentukan TPMPS pada sekolah binaan masing-masing pada grafik di atas diperoleh informasi bahwa, dari 212 responden terdapat 188 responden (88%) yang mengatakan telah didampingi oleh pengawas dalam pembentukan TPMPS dan sudah memiliki tim TPMPS dan sudah di SK kan. Kemudian terdapat 14 responden (7%) mengatakan pengawas telah melakukan pendampingan namun TPMPS masih dalam proses pembentukan dan masih ada 10 responden (5 %) yang mengatakan bahwa pengawas belum pernah melakukan pendampingan dalam pembentukan TPMPS dan sekolah juga belum memiliki TIM TPMPS. Namun dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah didampingi oleh pengawas pembina masing-masing dan telah memiliki tim TPMPS yang sudah di SK kan.

Selanjutnya setelah pembentukan TIM TPMPS kemudian satuan pendidikan juga dengan dimotori tim TPMPS harus membuat pernyataan komitmen yang ditandatangi bersama oleh semua warga sekolah pada masing-masing satuan pendidikan. Hal ini penting sebagai wujud keseriusan dan tanggung jawab sekolah dalam mengimplementasikan SPMI.

Penandatanganan pernyataan komitmen ini menjadi bagian dari tugas pengawas dalam melakukan supervisi mutu pendidikan pada sekolah binaannya. Berikut grafik keterlibatan pengawas dalam pendampingan di sekolah:



Grafik 1.7. Pendampingan sekolah dalam Penandatanganan bersama pernyataan Komitmen berkaitan peningkatan Mutu

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 212 responden yang tersebar pada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, terdapat 192 responden (91%) yang menyatakan bahwa sekolah mereka telah didampingi oleh pengawas dalam penandatanganan bersama oleh semua warga sekolah dalam bentuk pernyataan komitmen berkaitan dengan implementasi SPMI di sekolah masing-masing. Kemudian masih terdapat 18 responden (8%) yang mengatakan tidak dalam arti bahwa sekolahnya belum didampingi oleh pengawas dalam hal penandatanganan komitmen bersama dalam implementasi SPMI dan belum ada pernyataan komitmen yang dibuat yang akan ditandatangani bersama semua warga sekolah dan ada 2

responden (1%) yang tidak memberikan tanggapan dari pernyataan ini.

Pada pelaksanaan Sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan disetiap satuan pendidikan yang terdiri dari lima siklus, pengawas dalam hal ini sebagai pembina di sekolah bertanggung jawab melakukan pendampingan mulai dari pelaksanaan siklus pertama (pemetaan mutu pendidikan). Siklus kedua (perencanaan peningkatan mutu), siklus ketiga (pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan), siklus keempat (monitoring dan evaluasi), sampai pada siklus kelima (penyusunan strategi). Hasil analisis pengawas ini hendaknya disampaikan kepada sekolah binaannya untuk kemudian dibahas bersama untuk mencari solusi perbaikan dan peningkatan mutu selanjutnya.



Grafik 1.8. Pengawas menyampaikan hasil analisisnya ke sekolah setelah melakukan pendampingan

Pendampingan yang dilaksanakan oleh pengawas pada rentang bulan Juni sampai dengan Desember 2019 pada masing-masing sekolah binaannya mulai

dari proses analisis permasalahan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pendampingan dalam upaya peningkatan mutu dan pada saat sekolah melakukan evaluasi hasil peningkatan mutu. Hasil pendampingan ini dianalisis sebagai bahan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan di tahun berikutnya. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa dari 212 responden yang tersebar pada 24 Kabupaten/Kota terdapat 188 responden (89%) mengatakan bahwa pengawas setelah melaksanakan pendampingan di sekolah binaannya menyampaikan hasil analisisnya ke sekolah setelah melakukan pendampingan dan terdapat 24 responden (11%) mengatakan bahwa setelah pengawas melakukan pendampingan di sekolahnya tidak menyampaikan hasil analisisnya ke sekolah. Hal ini juga sangat tergantung dari pemahaman pengawas tentang tugasnya dalam mengawal sistem penjaminan mutu pendidikan, supervisi mutu pendidikan, dan mekanisme pendampingannya.



Grafik 1.9. Penggunaan pengawas terhadap bidang tugasnya dalam melakukan pendampingan

Keberhasilan pengawas dalam mengawal sistem penjaminan mutu internal melalui kegiatan supervisi mutu pendidikan dan pendampingan di sekolah-sekolah binaannya sangat tergantung dari penguasaan dan atau pemahaman pengawas tentang siklus penjaminan mutu internal dan supervisi mutu pendidikan beserta mekanisme pendampingannya. Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa dari 212 responden terdapat 198 responden (93%) mengatakan bahwa pengawas dalam melakukan pendampingan di sekolahnya menguasai bidang tugasnya dalam melakukan pendampingan dan masih terdapat 11 responden (6%) yang menjawab bahwa pengawas dalam melakukan pendampingan tidak menguasai bidang tugasnya sebagai pendamping. Dan 3 responden (1%) dari 212 yang memilih tidak menjawab.

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pengawas dalam melakukan pendampingan sudah memahami bidang tugasnya sebagai pendamping dan dalam melakukan supervisi mutu pendidikan, baik dari segi pemahaman pengawas tentang Siklus penjaminan mutu internal dan supervisi mutu pendidikan beserta mekanisme pendampingannya. Adapun mekanisme

supervisi mutu pendidikan yang dilakukan oleh pengawas di sekolah dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1.10. Mekanisme pelaksanaan supervisi mutu pendidikan di sekolah oleh pengawas

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 212 responden dari 24 kabupaten/Kota terdapat 144 responden (68%) yang mengatakan bahwa pengawas mendampingi sekolah dalam menganalisis permasalahan mutu sekolah, terdapat 139 responden (66%) yang mengatakan bahwa pengawas telah mendampingi sekolah dalam menyusun rencana peningkatan mutu, terdapat 148 responden (70%) mengatakan bahwa pengawas telah mendampingi sekolah melakukan upaya peningkatan mutu, dan terdapat 124 responden (58%) mengatakan pengawas telah mendampingi sekolah dalam mengevaluasi hasil peningkatan mutu yang telah dilaksanakan pada periode Juni sampai dengan Desember tahun 2019.

Grafik di atas juga menunjukkan bahwa pengawas dalam melaksanakan

supervisi mutu pendidikan di sekolah binaan masing-masing masih bervariasi. Belum semua pengawas melakukan pendampingan dari 4 mekanisme pendampingan yang harus dilakukan. Tetapi walaupun demikian data di atas terlihat bahwa sebagian besar pengawas sudah melaksanakan supervisi mutu pendidikan berdasarkan mekanismenya, yakni dimulai dari menganalisis permasalahan mutu sekolah, menyusun rencana peningkatan mutu, melakukan upaya peningkatan mutu, dan mengevaluasi hasil peningkatan mutu.

Dampak Pelaksanaan Supervisi Mutu Pendidikan oleh Pengawas Terhadap Implementasi SPMI di Satuan Pendidikan

Sistem Penjaminan Mutu Internal pada satuan pendidikan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Internal dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Internal juga ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam

pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pengawas yang tugas pokoknya melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus menjadikan pengawas merupakan elemen terdepan dalam pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan. Dan oleh karenanya pengawas harus lebih memahami permasalahan persekolahan, dan berpikir kritis untuk menemukan solusi terbaik bagi pengembangan sekolah dan peningkatan pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan di sekolah-sekolah.

Keberhasilan pelaksanaan supervisi mutu pendidikan dalam rangka mengawal keterlaksanaan SPMI di satuan pendidikan sangat tergantung pada pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor. Dalam rentang waktu bulan

Juni sampai dengan Desember 2019 pengawas satuan pendidikan telah melaksanakan supervisi mutu pendidikan di sekolah binaan masing-masing.

Pelaksanaan supervisi mutu pendidikan telah berlangsung sesuai dengan mekanisme pelaksanaan supervisi mutu. Namun untuk mengetahui dampak tidaknya pelaksanaan supervisi mutu oleh pengawas maka penulis melaksanakan survey pada 24 Kabupaten/Kota dengan mengambil 212 responden yang terdiri dari perwakilan guru dan kepala sekolah. Tujuan dari survey ini untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan supervisi mutu oleh pengawas diantaranya; (1) dampak supervisi mutu pendidikan oleh pengawas terhadap pelaksanaan Pemetaan mutu pendidikan, (2) dampak supervisi mutu pendidikan oleh pengawas terhadap perencanaan peningkatan mutu pendidikan, (3) dampak supervisi mutu pendidikan oleh pengawas pada pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, dan (4) dampak supervisi mutu pendidikan oleh pengawas pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Internal pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.



Grafik 2.1. Dampak supervisi mutu pendidikan oleh pengawas terhadap pelaksanaan Pemetaan mutu pendidikan

Grafik di atas menunjukkan bahwa dampak supervisi mutu pendidikan pada tahap pemetaan mutu pendidikan sebagai berikut: dari 212 responden yang tersebar pada 24 Kabupaten/Kota yang terdiri dari guru dan kepala sekolah, terdapat 166 (78%) dari 212 responden menjawab bahwa dalam tahap pemetaan mutu pendidikan sekolah telah melakukan analisis data mutu berdasarkan peta mutu sekolah, terdapat 119 (56%) dari 212 responden menjawab bahwa sekolah telah menganalisis akar masalah berdasarkan data peta mutu sekolah, terdapat 116 (55%) dari 212 responden menjawab sekolah telah menyusun rekomendasi berdasarkan akar masalah yang telah ditentukan, dan terdapat 141 responden (67%) menjawab bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pemetaan mutu seperti pada uraian di atas pengawas melakukan pendampingan.

Pada grafik di atas dapat memberikan gambaran pula bahwa kinerja

tertinggi pengawas ada pada tahap analisis data mutu, dan pada tahap analisis akar masalah dan penyusunan rekomendasi masih seimbang yakni rata-rata masih pada kisaran 56% dan 55%. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak pengawas dalam melaksanakan supervisi mutu pendidikan pada tahap pemetaan mutu pendidikan belum maksimal. Kemudian tahap selanjutnya adalah hasil rekomendasi dituangkan dalam rencana peningkatan mutu pendidikan.



Grafik 2.2. Dampak supervisi mutu pendidikan oleh pengawas terhadap perencanaan peningkatan mutu pendidikan

Dampak supervisi mutu pendidikan oleh pengawas terhadap perencanaan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas bahwa, dari 212 terdapat 151 responden (71%) mengatakan bahwa sekolah sudah menyusun rencana pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, terdapat 142 (67%) dari 212 responden mengatakan bahwa sekolah mampu menentukan program prioritas berdasarkan

rekomendasi dari hasil analisis data mutu, terdapat 102 (48%) dari 212 responden mengatakan bahwa sekolah sudah menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) berdasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah, dan terdapat 152 (72%) dari 212 responden mengatakan bahwa sekolah telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Penyusunan rencana peningkatan mutu yang dilaksanakan oleh sekolah yang kemudian dituangkan dalam RKJM dengan mengutamakan program prioritas setiap tahunnya yang kemudian dijabarkan kedalam RKT dan RKAS dengan melalui pendampingan dan oleh pengawas pembina masing-masing. Dokumen rencana kerja sekolah inilah yang menjadi acuan dalam melaksanakan peningkatan mutu setiap tahun berjalan.



Grafik 2.3. Dampak Supervisi Mutu Pendidikan oleh Pengawas Terhadap Penyusunan RKS

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 212 responden yang tersebar pada 24 kabupaten/Kota sebanyak 162 responden

(76%) yang mengatakan bahwa dalam menyusun Rencana kerja Sekolah sudah mengacu pada hasil analisis data mutu dari hasil EDS, terdapat 124 responden (58%) mengatakan bahwa dalam menyusun program mengutamakan program-program prioritas terlebih dahulu, dan terdapat 44 responden (21%) mengatakan bahwa sekolah belum menggunakan hasil EDS sebagai acuan dalam menyusun RKAS. Melihat kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rencana kerja sekolah yang telah disusun berdasarkan hasil analisis data mutu belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam menyusun RKAS sekolah. Artinya bahwa RKAS belum sepenuhnya mengacu pada hasil EDS tetapi berdasarkan ketersediaan dana BOS di sekolah atau hal lain.



Grafik 2.4. Dampak supervisi mutu pendidikan oleh pengawas pada pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan.

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 212 responden yang tersebar pada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dapat diketahui bagaimana dampak supervisi mutu pendidikan oleh pengawas pada

pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaan masing-masing. Dari 212 responden terdapat 155 responden (73%) mengatakan bahwa satuan pendidikan telah melaksanakan kegiatan peningkatan mutu sesuai dengan yang direncanakan, terdapat 152 responden (72%) yang mengatakan satuan pendidikan telah menerapkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, terdapat 138 responden (65%) mengatakan bahwa satuan pendidikan telah melaksanakan aktivitas literasi dengan berbagai moda, terdapat 113 responden (53%) yang mengatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan telah menjadi teladan dalam berliterasi, terdapat 109 responden (51%) mengatakan bahwa guru sudah mengintegrasikan penguatan karakter dalam pembelajaran, terdapat 137 responden (65%) mengatakan bahwa guru sudah menggunakan metode, media pembelajaran yang sesuai dengan materi, terdapat 141 responden (67%) mengatakan bahwa guru menggunakan berbagai sumber belajar, terdapat 113 responden (53%) mengatakan bahwa guru membuat perencanaan pembelajaran, dan terdapat 152 responden (72%) mengatakan bahwa guru telah melakukan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Memperhatikan grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi mutu oleh pengawas di sekolah binaan masing-masing sudah berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Semua aktivitas perbaikan mutu pembelajaran sudah dilaksanakan dan sudah memenuhi di atas rata-rata.

Selanjutnya untuk megetahui keberhasilan program minimal pada akhir tahun satuan pendidikan dengan didampingi oleh pengawas melakukan monitoring dan evaluasi internal.



Grafik 2.5. Dampak Supervisi Mutu Pendidikan oleh Pengawas Terhadap Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal

Kegiatan monev internal bukanlah kegiatan untuk menjustifikasi dan mencari-cari kesalahan tetapi merupakan aktivitas tindakan perbaikan. Tim Monev Internal dilakukan oleh tim monev internal dalam TPMPS. Monev internal dilakukan untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Seluruh langkah dalam siklus

penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan berbasis satuan pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Hasil dari pelaksanaan monev internal tentu melahirkan temuan-temuan. Temuan yang baik atau positif adalah disebut dengan *best practice*. *Best practice* sebagai hal-hal baik yang telah dilakukan. Selain temuan positif ada juga temuan yang sifatnya negatif atau kurang baik. Temuan negatif inilah yang memerlukan tindakan perbaikan atau *area for improvement*.

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa dampak dari pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal setiap sekolah sudah berjalan walaupun masih sangat sedikit sekolah yang memahami betul atau punya komitmen untuk melaksanakannya. Dari hasil survey yang dilakukan pada 24 Kabupaten/Kota terdapat 159 responden (75%) mengatakan bahwa di sekolah mereka sudah terbentuk tim monev internal. Kemudian terdapat 93 responden (44%) mengatakan bahwa sekolah mereka sudah mengembangkan instrumen monev internal, dan yang sudah melaksanakan monev internal pada tahun 2019 terdapat 67 responden (32%). Pada pernyataan

sekolah yang sudah menyusun laporan hasil monev terdapat 70 responden (33%) dan 94 responden (44%) mengatakan bahwa sekolahnya memiliki dokumentasi hasil monev internal. Dari gambaran di atas dapat diperoleh data bahwa pelaksanaan monev internal sampai kepada pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan peningkatan mutu masih dibawah rata-rata. Dengan adanya pendampingan dan supervisi pengawas secara berkelanjutan dan sekolah memiliki komitmen yang tinggi, maka lambat laun sekolah akan terbiasa untuk melakukan monev untuk perbaikan.

Simpulan dan Rekomendasi

Pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas di satuan pendidikan telah terlaksana efektif mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2019 dengan melakukan pendampingan pelaksanaan EDS, mendampingi menganalisis permasalahan mutu sekolah, menyusun rencana peningkatan mutu, melakukan upaya peningkatan mutu, dan mengevaluasi hasil peningkatan mutu. Dampak pelaksanaan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas terhadap implementasi SPMI adalah sekolah telah melaksanakan pemetaan mutu pendidikan,

merencanakan peningkatan mutu, melaksanakan peningkatan mutu, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi internal. Namun pelaksanaannya belum maksimal terutama pada pendampingan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dan evaluasi hasil peningkatan mutu, begitupula dengan dampak yang dihasilkan masih sangat rendah pada pelaksanaan evaluasi internal. Oleh karena itu, pelaksanaan supervisi mutu masih harus dimaksimalkan terutama pada program peningkatan mutu dan evaluasi internal pada masing-masing satuan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Arif Tiro.2009. *Statistika Terapan*. Andira Karya Mandiri. Makassar. Andira Publisher.
- Barnawi M Arifin. 2017. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori dan Praktek*). Jogyakarta. Aruzz Media.
- Edward Sallis, Alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi dkk.2011. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Ircisod. Sampangan Banguntapan. Jogyakarta.
- Kemdikbud. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Mutu Pendidikan*. Dirjen Dikdasmen.
- Kemdikbud. 2018. *Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah*. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan. Dirjen GTK.
- Kemdikbud. 2017. *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Dirjen Dikdasmen.
- Kemdikbud. 2017. *Juklak Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*. Dirjen Dikdasmen.
- Kemdikbud. 2015. Buku kerja Pengawas Sekolah. Pusbangtendik. BSDMP & PMP.
- Sani, Ridwan Abdullah dkk. 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- PermenPAN & RB Nomor: 21 tahun 2010 tentang *Jabatan Fungsional Pengawas*
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING PADA KEGIATAN BELAJAR DARI RUMAH SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Rahmatiah

Widyaiswara LPMP Sulawesi Selatan

Email: rchmtya@gmail.com

Abstrak: Penelitian tentang efektivitas pembelajaran daring pada kegiatan Belajar dari Rumah selama masa pandemi COVID-19 bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan pembelajaran daring pada kegiatan Belajar Dari Rumah sebagai salah satu alternatif pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Data diperoleh dengan menyebarkan instrument melalui WhatsApp group dengan menggunakan program Microsoft Form. Responden penelitian ini berjumlah 87 orang responden perwakilan guru di propinsi Sulawesi Selatan. Hasil survey menunjukkan bahwa pembelajaran daring memberi hasil efektif bagi pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

Kata kunci: Belajar dari Rumah, Pembelajaran daring, Pandemi Covid 19, Responden

Kondisi saat ini, wabah pandemi COVID-19 telah meluas ke seluruh dunia, lebih dari 213 negara. Di awal Maret 2020, virus ini masuk ke Indonesia, virus ini menjadi momok yang menakutkan karena penyebarannya yang begitu cepat di antara banyak orang. Sampai bulan Juni 2020 data WHO virus ini sudah menginfeksi 8.555.402 jiwa positif mengidap covid 19 di seluruh dunia, dimana di Indonesia wabah COVID-19 telah menginfeksi 42.765 jiwa dan tiap hari terjadi penambahan jumlah kasus. Akibat pandemi dari COVID-19 memicu kegiatan sosial dan kemasyarakatan terbatas termasuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Akibatnya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari rumah

yang diistilahkan sebagai BDR. Secara sosial BDR bertujuan menahan laju penularan wabah virus corona. Dengan ditetapkannya kebijakan belajar dari rumah tak hanya berdampak pada perubahan lokasi kegiatan belajar mengajar. Hastag #dirumahaja digaungkan secara massif di semua media sosial dengan maksud agar orang tidak beraktivitas di luar rumah yang mengkhawatirkan penyebaran COVID-19. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pendidik untuk menyusun strategi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Dalam menanggulangi dampak COVID-19, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menetapkan

bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap kegiatan yang bersifat komunal atau menghimpun orang banyak dalam suatu tempat. Satuan pendidikan merupakan institusi yang diliburkan dan peserta didik melakukan proses pembelajaran dari rumah.

Dalam situasi darurat bencana, merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dalam situasi darurat, pendidikan harus tetap berlangsung dengan akses dan layanan pendidikan pendidikan harus tetap berlangsung dengan akses dan layanan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan berpusat pada pemenuhan hak pendidikan anak. Survey yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) terhadap 1700 responden sebesar 76,7 % peserta didik merasa tidak senang belajar dari rumah karena tugas

menumpuk, tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan, dan waktu belajar yang sempit. Sementara 23,30% peserta didik merasa senang belajar di rumah karena tidak perlu bangun pagi selama belajar dari rumah.

Sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 dimana pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19 bertujuan untuk: (1) Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19; (2) Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19; (3) Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan; (4) Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

Belajar dari rumah melalui system pembelajaran jarak jauh sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 yaitu: (1) Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga

satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR; (2) Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum; (3) BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19; (4) Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik; (5) Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR; (6) Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; (7) Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

Kebijakan Pendidikan di masa pandemi dengan Belajar Dari Rumah sesuai dengan pendapat Chaeruman (2018) yang menyatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19

menyadarkan orang mengenai ruang belajar tatap muka (Ruang belajar 1) bukanlah satu-satunya ruang belajar, masih ada ruang belajar 2,3 dan 4 bahwa aktivitas pembelajaran ada 4 type yang dikenal dengan istilah ruang belajar 1 s.d 4, yaitu: (1) Ruang Belajar 1 Tatap Muka (*Live Synchronous Learning*) merupakan pembelajaran antara pembelajar dan pemelajar terjadi pada waktu yang bersamaan dan ruang yang sama; (2) Ruang Belajar 2 Tatap Maya (*Virtual Synchronous Learning*) pembelajaran antara pembelajar dan pemelajar terjadi pada waktu yang bersamaan tapi ruang yang berbeda satu sama lain; (3) Ruang Belajar 3 Mandiri (*Self directed Asynchronous Learning*) belajar mandiri kapan saja dan di mana saja seuai dengan kondisi dan kecepatan beajar masing-masing; (4) Ruang Belajar 4 Kolaboratif (*Collaborative Asynchronous Learning*) belajar apa dan di mana saja bersama narasumber lain (siswa,dosen, praktisi dan lain-lain).

Teori tentang virtual learning dikutip dari pendapat beberapa ahli di antaranya Pannen (1999) *Virtua learning* mengacu pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas maya yang berada dalam *cyber space* melalui jaringan Internet.

Menurut Wilson (1996) pembelajaran virtual merupakan lingkungan pembelajaran berbasis computer yang relative terbuka dan memungkinkan siswa untuk secara aktif berinteraksi satu sama lain dan memperoleh akses pada berbagai sumber belajar.

Pendapat Pannen dan Wilson sejalan dengan teori kelebihan belajar virtual di antaranya prinsip belajarnya fleksibel: kapan saja, di mana saja untuk siapa saja. Sumber belajar amat terbuka dan banyak sekali yang memungkinkan antar siswa, atau antara guru dan siswa, saling memperkaya sumber belajar secara kolaboratif. Materi makin aktual dan mudah di *update*, dikoreksi, diperbarui dan diperkaya. Merangsang siswa dan guru semakin kreatif dan inovatif. Lebih murah, efisien, dan simple, cocok untuk kondisi pandemic, bisa dilakukan dirumah (*Learning from Home*). Pembelajaran lebih asyik dan menarik bahkan dapat learning by doing (Cecep Darmawan, 2020).

Kelemahan Pembelajaran Virtual diantaranya: Masalah Teknis: Jaringan, Fasilitas dan akses terhadap Internet, sedangkan masalah non teknis diantaranya : (1) Kurang interaktif; (2) Low Involvement; (3) Kadang Low respon

dan afeksi siswa tidak terdeteksi; (4) Perlu kemandirian , kedisiplinan dan kesiapan belajar siswa; (5) Sebagian SDM Pendidikan belum sepenuhnya paham IT; (6) Kurang pengawasan dan Monev.

Selama pembelajaran daring peserta didik dan pendidik mampu menerapkan kompetensi Abad 21 yang dicapai melalui Pembelajaran Daring selama Belajar dari Rumah (BDR) diantaranya: keahlian dalam inovasi pembelajaran (*Learning and Innovation Skills*), kemampuan untuk membaca, menganalisis data dan informasi digital (*Data Literacy*), kemampuan untuk memahami dan menggunakan aplikasi teknologi (*Technology Literacy*), kemampuan untuk berkomunikasi, kolaborasi dengan orang lain (*Human Literacy*), kemampuan untuk memahami informasi dan media online (*Information and online media ability*).

Pembelajaran jarak jauh melalui Belajar dari Rumah memang masih menjadi polemik karena 90% dilaksanakan secara daring dimana pembelajaran secara daring butuh biaya yang dianggap mahal bagi sebagian peserta didik.

Penulis membuat penelitian survey yang di sebar ke bapak/ibu guru Sulawesi

Selatan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring pada kegiatan Belajar dari Rumah sebagai alternatif pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana keefektifan pembelajaran daring pada kegiatan Belajar Dari Rumah sebagai salah satu alternatif pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Adapun Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah:

1. Kecakapan hidup apa yang diperoleh guru dan peserta didik selama belajar daring pada kegiatan BDR?
2. Kesulitan yang dialami guru dan peserta didik melalui pembelajaran daring selama BDR
3. Tantangan pembelajaran daring bagi guru selama BDR
4. Apakah pembelajaran daring efektif dilaksanakan selama BDR di masa pandemi COVID-19?

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan membuat survey BDR menggunakan aplikasi Forms Microsoft Office melalui laman
<https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=id-ID#Analysis=true&FormId=ncWAqlTxl0m7S9VZxGPIaMCKjUED4jdOiaQkbuR-fU9URTBXNIRaRFg1MVEwWTZPM1NSRUxNUUpZT>

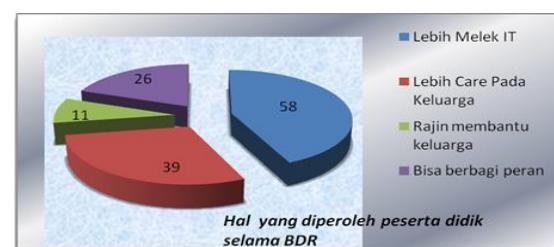
Survey berupa pertanyaan terbuka dan pilihan opsi berupa kotak sehingga responden bisa menjawab lebih dari satu opsi. Survey diisi oleh responden mewakili guru-guru di kab/kota Sulawesi Selatan jenjang SD sebanyak 47 orang, guru jenjang SMP sebanyak 20 orang dan guru jenjang SMA sebanyak 20 orang.

Survey disebar melalui aplikasi WA Grup Guru Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan. Dari 150 orang member grup, ada 87 orang guru yang mengisi survei. Survey disebar secara acak. Pada tanggal 23 Juni s.d. 2 Juli 2020.

HASIL PENELITIAN

- 1. Kecakapan hidup yang diperoleh selama belajar daring pada kegiatan BDR**

Penelitian survey tentang kecakapan hidup terlihat pada grafik 1, grafik 2 dan grafik 3.



Grafik 1. Hal yang diperoleh peserta didik.

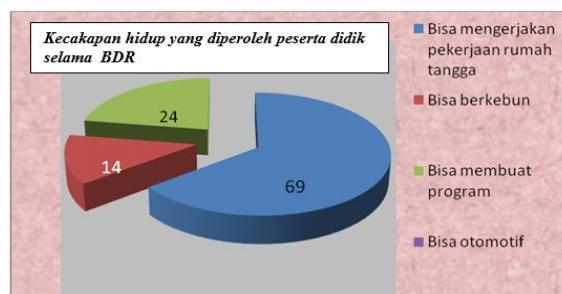
Kecakapan yang diperoleh peserta didik selama Belajar dari Rumah dari 87 responden 58 orang yang menjawab mereka lebih melek IT atau sekitar 67% kemudian 39 orang (45%) yang menjawab mereka lebih care pada keluarga, ada 11 orang (13%) rajin membantu saudara dan ada 26 orang (30%) yang menjawab mereka bisa berbagi peran.

Ada 47 responden yang menjawab lebih dari satu option, umumnya mereka menjawab lebih melek IT dan lebih care pada keluarga (18 orang) dan yang lain menjawab lebih melek IT dan bisa berbagi peran (8 orang) ada 21 orang yang menjawab 3 atau 4 option sekaligus.

Dari Hasil yang diperoleh menandakan bahwa Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring memberi manfaat bagi guru yaitu guru lebih paham IT. Mengapa? karena Belajar dari Rumah tidak memungkinkan Guru dan peserta didik bertatap muka secara langsung sehingga pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online dan alat yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring adalah laptop/PC/tablet/hp dengan jaringan internet sebagai penghubung. Hal ini memicu guru untuk belajar teknologi dan informasi agar dapat melaksanakan

pembelajaran walaupun tidak bertatap muka.

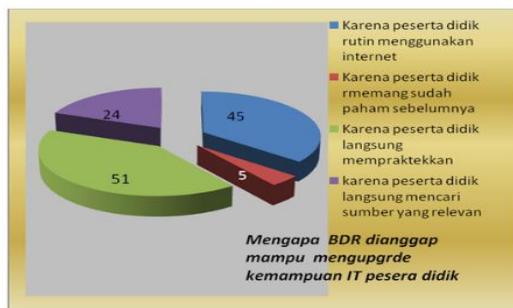
Manfaat lain dari belajar Dari Rumah adalah lebih care pada keluarga hubungan sosial yang selama ini dibatasi dengan ruang gerak karena kesibukan masing-masing anggota keluarga ternyata dapat bersatu kembali selama BDR. Pendidik mendapatkan manfaat dengan lebih dekat dengan keluarga. Untuk option bisa berbagi peran, selama proses BDR guru sebagai orang tua bisa saling membantu dengan anggota keluarga lainnya dengan berbagi peran.



Grafik 2. Kecakapan hidup yang diperoleh peserta didik selama BDR.

Selama BDR peserta didik memperoleh kecakapan hidup diantaranya bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. bisa membuat pogram dan berkebun. Dari 87 responden ada 17 orang yang menjawab lebih dari satu option. Umumnya peserta didik mendapatkan kecakapan hidup selama BDR, ada 69 orang (65%) yang menjawab mampu mengerjakan pekerjaan

rumah tangga. 24 orang (22%) peserta didik mampu membuat program computer dan ada 14 orang (13%) peserta didik yang mampu berkebun. Dari survey ini diketahui bahwa BDR memberi kecakapan hidup yang positif bagi peserta didik.



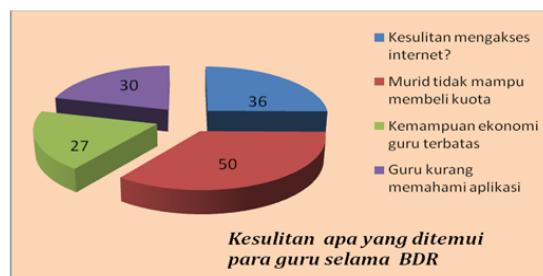
Grafik 3. Kemampuan BDR mengupgrade kemampuan IT Peserta Didik.

Dari hasil survey diketahui bahwa BDR memberi manfaat positif bagi peserta didik. Kemampuan IT peserta didik terupgrade karena peserta didik langsung menggunakan internet. Dari 87 responden yang menjawab bahwa kemampuan IT mereka mengalami peningkatan, 45 orang (52%), menjawab karena rutin menggunakan internet, 51 orang (59%) menjawab karena selama selama BDR peserta didik langsung menggunakan computer yang terkoneksi internet, 24 orang (28%) menjawab terupgrade kemampuan ITnya karena langsung mencari sumber yang relevan. Hanya 5 orang (6%) yang menjawab karena peserta didik sudah paham sebelumnya.

Dari hasil survey ini disimpulkan bahwa sisi positif dari pembelajaran daring pada kegiatan BDR memberi kemampuan tambahan bagi peserta didik dari segi IT. BDR mengupgrade kemampuan IT peserta didik. Peserta didik sudah mampu menerapkan kecakapan abad 21.

2. Kesulitan yang dialami guru dan peserta didik selama BDR

Kesulitan yang dialami guru selama BDR pada grafik 4 dan kesulitan yang dialami peserta didik terlihat pada grafik 5.



Grafik 4. Kesulitan yang ditemui guru selama BDR.

Selama Belajar Dari Rumah, tentunya ada kesulitan yang dialami oleh para guru, diantaranya kesulitan mengakses internet untuk point ini ada 36 orang (41%) responden yang mengalami kesulitan mengakses internet, ada 50 responden (57%) yang menjawab murid tidak mampu membeli kuota. 27 orang (31%) responden menjawab kemampuan ekonomi terbatas dan sekitar 34% atau 30 orang responden yang menjawab mereka

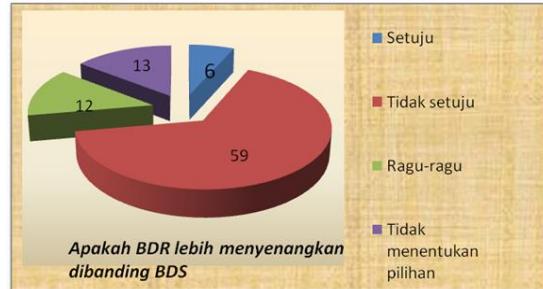
(para pendidik) kurang memahami aplikasi.



Grafik 5. Kesulitan yang ditemui oleh peserta didik selama BDR.

Dari berbagai manfaat BDR tentu saja ada kendala yang ditemui. Untuk peserta didik kesulitan yang dialami diantaranya mereka tidak faham aplikasi (35% atau 31 orang), peserta didik tidak punya pc/laptop ada 51% (44 orang), 44% atau 38 orang menjawab kuota mahal dan yang terbanyak adalah peserta didik mengalami kendala jaringan yang bermasalah sekitar 64% atau 56 orang. Pembelajaran daring selama BDR memang merupakan polemik bagi peserta didik karena selain mahal, sebagian peserta didik juga tidak memahami aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring, selain itu masalah jaringan yang kadang tidak bersahabat juga merupakan tantangan tersendiri.

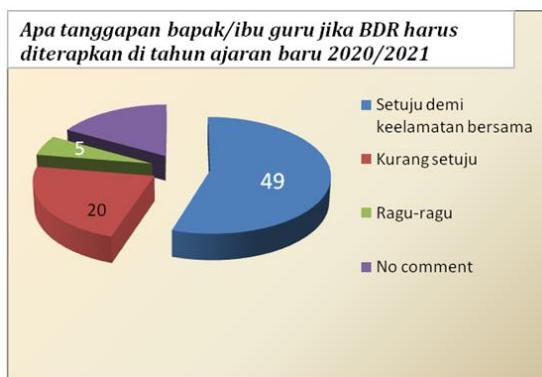
3. Tantangan pembelajaran daring bagi guru selama BDR



Grafik 6. Perbandingan BDR dengan BDS.

Untuk grafik 6 BDR merupakan tantangan bagi guru karena walaupun hal ini tidak menyenangkan namun harus dilaksanakan, hal ini terlihat dari survey apakah BDR lebih menyenangkan dibanding BDS, umumnya responden menjawab tidak setuju ada 59 orang responden (68%) menyatakan tidak setuju 6 orang responden (7%) yang setuju bahwa Belajar dari rumah lebih menyenangkan. 12 orang (14%) yang menjawab ragu-ragu dan ada 13 responden (15%) tidak menentukan pilihan. Ada 3 responden menjawab lebih dari satu option dengan pilihan tidak setuju dan ragu-ragu.

Dari hasil survei diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan BDR terpaksa dilakukan karena tidak ada pilihan lain, mengingat pandemi COVID-19 tidak memungkinkan pembelajaran dilaksanakan secara langsung atau tatap muka.



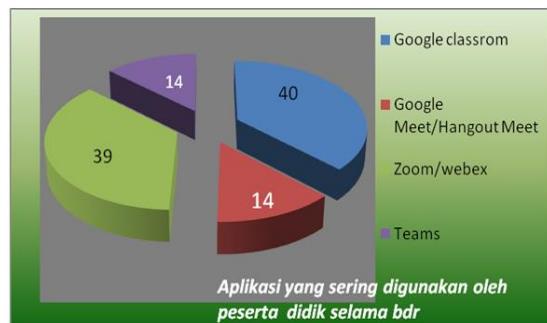
Grafik 7. Tanggapan Guru jika BDR harus diterapkan di tahun ajaran baru.

Tahun ajaran baru sudah di depan mata namun pandemi covid 19 belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir, sehingga Kemendikbud tetap mengeluarkan instruksi untuk tahun ajaran baru 2020/2021 dilaksanakan secara daring. BDR tetap dilaksanakan , untuk point ini ada 49 orang (56%) yang setuju, 20 responden kurang setuju (23%). Ada 5 responden (6%) yang merasa ragu-ragu dan 15 orang lainnya (17%) menjawab no comment.

Dari hasil survei ini disimpulkan bahwa 56% menyetujui bahwa BDR memang harus dilaksanakan demi keselamatan bersama.

4. Apakah pembelajaran daring efektif dilaksanakan selama BDR di masa pandemi?

Hasil survei terlihat pada grafik 8 hingga grafik 10.

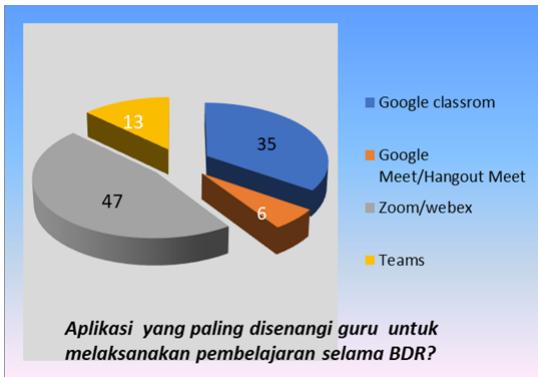


Grafik 8. Aplikasi yang sering digunakan peserta didik selama BDR.

Selama BDR peserta didik menggunakan berbagai aplikasi untuk bisa mengikuti pembelajaran. Hal ini memicu peserta didik untuk mempelajari langsung aplikasi daring agar bisa join di kelas online. Berbagai aplikasi daring diantaranya Google Classroom, Hangout Meet, Webex, Zoom ataupun Microsoft Teams. Dari hasil survei terhadap responden diperoleh jawaban ada 46% atau 40 orang responden sering menggunakan Google Classroom, 45% atau 39 orang menggunakan Zoom/Webex, 16% atau 14 orang menggunakan Hangout Meet/ Google Meet dan presentase yang sama atau 14 orang responden menggunakan Microsoft Teams.

Dampak positif dari aplikasi daring ini peserta didik mampu menerapkan kecakapan abad 21 dalam pembelajaran. Ada 20 orang responden yang menjawab lebih dari satu option yaitu

Google Classroom dan aplikasi Zoom/Webex.



Grafik 9. Aplikasi yang disenangi guru untuk melaksanakan pembelajaran selama BDR.

Hal yang sama juga dialami oleh para pendidik, BDR memaksa pendidik mampu menggunakan internet secara expert. Google Classroom, Hangout Meet, Zoom/Webex ataupun Microsoft Teams. Sesuai 3D chart diatas dapat diketahui bahwa ada 47 orang guru (54%) umumnya dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom/Webex, 35 orang guru (40%) sering menggunakan Google Classroom dan untuk Microsoft Teams ada 13 orang (15%) yang mahir menggunakan aplikasinya sementara ada 6 orang guru (7%) mahir menggunakan aplikasi Hangout Meet.



Grafik 10. Hal yang menyenangkan diperoleh pendidik selama BDR.

Selama BDR berbagai hal yang menyenangkan yang diperoleh pendidik diantaranya mereka merasa lebih dekat dengan keluarga, hal ini karena mereka tetap berada di rumah walaupun melaksanakan tugas sebagai pendidik. Untuk point ini ada 53 responden yang setuju (61%), sementara sebagian yang lain merasa lebih memahami IT selama BDR karena aplikasi BDR memaksa mereka menggunakan perangkat computer dan internet. Untuk point ini ada 45 orang yang setuju (52%). Aplikasi pembelajaran daring pada kegiatan Belajar Dari Rumah yang uptodate sesuai tuntutan revolusi 4,0 mampu dipahami oleh pedidik, setidaknya ada 29 orang responden (33%) yang menyetujui point ini, sementara 4 orang guru yang lain merasa dekat dengan peserta didik (5%).

Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Dari hasil survey diketahui selama pembelajaran daring selama BDR guru dan peserta didik mendapatkan keahlian yang sulit diperoleh jika pembelajaran masih dilaksanakan secara tatap muka. Kemampuan IT guru dan peserta didik mengalami peningkatan yang pesat karena mereka akhirnya mahir menggunakan berbagai aplikasi daring yang terkoneksi dengan internet. Guru dan peserta didik sudah mampu menerapkan kecakapan abad 21. Selain itu peserta didik juga memperoleh kecakapan hidup diantaranya mampu membuat program, bisa berkebun dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
2. Peserta didik juga mengalami kesulitan selama BDR, sebagian besar peserta didik tidak punya PC/laptop, jaringan internet bermasalah, kuota mahal dan peserta didik tidak memahami aplikasi.
3. Tantangan pembelajaran daring bagi guru selama BDR Selama BDR guru mendapatkan tantangan diantaranya jaringan internet yang bermasalah, peserta didik tidak mampu membeli kuota, kemampuan ekonomi guru

terbatas dan sebagian guru tidak memahami aplikasi.

4. Tidak semua peserta didik dan guru mampu melaksanakan pembelajaran daring karena pembelajaran daring memang butuh biaya yang bagi sebagian peserta didik dan guru terasa mahal, bagi peserta didik selain membebani orang tua, juga kondisi topografi yang bervariasi menimbulkan masalah jaringan

Saran

1. Untuk kendala pembelajaran daring sebaiknya guru melaksanakan pembelajaran secara luring. Banyak alternatif pembelajaran luring yang bisa digunakan diantaranya belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari media dan lingkungan sekitar.
2. Pembelajaran dari rumah bisa juga dilaksanakan dengan guru berkunjung dari rumah ke rumah siswa dibuat perkelompok pertemuan, hal ini bisa dilakukan jika peserta didik sama sekali tidak memiliki akses internet seperti di pulau ataupun di gunung.

3. Pembelajaran Jarak Jauh melalui Belajar Dari Rumah bisa juga dilaksanakan secara blended dengan membentuk kelompok belajar, siswa yang tidak memiliki perangkat (hp, komputer dan kuota) dikelompakkan dengan siswa yang memeliki perangkat. Tugas dikerjakan secara berkelompok dan diupload melalui WA goup ataupun Google Classroom.
4. Untuk kendala biaya Kemdikbud telah menyiapkan sekolah memfasilitasi pembelian kuota melalui Dana BOS. Pembelajaran daring pada kegiatan Belajar Dari Rumah seharusnya menjadi hal yang menyenangkan bagi peserta didik dan pendidik karena banyak segi positif yang diperoleh selama BDR namun kendala biaya menyebabkan tidak semua peserta didik bisa mengakses pembelajaran daring. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena kita belum tahu sampai kapan BDR dilaksanakan. Jumlah penderita Covid 19 masih terus bertambah setiap hari.

Daftar Pustaka

- Darmawan Cecep, 2020 Webinar nasional strategi mengatasi kejemuhan belajar virtual di masa pandemi.
- Pannen, P. (1999). Pengertian Sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Dalam Tian Belawati, dkk. (Ed.), Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.
- Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.
- Wilson, B. G. (1996). Constructivist learning environments: case studies

in instructional design. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications Uwes, Chaeruman Anis, 2020 Webinar nasional SMA Negeri Setu.

PEMENUHAN DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KOTA PALOPO PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2018

Fahrawaty

*LPMP Sulawesi Selatan
fahrawaty0998@gmail.com*

Abstract: This study aims to describe the educational quality achievements of Junior High Schools (SMP) in Palopo City, South Sulawesi Province. The type of this research is quantitative research through descriptive analysis method that utilizes secondary data in the form of the results of education quality mapping in Palopo City in 2018. The data obtained are the results of the School Quality Report from 22 junior high schools in Palopo City in 2018. Quality achievements are analyzed based on the achievement of categories from each standard on 8 National Education Standards. After analyzing the data, it was concluded that there were no standards that met the National Education Standards. Therefore, both internal and external parties of the school need to improve the quality of each standard, especially on the Standards of Educators and Education Personnel and the Standards for Facilities and Infrastructure.

Keywords: quality, standard, education, quality report, school.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Artinya penjaminan mutu pendidikan adalah suatu keharusan bagi setiap satuan pendidikan demi memastikan pemberian layanan pendidikan yang berkualitas.

Menurut Sani (2015:6), mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal (peserta didik, pendidik, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya) maupun eksternal (calon peserta didik,

orang tua, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan industri), dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan acuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Adapun acuan yang digunakan adalah 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini berarti bahwa setiap satuan pendidikan dapat melakukan pemenuhan terhadap standar tersebut atau bahkan melampaunya. Jika belum mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan, maka satuan pendidikan dapat memusatkan perhatian kepada aspek-aspek

yang belum terpenuhi. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, setiap satuan pendidikan perlu mengikuti mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan agar penyelenggaraan pendidikan benar-benar memenuhi acuan yang telah diberikan yakni 8 Standar Nasional Pendidikan. Pada pelaksanaannya, penjaminan mutu pendidikan selanjutnya dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

SPMI memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan mutu pendidikannya secara internal demi terciptanya budaya mutu. Budaya mutu hanya akan tercipta jika seluruh komponen sekolah berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan perannya masing-masing secara optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Satori (2014:2) bahwa kunci mutu pendidikan nasional terletak

pada mutu pendidikan sekolah dan kunci mutu sekolah terletak pada kegiatan belajar mengajar di kelas.

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal, satuan pendidikan perlu mengikuti langkah-langkah berupa siklus SPMI yang telah ditetapkan. Siklus tersebut antara lain pemetaan mutu satuan pendidikan, perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan, pelaksanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi, serta penetapan standar mutu. (Dirjen Dikdasmen, 2017:12). Senada dengan pendapat Fattah (2013:16), bahwa model sistem penjaminan mutu terdiri dari kebijakan, implementasi, evaluasi, strategi, dan tindak lanjut. Jika semua siklus tersebut dilaksanakan dengan baik, maka pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan akan tercapai dengan baik pula.

Untuk mempermudah pemahaman tentang tahapan perkembangan pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal, satuan pendidikan dapat menggunakan kategori capaian yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
Menuju SNP 1	0.00	2.04
Menuju SNP 2	2.05	3.70
Menuju SNP 3	3.71	5.06
Menuju SNP 4	5.07	6.66
SNP	6.67	7.00

Tabel 1.1. Kategori Capaian 8 SNP.

Setelah memahami kategori di atas, maka satuan pendidikan akan mampu menarik kesimpulan awal tentang kelemahan dan kekuatannya dalam pencapaian 8 SNP yakni: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan.

Masing-masing standar tersebut diikuti oleh indikator dan sub indikator yang menjadikan capaian tiap standar lebih spesifik dan mudah untuk dipetakan untuk langkah-langkah peningkatan mutu selanjutnya (Dirjen Dikdasmen, 2017). Kategori tersebut selanjutnya menjadi acuan di tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat propinsi dalam menentukan capaian mutunya. Selanjutnya, setiap capaian akan dianalisis dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

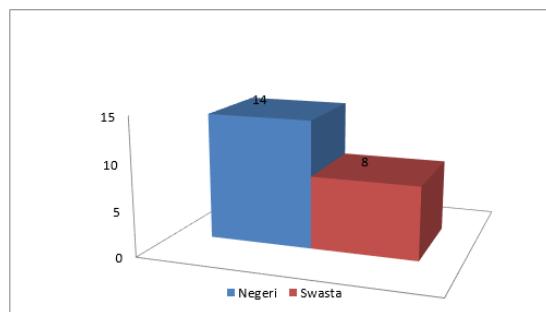
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui metode analisis deskriptif yang memanfaatkan data sekunder berupa hasil PMP Kota Palopo Tahun 2018. Proses penginputan data

dilakukan dengan menggunakan aplikasi Dapodik dan PMP yang melibatkan responden dari unsur kepala sekolah, guru, siswa, komite, dan pengawas sekolah. Data yang telah diinput diolah menjadi output yang selanjutnya dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

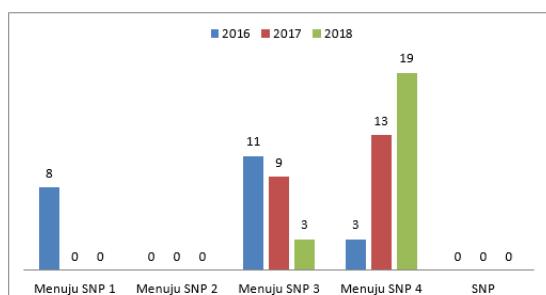
1. Jumlah Sekolah

Pada pemetaan tahun 2018, diperoleh data jumlah SMP di Kota Palopo yakni SMP Negeri sebanyak 14 dan SMP Swasta sebanyak 8 sekolah. Jumlah secara keseluruhan adalah 22 SMP sebagaimana yang tergambar pada grafik berikut:



Grafik 1.1. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Palopo.

2. Capaian Per Kategori



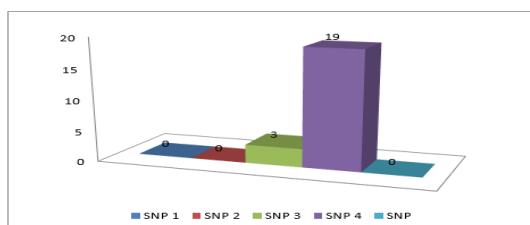
Grafik 1.2 Capaian Per Kategori Jenjang SMP Kota Palopo Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan grafik di atas, diperoleh data bahwa pada tahun 2016, terdapat 8 sekolah yang berada pada kategori Menuju SNP 1, 11 sekolah yang berada pada kategori Menuju SNP 3, dan 3 sekolah berada pada kategori Menuju SNP 4. Selanjutnya pada tahun 2017, ada 9 sekolah yang berada pada kategori Menuju SNP 3, dan 13 sekolah berada pada kategori Menuju SNP 4. Pada tahun 2018, terdapat 3 sekolah yang berada pada kategori Menuju SNP 3, dan 19 sekolah yang berada pada kategori Menuju SNP 4.

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, belum ada SMP di Kota Palopo yang mencapai SNP. Namun demikian, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari capaian pada tahun 2018.

1. Profil Pemenuhan SNP Jenjang SMP

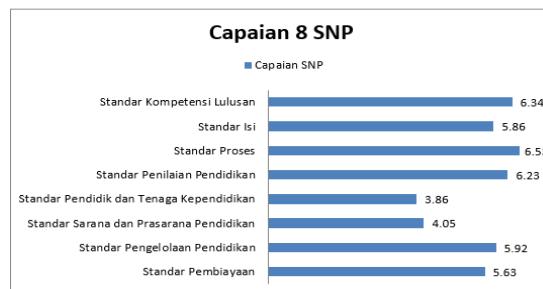
Setelah berhasil melakukan pemetaan mutu pada tahun 2018 terhadap 22 SMP, maka diperoleh informasi tentang capaian 8 SNP seperti pada grafik berikut ini.



Grafik 1.3. Capaian 8 SNP pada Jenjang SMP Tahun 2018.

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 22 sekolah yang berhasil dipetakan pada tahun 2018, belum ada satu pun sekolah yang berhasil mencapai kategori SNP. 19 SMP berhasil mencapai kategori Menuju SNP 4 dan 3 sekolah lainnya berhasil mencapai kategori Menuju SNP 3. Tidak terdapat sekolah yang berada pada capaian kategori Menuju SNP 1 dan Menuju SNP 2.

Adapun capaian setiap standar pada 8 Standar Nasional Pendidikan dapat dicermati pada grafik berikut:



Grafik 1.4. Capaian SNP Jenjang SMP Kota Palopo Tahun 2018

Berdasarkan grafik di atas, belum ada satu standar pun yang berada pada capaian SNP dengan nilai 6.67-7.00. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Standar Pembiayaan masing-masing telah mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan kisaran nilai 5.07-6.66. Sementara 2 standar lainnya yaitu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta

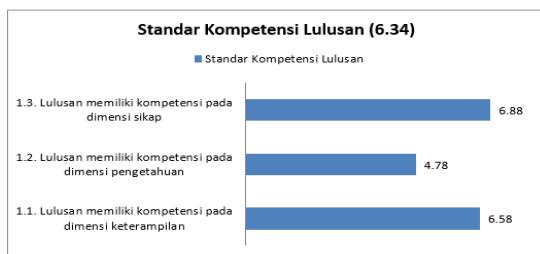
Standar Sarana dan Prasarana berada pada capaian Menuju SNP 3 dengan kisaran nilai 3.71-5.06.

2. Capaian Mutu Per Indikator

Setelah mencermati gambaran umum capaian 8 SNP Jenjang SMP Kota Palopo yang terdiri dari 22 SMP yang berhasil dipetakan, maka capaian mutu per indikator dan sub indikator akan disertakan beserta rekomendasi yang diperlukan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan capaian mutu pada tahun-tahun yang akan datang.

a. Capaian Mutu Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) terdiri dari tiga indikator dan 17 sub indikator. Secara garis besar, standar ini berisi 3 aspek yaitu kompetensi lulusan pada dimensi sikap, kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan, dan kompetensi sikap pada dimensi keterampilan, yang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Grafik 1.5. Capaian SNP Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memiliki capaian nilai 6.34 atau Menuju SNP 4. Capaian pada Indikator 1.1 berada pada kategori SNP dengan capaian nilai 6.88. Semua sub indikator pada Indikator 1.1 telah mencapai SNP.

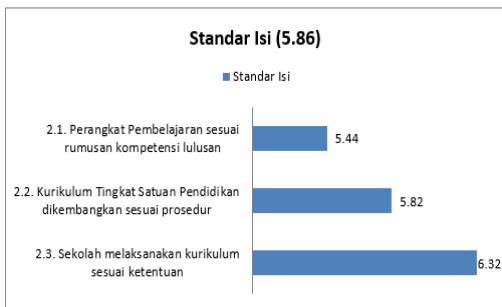
Selanjutnya, pada Indikator 1.2 capaianya berada pada kategori Menuju SNP 3 dengan capaian nilai 4.78 yang diwakili oleh 1 Sub Indikator yaitu Sub Indikator 1.2.1. Indikator berikutnya adalah Indikator 1.3 dengan capaian nilai 6.58 dengan 4 Sub Indikator pada kategori SNP. Terdapat 2 Sub Indikator berada pada kategori Menuju SNP 4.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dihasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan perlu mengupayakan peningkatan kompetensi lulusan terutama pada dimensi pengetahuan yakni pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
2. Satuan pendidikan perlu mengupayakan peningkatan kompetensi lulusan terutama pada dimensi keterampilan yakni keterampilan berpikir dan bertindak kreatif dan produktif.

b. Capaian Mutu Standar Isi

Standar Isi memuat 3 Indikator dan 13 Sub Indikator. Indikator pertama berisi perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan rumusan kompetensi lulusan. Indikator kedua berisi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikembangkan sesuai prosedur, dan Indikator ketiga terkait dengan pelaksanaan kurikulum sesuai ketentuan, sebagaimana pada grafik berikut:



Grafik 1.6 Capaian SNP Standar isi

Grafik 1.6 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Standar Isi memiliki capaian nilai 5.86 atau Menuju SNP 4. Pada Indikator 2.1 capaian nilai adalah 5.44 atau Menuju SNP 4 dengan Sub Indikator berkategori Menuju SNP 4 secara keseluruhan. Selanjutnya pada Indikator 2.2 capaiannya berada pada nilai 5.82 atau menuju SNP 4. Salah satu Sub Indikator yaitu 2.2.2 telah mencapai kategori SNP dengan nilai 6.98. Indikator 2.3 berada pada capaian nilai 6.32 atau

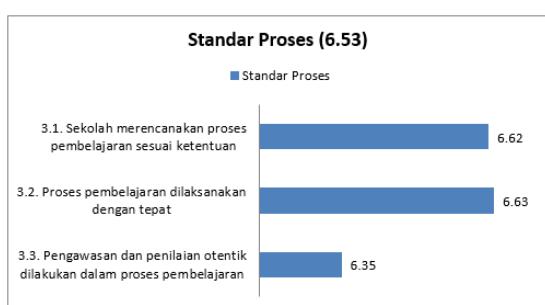
Menuju SNP 4. Sub Indikator 2.3.1 berada pada kategori SNP dengan nilai 6.99. 3 Sub Indikator lainnya masih Menuju SNP 4.

Dari capaian-capaian tersebut di atas, maka diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

1. Perangkat pembelajaran perlu disesuaikan dengan rumusan kompetensi antara lain yang memuat karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu perlu adanya penyesuaian tingkat kompetensi siswa dan ruang lingkup materi pembelajaran.
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur yang melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum, melewati tahapan operasional pengembangan, dan memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan.
3. Satuan pendidikan perlu melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan dengan mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi, melaksanakan aspek kurikulum pada muatan lokal, dan melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa.

c. Capaian Mutu Standar Proses

Standar berikutnya adalah Standar Proses yang dapat dibagi dalam 3 Indikator yang berisi tentang perencanaan proses pembelajaran sesuai ketentuan, proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat, serta pelaksanaan dan penilaian otentik dilaksanakan selama proses pembelajaran. Capaian tiap indikator dapat dilihat pada data di bawah ini:



Grafik 1.7. Capaian SNP Standar Proses

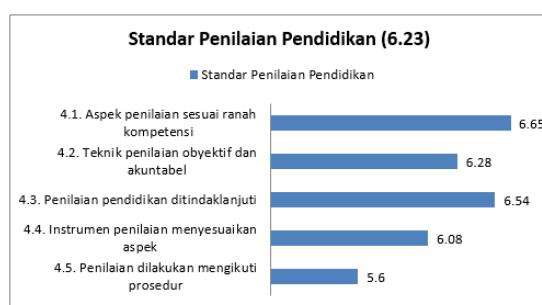
Tidak jauh berbeda dengan dua standar sebelumnya, Standar Proses juga secara umum berada pada kategori Menuju SNP 4 dengan capaian nilai 6.53. Semua Indikator pada standar ini telah masuk pada kategori Menuju SNP 4. Indikator 3.1 mencapai nilai 6.62 dengan 2 Sub Indikator yang berkategori SNP. Selanjutnya indikator 3.2 yang mencapai nilai 6.63 yang ditandai dengan adanya 9 Sub Indikator yang berkategori SNP. Indikator 3.3 berada pada nilai 6.35 dengan 1 Sub Indikator pada bernilai 6.84 atau berkategori SNP.

Sesuai dengan capaian grafik di atas, maka diperoleh rekomendasi berikut ini:

1. Satuan pendidikan perlu merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan dengan menyusun dokumen rencana yang lengkap dan sistematis serta mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah.
2. Satuan pendidikan perlu melaksanakan proses pembelajaran secara tepat antara lain dengan mengelola kelas sebelum pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan kebenaran multidimensi, melaksanakan pembelajaran menuju keterampilan aplikatif, menerapkan pembelajaran sesuai karakteristik siswa, memanfaatkan media pembelajaran, dan menggunakan aneka sumber belajar.
3. Satuan pendidikan perlu melakukan pengawasan dan penilaian otentik dalam proses pembelajaran seperti melakukan penilaian otentik secara komprehensif, melakukan pemantauan proses pembelajaran, melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru, mengevaluasi proses pembelajaran dan menindaklanjutinya.

d. Capaian Mutu Standar Penilaian Pendidikan

Standar ini terdiri dari 5 Indikator dan 12 Sub Indikator yang memuat tentang aspek penilaian yang sesuai ranah kompetensi, teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel, penilaian pendidikan yang ditindaklanjuti, instrumen penilaian yang menyesuaikan aspek, dan penilaian yang dilakukan mengikuti prosedur. Adapun capaian mutu pada standar ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1.8. Capaian SNP Standar Penilaian Pendidikan

Berdasarkan grafik di atas, capaian Standar Penilaian Pendidikan mencapai nilai 6.23 atau Menuju SNP 4. Semua Indikator pada standar ini telah berkategori Menuju SNP 4. Indikator 4.1 berada pada nilai 6.65 dengan satu Sub Indikator berkategori SNP. Selanjutnya Indikator 4.2 memperoleh nilai 6.28.

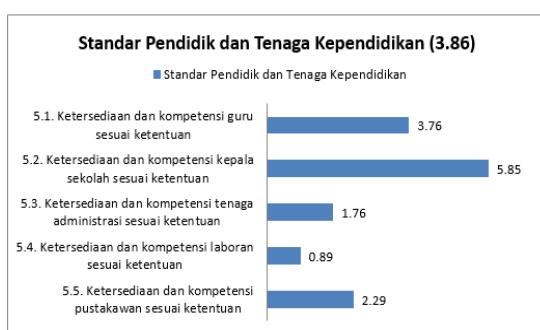
Salah satu Sub Indikatornya telah berkategori SNP. Indikator 4.3 memiliki capaian 6.54 dengan salah satu Sub

Indikator yang berkategori SNP. Selanjutnya Indikator 4.4 dengan capaian nilai 6.08 atau berkategori Menuju SNP 4. Terakhir, Indikator 4.5 yang mencapai nilai 5.6 dengan 2 Sub Indikator berkategori Menuju SNP 4 dan 1 Sub Indikator berkategori Menuju SNP 3.

Dari data di atas, maka dirumuskan rekomendasi, yakni:

1. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan aspek penilaian dengan ranah kompetensi yang mencakup bentuk pelaporan sesuai ranah.
 2. Sekolah perlu memiliki perangkat teknik penilaian yang lengkap.
 3. Satuan pendidikan perlu melakukan pelaporan penilaian secara periodik.
 4. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan aspek dengan menggunakan instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 5. Satuan pendidikan perlu melakukan penilaian sesuai prosedur dengan melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara dan ranah, serta menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai.
- e. Capaian Mutu Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**
- Standar ini memuat 5 Indikator beserta 27 Sub Indikator penyertanya.

Indikator tersebut berisi tentang ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan, ketersediaan kepala sekolah sesuai ketentuan, ketersediaan tenaga administrasi sesuai ketentuan, ketersediaan laboran sesuai ketentuan, dan ketersediaan pustakawan sesuai ketentuan.



Grafik 1.9 Capaian SNP Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Grafik di atas menunjukkan capaian pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berada pada nilai 3.86 atau Menuju SNP 3. Kategori pada standar ini cukup beragam yakni Indikator 5.1 berada pada nilai 3.76 atau Menuju SNP 3.

Selanjutnya pada Indikator 5.2 dengan nilai 5.85 atau Menuju SNP 4. Indikator 5.3 berada pada kategori Menuju SNP 1 dengan nilai 1.76. Berikutnya pada Indikator 5.4 memiliki capaian nilai 0.89 atau Menuju SNP 1. Terakhir adalah Indikator 5.5 dengan kategori Menuju SNP 2 dengan capaian nilai 2.29.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, maka diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan perlu memastikan ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan yaitu Berkualifikasi minimal S1/D4, tersedia untuk tiap mata pelajaran, bersertifikat pendidik, berkompetensi pedagogik minimal baik, dan berkompetensi profesional minimal baik.
2. Satuan pendidikan perlu memastikan ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan yakni Berkualifikasi minimal S1/D4, berusia sesuai kriteria saat pengangkatan, berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan, berpangkat minimal III/c atau setara, bersertifikat pendidik, bersertifikat kepala sekolah, serta berkompetensi kepribadian minimal baik, berkompetensi manajerial minimal baik, berkompetensi kewirausahaan minimal baik, berkompetensi supervisi minimal baik, dan berkompetensi sosial minimal baik.
3. Satuan pendidikan perlu memastikan ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan antara lain tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi dan memiliki Tenaga

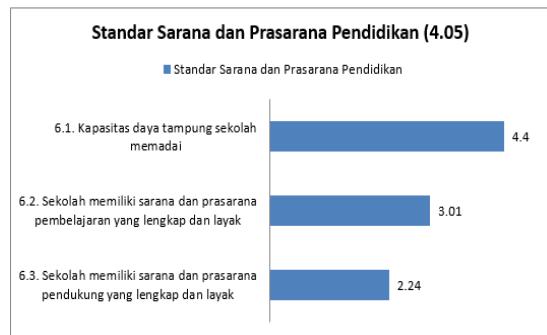
Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan.

4. Satuan pendidikan perlu memastikan ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan yaitu tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi dan berpengalaman sesuai, dan tersedia Tenaga Laboran.

5. Satuan pendidikan perlu memastikan ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan yaitu tersedia Kepala Tenaga Pustakawan, memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi dan berpengalaman sesuai, serta memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan.

f. Capaian Mutu Standar Sarana Prasarana Pendidikan

Standar ini terdiri dari tiga Indikator disertai Sub Indikator penyertanya. Secara garis besar, standar ini memuat tentang kapasitas daya tampung sekolah yang memadai, sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak, serta sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak.



Grafik 1.10. Capaian SNP Standar Sarana dan Prasarana

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum, capaian pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan berkategori Menuju SNP 3 dengan nilai 4.05. Pada Indikator 6.1 nilainya mencapai 4.4 atau berkategori Menuju SNP 3 dengan salah satu Sub Indikator berkategori SNP. Selanjutnya pada Indikator 6.2 yang masuk pada kategori Menuju SNP 2 dengan capaian nilai 3.01. Satu Sub Indikator telah berada pada kategori SNP. Indikator 6.3 berada pada kategori Menuju SNP 2 dengan capaian nilai 2.24 dengan salah satu Sub Indikatornya berkategori SNP.

Berdasarkan tabel diatas, maka direkomendasikan bahwa:

1. Satuan pendidikan perlu meningkatkan kapasitas daya tampung sekolah yang memadai antara lain rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa, rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa, kondisi bangunan sekolah memenuhi

persyaratan dan memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan.

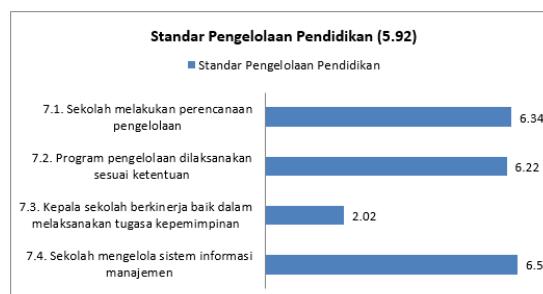
2. Satuan pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak yaitu memiliki ruang kelas sesuai standar, memiliki laboratorium IPA sesuai standar, memiliki ruang perpustakaan sesuai standar, memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar, kondisi ruang kelas layak pakai, kondisi laboratorium IPA layak pakai, dan kondisi ruang perpustakaan layak pakai.

3. Satuan pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak seperti ruang pimpinan sesuai standar, ruang guru sesuai standar, ruang UKS sesuai standar, tempat ibadah sesuai standar, jamban sesuai standar, gudang sesuai standar, ruang tata usaha sesuai standar, ruang konseling sesuai standar, ruang organisasi kesiswaan sesuai standar, menyediakan kantin yang layak, menyediakan tempat parkir yang memadai, kondisi ruang pimpinan layak pakai, kondisi ruang guru layak pakai, kondisi ruang UKS layak pakai, kondisi tempat ibadah layak pakai, kondisi jamban sesuai standar, kondisi ruang tata usaha layak pakai, kondisi ruang

konseling layak pakai, dan kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai.

g. Capaian Mutu Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari empat indikator utama yang memuat tentang perencanaan pengelolaan yang dilakukan sekolah, program perencanaan pengelolaan yang sesuai ketentuan, kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, dan pengelolaan sistem informasi manajemen di sekolah.



Grafik 1.11. Capaian SNP Standar Pengelolaan

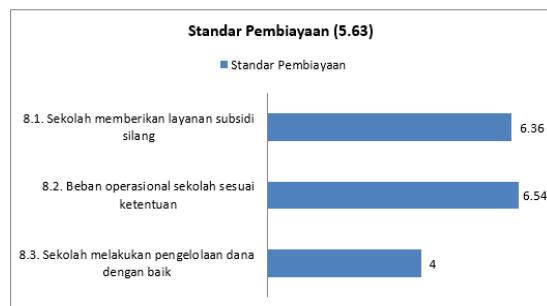
Secara keseluruhan, capaian pada Standar Pengelolaan bernilai 5.92 atau berkategori Menuju SNP 4. Semua Sub Indikator pada Indikator 7.1 berada pada kategori Menuju SNP 4. Sementara salah satu Sub Indikator pada Indikator 7.2 berkategori SNP. Pada Indikator 7.3 berkategori Menuju SNP 1 dengan capaian nilai 2.02. Indikator 7.4 sendiri berada pada kategori Menuju SNP 4 pada capaian nilai 6.5.

Sesuai dengan capaian pada tabel di atas, diperoleh rekomendasi dengan rumusan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan perlu melakukan perencanaan pengelolaan yaitu memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan, mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan, dan melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah.
2. Satuan pendidikan perlu memastikan bahwa program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan yakni memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap, meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan kegiatan evaluasi diri, membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan, dan melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
3. Satuan pendidikan perlu memastikan bahwa Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan yaitu berjiwa kepemimpinan, dan mengelola sumber daya dengan baik.
4. Satuan pendidikan perlu mengelola sistem informasi manajemen sesuai ketentuan.

h. Capaian Mutu Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan terdiri dari tiga Indikator utama yang memuat tentang layanan subsidi silang, beban operasional sekolah, dan pengelolaan dana.



Grafik 1.12. Capaian SNP Standar Pembiayaan

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum, capaian pada Standar Pembiayaan telah masuk pada kategori 5.63 atau berkategori Menuju SNP 4. Indikator 8.1 berada pada capaian nilai 6.36 atau berkategori Menuju SNP 4. Sementara itu, Indikator 8.2 juga berada pada kategori Menuju SNP 4 dengan capaian nilai 6.54. Indikator 8.3 sendiri masih berada pada kategori Menuju SNP 3 dengan capaian nilai 4.00.

Berdasarkan data diatas, maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan perlu memberikan layanan subsidi silang seperti membebaskan biaya bagi siswa tidak

mampu, dan memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas.

2. Satuan pendidikan perlu menentukan beban operasional sekolah dengan memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan.
3. Satuan pendidikan perlu mmelakukan pengelolaan dana dengan baik yaitu mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya, memiliki laporan pengelolaan dana, dan memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis data di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa di capaian mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palopo pada tahun 2018 belum ada yang berkategori SNP atau memenuhi Standar Nasional Pendidikan terutama pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu, baik pihak internal maupun pihak eksternal satuan pendidikan perlu melakukan peningkatan mutu terutama pada kedua standar tersebut diatas beserta 6 standar lainnya, yakni Standar Kompetensi Lulusan. Standar Isi,

Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Dikdasmen. 2017. Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemdikbud.
- Dirjen Dikdasmen. 2017. Indikator Mutu. Jakarta: Kemdikbud.
- Fattah, Nanang. 2013. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Konteks Penerapan MBS. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005. Jakarta: Kemdikbud.
- Sani, Ridwan Abdullah, dkk. 2015. Penjaminan Mutu Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satori, Jam'an. 2014. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: Depdiknas.

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN RPP DAN BAHAN AJAR (LKS) YANG BERBASIS MASALAH GURU MATEMATIKA SMA NEGERI 3 BARRU

Abd. Gani

*Pengawas Sekolah Kabupaten Barru
hindiadulgani@gmail.com.id*

Abstract, this school action research is a development that aims to produce a Learning Implementation Plan (RPP) and a Mathematical Problem Based Student Worksheet (LKS) that is feasible, and can be used in the learning process and to find out the validity, practicality and effectiveness of the Learning Implementation Plan (RPP) and Problem Based Mathematics Worksheet (LKS). The development procedure adapts to the 4-D research and development model or the Thiagarajan model in Trianto (2010) including the stage of defining, the planning stage, the development stage and the deployment stage. The Problem Based Mathematics RPP and Worksheet developed by containing 6 stages of Problem based learning, namely the selection of material, group divisions, material distribution, time giving, group reports and conclusions. This product has been revised several times based on suggestions and input from various supervisors (researchers) and senior mathematics teachers, validators, limited trials, and field trials. The validation of the RPP and LKS Mathematics Teachers at SMA Negeri 3 Barru is classified as Very Valid. Practicality of lesson plans and worksheets Included in the Good category, teacher activities in managing learning are included in the good category and, seen from the positive response of teachers to lesson plans and worksheets included in the excellent category.

Kata kunci: Pengembangan RPP, LKS, Matematika Berbasis Masalah

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi; otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya

adalah ketika anak didik kita lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi.

Paktor utama dalam pendidikan adalah guru, sehingga guru diharapkan menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik yang profesional yakni tugas utama guru dalam perannya selaku penyelenggara pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam tugas pokok sebagai guru yang profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Berdasarkan latar belakang masalah termasuk beberapa pemikiran di atas, teridentifikasi sejumlah permasalahan, sebagai berikut (1) Banyak guru yang membuat RPP asal-asalan saja, bahkan tidak sedikit yang melakukan copy paste. (2) Banyak guru yang membuat RPP tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan RPP. (3) RPP yang dikembangkan oleh guru tidak menyesuaikan dengan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan. (4) Kompetensi guru dalam penyusunan RPP baik secara individu maupun berkelompok (MGMP) sekolah masih belum kompeten. (5) Supervisi akademik oleh pengawas pembina terhadap guru-guru dalam penyusunan RPP masih belum optimal. (6) Sebagian besar guru belum mampu membuat bahan ajar (LKS) yang berbasis masalah

“Pengembangan Perangkat Pembelajaran RPP dan LKS Matematika Bebasis Masalah Guru Matematika SMA Negeri 3 Barru”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh perangkat pembelajaran RPP dan LKS matematika yang

berbasis masalah masalah adalah: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) Lembar Kerja Siswa (LKS),

Komponen RPP: (1) Identitas mata pelajaran, meliputi: (a) satuan pendidikan, (b) kelas, (c) semester, (d) program studi, (e) mata pelajaran atau tema pelajaran, (e) jumlah pertemuan. (2) Standar kompetensi, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. (3) Kompetensi dasar, adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. (4) Indikator pencapaian kompetensi, adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. (5) Tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan

kompetensi dasar. (6) materi ajar, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. (7) alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. (8) metode pembelajaran, digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. (9) kegiatan pembelajaran: (i) Pendahuluan, merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. (ii) kegiatan inti, merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. (iii) Penutup, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut. (10) Penilaian hasil belajar, prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. (11) Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

Prinsip - Prinsip Penyusunan RPP: (1) memperhatikan perbedaan individu peserta didik, (2) RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik: (3) mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan

berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. (4) mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. (5) memberikan umpan balik dan tindak lanjut (6) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedii, (7) keterkaitan dan keterpaduan; RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. (8) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi; RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan

pembelajaran adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pendahuluan: Orientasi: memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan diberikan, dengan cara menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, menampilkan slide animasi dan sebagainya.

- **Apersepsi:** memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan.
- **Motivasi:** guru memberikan gambaran manfaat mempelajari gempa bumi, bidang-bidang pekerjaan berkaitan dengan gempa bumi, dsb.

Kegiatan Inti: Berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan kompetensi dasar. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa agar peserta didik dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator.

Kegiatan penutup: (1) Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman/simpulan, (2) Guru memeriksa hasil belajar peserta didik. Dapat dengan memberikan tes tertulis atau tes lisan atau meminta peserta didik untuk mengulang kembali simpulan yang telah disusun atau

dalam bentuk tanya jawab dengan mengambil ± 25% peserta didik sebagai sampelnya. (3) Memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran, dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan.

Kegiatan Penilaian; dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai.

Dalam implementasinya, perangkat pembelajaran terdiri dari berbagai komponen bergantung pada kebutuhan masing-masing guru. Suatu perangkat pembelajaran minimal memiliki tiga komponen pokok sebagai berikut (Anonim, 2011: 5):

1. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

Lembar kerja siswa merupakan lembaran kerja bagi siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada buku siswa dan diberikan oleh guru pada setiap pertemuan. LKS hanya memuat masalah-masalah konstektual dan tempat untuk menyelesaikan masalah. LKS dirancang untuk memberi kemudahan pada guru dalam mengakomodir tingkat kemampuan siswa dan diharapkan dapat mengembangkan serta memperkuat konsep-konsep yang disajikan.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rancangan skenario pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. RPP memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, serta sumber pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama dari pembelajaran berbasis masalah. *Pertama*, pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Pembelajaran berbasis masalah tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui pembelajaran berbasis masalah siswa aktif berpikir, berkomitmen, mencari, dan

mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. *Kedua*, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. *Ketiga*, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu; sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas.

Pembelajaran berbasis masalah biasanya terdiri dari 5 tahap utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa.

Kelima tahapan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah

Tahap	Tingkah Laku Guru
Tahap – 1 Orientasi siswa kepada masalah	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya
Tahap – 2 Mengorganisasikan siswa untuk belajar	Guru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut
Tahap – 3 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok	Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah
Tahap – 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temuannya
Tahap – 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penye-lidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan

Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Model-model pengembangan perangkat pembelajaran antara lain, sebagai berikut : (1) Model dari Degeng (Wijayanti, 2010), Model pengembangan perangkat pembelajaran ini mliputi tiga tahap, yaitu: (a) Tahap I: Analisis kondisi

pembelajaran, mencakup: (i) Analisis tujuan dan analisis bidang studi, (ii) Analisis sumber alat belajar, (iii) Analisis karakter siswa, (iv) Menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran. (b) Tahap II: Pengembangan, mencakup: (i) Menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, (ii) Menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran, (iii) Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran (c) Tahap III: Pengukuran hasil pembelajaran, Pada tahap ini adalah pengembangan prosedur pengukur hasil pembelajaran.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Barru dengan jumlah 6 Orang yang terdiri 2 Laki – laki dan 4 orang perempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan meliputi mengembangkan Perangkat pembelajaran RPP dan LKS Matematika yang berbasis masalah, yang terdiri dari: (1) Buku Siswa (modul/panduan belajar). (2) Bahan Ajar (Lembar Kerja Siswa), (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri 3 Barru dengan subjek penelitian tahun pelajaran 2018/2019 adalah

Tahap Pembatasan; Tujuannya adalah menetapkan dan menentukan syarat-syarat pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, dan pembatasan materi pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: (a) *Analisis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (b) *Analisis Siswa*, (c) *Analisis Konsep*, (d) *Analisis Tugas*, (e) *Spesifikasi tujuan Pembelajaran*.

Tahap Rancangan; Pada tahap ini, akan dihasilkan rancangan RPP dan LKS matematika yang berbasis masalah dan tes hasil belajar siswa. Tujuannya adalah untuk menghasilkan prototipe bahan pembelajaran yang dikembangkan, mencakup penyusunan tes dan pengembangan bahan pembelajaran. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (a) *Penyusunan Tes*, (b) *Pemilihan LKS yang berbasis masalah*, (c) *Pemilihan Format*, (d) *Rancangan Awal*, Rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh kegiatan yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Adapun rancangan awal RPP dan LKS matematika yang berbasis masalah tersebut, antara lain: (1) Lembar Kerja Siswa (LKS), penguatan, pembelajaran ulang, dan pengayaan, (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Tahap Pengembangan; Pada tahap ini dihasilkan bentuk akhir perangkat pembelajaran. Setelah melalui revisi berdasarkan masukan dari para ahli dan data hasil uji coba. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: (a) *Penafsiran Ahli*; Pada tahap ini dilakukan validasi isi. Para ahli diminta untuk menvalidasi semua RPP dan LKS berbasis masalah yang dihasilkan pada draft 1, Segala perbaikan atau saran dari para ahli dijadikan pertimbangan untuk melakukan revisi perangkat pembelajaran draft 1. Perangkat yang dihasilkan pada revisi ini selanjutnya disebut perangkat pembelajaran draft 2. (b) *Uji Coba*; Sebelum dilakukan uji coba terbatas di lapangan, RPP dan LKS yang berbasis masalah draft 2 disimulasikan terlebih dahulu oleh penulis. Sebagai contoh, diambil salah satu RPP untuk disimulasikan. Selanjutnya saran dan kritik dari penelaah, guru mitra (guru mata pelajaran), dan pengamat, sebagai bahan pertimbangan dan dasar untuk melakukan revisi terhadap RPP dan LKS yang berbasis masalah draft 2. Hasil perbaikan ini adalah perangkat pembelajaran draft 3 yang siap digunakan untuk uji coba selanjutnya.

Untuk memperoleh informasi tentang aktivitas siswa dan guru selama

kegiatan pembelajaran, keterampilan siswa, respon siswa terhadap pembelajaran matematika, dan pengelolaan guru dalam kegiatan belajar mengajar, maka perlu mengembangkan instrumen. Instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

(1) *Tes Penguasaan Siswa Terhadap Materi Pelajaran*

Tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran diperoleh dengan melalui tes yang disusun dan dikembangkan sendiri oleh penulis berdasarkan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Tes ini termasuk tes mengukur aspek kognitif siswa berupa tes uraian. Selanjutnya setelah perangkat tes diujicobakan kepada sejumlah siswa, maka secara tidak langsung data hasil uji coba juga digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki buku siswa dan LKS.

Pemberian skor pada hasil tes ini menggunakan skala bebas tergantung dari bobot butir soal tersebut. Jadi, dalam pemberian skor total setiap butir tergantung dari banyaknya langkah-langkah penyelesaian dari soal tersebut. Kriteria yang digunakan untuk menentukan skor adalah skala lima berdasarkan teknik kategorisasi standar yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (urfiah, 2014)

yaitu: (i) Kemampuan 85%-100% dikategorikan sangat tinggi, (ii) Kemampuan 65%-84% dikategorikan tinggi, (iii) Kemampuan 55%-64% dikategorikan sedang, (iv) Kemampuan 35%-54% dikategorikan rendah, (vi) Kemampuan 0%-34% dikategorikan sangat rendah

Rincian kegiatan yang dilakukan pada masing - masing tahap dalam satu tahap penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut:

- (a) **perencanaan Tindakan;** Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap I perencanaan tindakan ini adalah sebagai berikut: (1) Pengawas (peneliti) menelaah Kompetensi Dasar sesuai dengan Silabus, (2) Pengawas (peneliti) melakukan analisis materi pelajaran sesuai Kompetensi Dasar, (3) Pengawas (peneliti) menelaah materi yang akan diajarkan oleh setiap guru mata pelajaran. (4) Pengawas (peneliti) mempersiapkan format pengembangan perangkat kegiatan belajar mengajar yang meliputi: rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku siswa, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan instrumen penilaian yang akan digunakan. (5) Pengawas (peneliti) mempersiapkan format lembar observasi untuk mengamati kondisi pembelajaran di kelas ketika

pelaksanaan tindakan berlangsung. (6)

Pada setiap akhir pertemuan kegiatan MGMP pengawas memberikan penguatan tentang hasil rancangan setiap pertemuan.

(b) **Observasi, Refleksi dan Evaluasi;**

Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan dengan mencatat semua kejadian yang terjadi dalam pelaksanaan tindakan serta pada saat mengadakan evaluasi;

(c) **Refleksi;**

Refleksi dilakukan meliputi seluruh kegiatan penelitian baik pada Tahap I maupun pada Tahap II. Data yang telah diperoleh berupa hasil telaah perangkat kegiatan belajar mengajar (KBM), hasil observasi, dan tanggapan guru dianalisis.

(d) **Sumber Data;** Sumber data penelitian ini adalah Guru matematika SMA Negeri 3 Barru, Jenis data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif, yang terdiri dari kumpulan hasil pekerjaan guru dalam mengembangkan Perangkat Pembelajaran RPP dan LKS matematika yang berbasis masalah melalui bimbingan terstruktur di MGMP Sekolah.

(e) **Waktu dan Prosedur Penelitian;**

Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan sebanyak dua tahap. Setiap tahap dilakukan perubahan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai seperti yang telah

direncanakan dalam penelitian yang diselidiki melalui kegiatan di MGMP. Secara rinci pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut: (1) Tahap pertama dilaksanakan selama 4 kali pertemuan (20 jam). (2) Tahap kedua juga dilaksanakan selama 4 kali pertemuan (20 jam pelajaran).

Tahap pertama berlangsung pada minggu II, III, dan IV Agustus 2018 sampai dengan minggu I September 2018 pada semester ganjil selama 4 kali pertemuan (20 jam). Materi yang bimbingan pada tahap I adalah sebagai berikut: (1) Menganalisis Silabus, (2) Menganalisis Standar Kompetensi, (3) Menganalisis Kompetensi Dasar, (4) Mengembangkan Indikator, (5) Mengembangkan Tujuan Pembelajaran, (6) Menganalisis materi pelajaran, (7) Mengidentifikasi menyesuaikan metari dengan metode pembelajaran yang digunakan, (8) Pengembangan RPP. (9) Pengembangan Bahan Ajar (LKS). (10) Pengembangan Penilaian; Sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Tahap II dilaksanakan pada minggu III Oktober 2018, sampai dengan minggu II November 2018, semester ganjil sebanyak 4 kali pertemuan (20 jam), materi

yang bimbingan pada tahap II sama dengan kegiatan tahap

Teknik Pengumpulan Data; Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Sumber Data tentang hasil pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis masalah yang diperoleh dari pengisian lembar observasi dan instrumen telaah perangkat pembelajaran, (2) Jenis Data mengenai keaktifan guru diperoleh dari observasi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Cara Pengambilan Data, Data diambil dari hasil Observasi peneliti setiap kegiatan pembelajaran, dan data diambil melalui pengisian instrumen telaah perangkat kegiatan belajar mengajar guru setiap akhir pertemuan MGMP dan akhir tahap.

Teknik Analisis Data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data hasil observasi dianalisis secara kualitatif sedangkan data mengenai hasil pengembangan perangkat kegiatan belajar mengajar matematika yang berbasis masalah guru dianalisis secara kuantitatif.

Kriteria keberhasilan tindakan adalah adanya peningkatan kemampuan guru matematika SMA Negeri 3 Barru

dalam mengembangkan perangkat Kegiatan pembelajaran matematika yang berbasis masalah yaitu: (1) Lembar Kerja Siswa (LKS), (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Analisis dan Refleksi, Dalam hal ini dilakukan analisis data yang dikumpulkan dari hasil penelitian dan evaluasi pada tahap sebelumnya. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif.

Indikator Kinerja, Penelitian dianggap berhasil jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 1 Standar Kategori Keberhasilan

No	Skor	Kategori	Penilaian RPP		Penilaian LKS	
			Skor	Persentase	Kategori	Skor
1	< 55%	Kurang				
2	55% - 69%	Cukup				
3	70% - 85%	Tinggi				
4	86% -100%	Sangat Tinggi				

Sumber: Juknis Kepengawasan Penilaian Kinerja Guru
 Hasil Penelitian Penelitian tindakan sekolah tentang pengembangan perangkat pembelajaran RPP dan LKS yang berbasis masalah yang dilaksanakan oleh pengawas selama dua tahapan, dimana pada setiap tahapan I dan tahapan II masing-masing dilaksanakan selama 4 kali pertemuan dan 1 kali pelaksanaan evaluasi akhir tahapan I dan akhir tahapan II.

Deskripsi Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika yang Berbasis Masalah Pada Tahapan I

Secara umum, hasil penilaian para ahli terhadap perangkat pembelajaran yang meliputi Buku Siswa, LKS, dan RPP dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Analisis hasil evaluasi akhir Tahap I dan tahap II kemampuan guru mengembangkan perangkat pembelajaran yang berbasis Masalah (RPP dan LKS)

No	Nama	Penilaian RPP		Kategori	Penilaian LKS		Kategori
		Skor	Persentase		Skor	Persentase	
1	H. Muh. Abidin	49	87,50	Baik Sekali	370	92,50	Baik sekali
2	H. Busran	52	92,86	Baik Sekali	375	93,75	Baik sekali
3	Syafruddin	46	82,14	Baik	341	85,31	Baik sekali
4	Roslaela	45	80,36	Baik	338	84,58	Baik
5	Sugirah	47	83,93	Baik	342	85,63	Baik sekali
6	Syamsinar	45	80,36	Baik	338	84,58	Baik
Jumlah						87,73	Baik sekali

Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahap I terlihat ,bahwa sebagian besar kemampuan guru matematika termasuk dalam kategori baik, yakni terdapat 4 orang guru kategori baik dan 2 orang dalam kategori baik sekali, dengan demikian penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan terstruktur melalui pemanfaatan MGMP sekolah dapat meningkatkan kemampuan guru matematika dalam mengembangkan Perangkat Pembelajaran RPP guru Matematika SMA Negeri 3 Barru

2. Hasil Evaluasi Kemampuan Mengembangkan Perangkat Pembelajaran LKS

Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahap II terlihat bahwa sebagian besar kemampuan guru matematika mempunyai kemampuan dalam baik sekali yakni terdapat 4 orang termasuk dalam kategori baik sekali dan 2 orang termasuk dalam kategori baik, dengan demikian penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan terstruktur melalui pemanfaatan MGMP sekolah dapat meningkatkan kemampuan guru matematika dalam mengembangkan Perangkat Pembelajaran RPP dan LKS yang berbasis Masalah guru SMA Negeri 3 Barru.

a. Rangkuman Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran

Berdasarkan hasil analisis validasi perangkat pembelajaran termasuk dalam kategori “**Valid**” ($2,5 \leq \bar{x} < 3,5$). Namun demikian perangkat tersebut yang menurut saran para ahli masih perlu diperbaiki atau ditambahkan.

Berdasarkan hasil evaluasi hasil belajar diberikan ke siswa untuk memperoleh informasi tentang penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan.

Hasil analisis deskriptif secara kuantitatif

terhadap penguasaan matematika setelah diberi tindakan dapat menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas X_{MIA.2} SMA Negeri 3 Barru terhadap pelajaran matematika diperoleh skor rata-rata 87,81 dari skor ideal 100 dengan standar deviasi 11,65, Skor minimum yang diperoleh siswa adalah 60 dan skor maksimum yang diperoleh siswa adalah 100 dengan rentang skor 40.

Jika skor hasil belajar dikelompokkan ke dalam lima kategori, maka diperoleh informasi bahwa dari 32 siswa yang mengikuti tes hasil belajar terdapat 6,25% siswa yang masuk kategori sedang, 25% siswa masuk dalam kategori tinggi, sedangkan siswa yang masuk dalam kategori sangat tinggi adalah 68,75%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang baik terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan RPP dan LKS matematika yang berbasis masalah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan ujicoba terbatas terhadap pengembangan RPP dan LKS matematika yang berbasis masalah dengan menggunakan perangkat pembelajaran

pada kelas X.MIA.2 SMA Negeri 3 Barru, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan perangkat pembelajaran RPP dan bahan ajar LKS matematika yang berbasis masalah pada penelitian ini meliputi; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) menggunakan model Thiagarajan (Trianto 2010) model 4-D yang meliputi empat tahap yaitu tahap pembatasan, tahap perancangan, tahap pengembangan, dan tahap penyebaran.
- 2) Setelah dilakukan validasi dan revisi, pengembangan RPP dan LKS matematika yang berbasis masalah pada penelitian ini yang meliputi; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar kerja Siswa (LKS) sudah layak digunakan berdasarkan hasil penilaian 2 ahli yang menilai bahwa perangkat pembelajaran sudah valid dan layak digunakan. Dan hasil pengamatan pengelolaan pembelajaran sebagian besar aspek dapat terlaksana dengan baik.

SARAN

1. RPP dan Bahan Ajar LKS yang telah dihasilkan dengan menggunakan perangkat pembelajaran masih perlu

diujicobakan pada kelas-kelas lain sebelum digunakan.

2. Para guru matematika sebaiknya mengembangkan RPP dan LKS dan sesuai dengan menggunakan perangkat pembelajaran pada pokok bahasan lain dengan melakukan ujicoba berkali-kali sehingga didapatkan RPP dan LKS yang layak untuk digunakan dan dilakukan sampai pada tahap penyebaran.
3. Sekolah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana dalam melaksakmana MGMP Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninom, 2011, Pengembangan Media Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Berdasarkan Gaya Belajar Siswa pada Materi Volume Kubus dan Balok. *Tesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya
- Daryanto, 2010, *Belajar dan Mengajar*, Yrama Widya, Bandung
- Hudoyo, 1988, mengajar belajar matematika, Jakarta: dirjen Dikti
- Upu, 2012, Pengembangan Bahan Ajar Materi Geometri berdasarkan Teori Belajar Van Hiele Berbasis Karakter untuk Siswa kelas X

- SMAN 4 Sinjai Utara, *Tesis*, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Makassar, Makassar
- Wiljayati, 2010, Penerapan Model Pembelajaran Tutor Sebaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X SMA Banat Kudus pada materi pokok operasi bilangan pecahan semester 1 tahun ajaran 2009/2010, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Matematika, Semarang
- Trianto, 2010, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatin-Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Urfiah, 2014. *Junkis Kriteria keberhasilan penilaian kinerja guru*, Jakarta, Direktutorat Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah.

..... *Gunting dan kirimkan ke alamat Tata Usaha JIK atau fax. (0411)
873413 atau surel ke lpmpsulse@kemdikbud.go.id*

FORMULIR BERLANGGANAN

Mohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal Ilmu Kependidikan

Nama :

Alamat :

.....(Kode Pos)

.....,

.....

GAYA SELINGKUNG JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN LPMP SULAWESI SELATAN

Persyaratan sebuah naskah untuk dimuat pada Jurnal Ilmu Kependidikan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dipaparkan berikut ini.

Artikel diangkat dari hasil penelitian atau non penelitian (ada temuan) di bidang kependidikan.

Artikel ditulis dengan Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris, naskah belum pernah diterbitkan media lain, dikenal 1,5 spasi dengan huruf Times New Roman, ukuran font 12 pada kertas kuarto, jumlah 10-20 halaman dilengkapi abstrak sebanyak 75-100 kata dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia disertai kata-kata kunci. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul pada halaman pertama naskah yang disertai dengan nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, serta alamat e-mail penulis. Naskah dikirim dalam bentuk print out sebanyak 2 eksamplar dan disertai dengan softcopinya.

Artikel hasil penelitian ditulis bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai (naratif) dengan memuat Judul (mencerminkan masalah yang diteliti, mengikuti kaidah kebahasaan dan tidak terlalu panjang/pendek); narasi penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (menggambarkan masalah, tujuan, metode dan hasil penelitian maksimum 100 kata); kata kunci dan isi artikel mempunyai struktur, sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut (sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum).

Penulis dapat mengembangkannya sendiri asal sepadan dengan pedoman ini)

Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ringkasan kajian teoretik yang relevan, mengemukakan pendekatan pemecahan masalah. (20%)

Metode yang berisi rancangan/model, populasi, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik dan instrumen pengumpulan data serta teknik analisis data. (15%)

Hasil yang menunjukkan hasil bersih analisis data, memanfaatkan secara efektif bentuk penyajian non-naratif (grafik, tabel, diagram); tidak mengulang sebut apa yang sudah ditampilkan dalam grafik atau tabel; secara keseluruhan berstruktur naratif. (20%).

Pembahasan menginterpretasikan secara tepat hasil penelitian, mengaitkan secara argumentatif temuan penelitian dengan teori yang relevan, menggunakan bahasa yang logis dan sistematik. (30%)

Kesimpulan dan Saran hendaknya sesuai dengan hasil penelitian, tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dan saran-saran yang diajukan logis. (15%)

Daftari Rujukan hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk di dalam artikel.

Artikel pemikiran (non-penelitian) memuat judul (mencerminkan masalah yang diteliti, mengikuti kaidah kebahasaan dan tidak terlalu panjang/pendek); nama penulis (tanpa

gelar akademik); abstrak (berfungsi sebagai ringkasan, bukan pengantar atau komentar penulis, maksimum 100 kata); kata kunci dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut (Sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat mengembangkannya sendiri asalkan sepadan):

Pendahuluan meliputi gambaran ringkas masalah dengan menekankan nuansa ketaktuntasan, kontroversi, pendapat alternatif serta menekankan tujuan pembahasan. (10%)

Pembahasan meliputi perbandingan berbagai pendapat secara kritis, objektif, logis dan sistematik, mengandung pernyataan sikap atau pendirian penulis tentang masalah yang dibahas. (70%)

Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran (sejalan dengan pendirian penulis). (20%)

Daftar rujukan memuat semua rujukan yang telah disebut di dalam artikel.

Sumber rujukan sedapat mungkin pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi) atau artikel dalam jurnal dan majalah ilmiah.

Perujukan dan pengutipan, menggunakan teknik perujukan berkurung (nama, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh: Hernandez, 1997:150).

Daftar Rujukan disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Buku:

Arends, R.I. 1997. *Classroom Instructional and Management*. New York: Mc. Graw-Hill.

Artikel jurnal atau majalah:

Suradi. 2005. Tinjauan tentang Implementasi Pembelajaran Kooperatif dalam Pembelajaran Matematika, *Jurnal Ilmu Kependidikan*, 2 (1) 2: 21-40.

Artikel dalam Koran:

Koesoema, D. 29 Juli, 2008. Misi Kebijakan Pendidikan. *Kompas*, hlm. 6.

Tulisan/berita dikoran (tanpa nama pengarang)

Kompas. 29 Juli, 2008. Guru Kritis Dijatuhi Sanksi, hlm. 14.

Dokumen Resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan. 2004. *Buku Panduan Program PengalamanLapangan I*. Surabaya:Universitas Negeri Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. 2003. Jakarta: Cemerlang.

Buku Terjemahan:

Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Astuty, Daswatia. 1999. *Pengaruh Sikap, Kebiasaan Belajar, dan Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SD Negeri di Kotamadya Ujung Pandang*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar PPS UNM.

Internet (Karya Individual):

Strong, J. 2001. Making Literacy Across the Curriculum Effective, (Online), (<http://www.Literacytrust.org.uk/pubs/juliasec.html>, diakses 4 November 2007).

Internet (Artikel dalam Jurnal Online):

Khaeruddin, 2006. Pembelajaran Sains-Fisika Melalui Strategi Numbered Head Together (NHT) pada pokok Bahasan Kalor di SMA. Jurnal Ilmu Kependidikan. (Online), Volume 3, No.1 (<http://bpgupg.go.id>, htpp://bpgupdiakses 1 Januari 2008).

Naskah diketik dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

Pengiriman naskah disertai dengan alamat, nomor telepon, fax atau e-mail (bila ada). Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis. Naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapat imbalan berupa nomor bukti pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar.

JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Subag Tata Usaha dan Rumah Tangga
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan,
Jl. A. P. Pettarani Makassar 90222 Telepon (0411) 873565 dan fax (0411) 873513.
laman: <https://lpmpsulsel.kemdikbud.go.id/>
Surel: lpmpsulsel@kemdikbud.go.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SULAWESI SELATAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SULAWESI SELATAN

